Alamat Redaksi dan Sirkulasi
LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane)

Tlp. / Fax
62-251-8344473

Email:
lips@lips.or.id

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) adalah Organisasi Non-Pemerintahan yang memokuskan kerjanya pada penyediaan informasi tentang dinamika keserikatburuhan di Indonesia, tentang pengembangan organisasi, tentang modul-modul pendidikan, dan informasi untuk demokratisasi dan polititsasi serikat buruh

LIPS memosisikan diri sebagai wadah komunikasi antaraktivis serikat buruh, aktivis Organisasi Non-Pemerintahan bidang perburuhan, intelektual, dan akademisi dalam rangka merumuskan pemikiran-pemikiran inovatif untuk mewujudkan lahirnya gerakan buruh yang demokratis dan independen

**LIPS bercita-cita untuk mencapai kondisi dimana buruh yang merupakan satu elemen sosial dapat hidup sejahtera, bebas dari sistem kerja eksploitatif dan tidak adil, baik dalam hubungan jender maupun klas.
Buruh mendapatkan kebebasan berorganisasi sebagai ekspresi politiknya yang hakiki dan mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara yang memengaruhi nasib mereka**

**Jurnal Sedane, diterbitkan secara mandiri oleh LIPS dua kali setahun, merupakan wadah mengembangkan pemikiran alternatif dalam rangka melahirkan wacana gerakan buruh di Indonesia.
Lewat jurnal ini pengalaman dan pembacaan di lapangan direfleksikan, teori diaplikasikan, yang diharapkan dapat mendorong gerakan buruh yang demokratis dan independen.**

ISSN 0852-1239





Jurnal Kajian Perburuhan

SEDANE

Vol. 9 N0. 1 Tahun 2010



Jurnal perburuhan SEDANE

Vol. 9
N0. 1
2010



Jurnal Kajian Perburuhan

Sedane

Vol 9, No. 1, 2010

GAGASAN

DIALOG

TOKOH

TINJAUAN BUKU

DINAMIKA

ISSN 0852-1239

Alamat Redaksi dan Sirkulasi
Jl. Dewi Sartika 52F
Bogor 16121
Jawa Barat-Indonesia
Tlp. / fax
+62-251-8344473
Situs Web
www.lips.or.id
Email
lips@lips.or.id



Pengantar Redaksi

Pertengahan 2008 lalu, ekonomi Indonesia terimbas krisis keuangan yang berpusat di Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa krisis tersebut adalah yang terparah sejak krisis 1930-an. Para ekonom dan pemimpin dunia dalam Group 20 maupun lembaga-lembaga keuangan multilateral bersepakat menggelontorkan uang untuk menyelamatkan perekonomian dari ambang kehancuran. Pada akhir 2008, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah penyesuaian demi menyelamatkan perekonomian Indonesia – yang menurut sebagian pengamat ekonomi sedang berbinar.

Rupanya, keuangan dunia belum pulih benar—menyusul krisis di Negara-negara Eropa. Semester I 2010, keadaan perdagangan di dunia tidak begitu ramah terhadap kondisi usaha. Agregat permintaan barang dan jasa di dalam maupun di luar negeri melambat. Para pemikir, terutama kubu-kubu neoklasik bisa saja berpendapat bahwa krisis terjadi karena negara yang masih intervensionis. Dan, pasar (kapitalisme) belum bekerja dengan sempurna. Karena itu, kurangi peran negara dan biarkan mekanisme pasar bergerak seluas-luasnya! Setidaknya, itulah yang diperlihatkan dengan disepakatinya perdagangan bebas di tingkat negara-negara ASEAN dengan China, New Zealand, Korea Selatan dan Jepang.

Mari kita letakkan dulu persoalan krisis keuangan global dan bagaimana masa depan ekonomi Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk berziarah ke masa lalu, ketika Depresi Besar (The Great Depression) 1930-an ikut menghantam perekonomian Kolonial Belanda di Indonesia. Masa Depresi Besar atau disebut *Malaise*, sebagaimana dicatat oleh John Ingleson dalam buku *Tangan dan Kaki Terikat; Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial* (2004), membawa dampak-dampak serius bagi kehidupan buruh dan serikat buruh. Pada masa itu, upah buruh di sektor-sektor industri merosot tajam, bahkan terjadi pemecatan besar-besaran. Akibatnya, keanggotaan serikat buruh menurun hingga setengahnya. Tidak banyak yang dapat dilakukan serikat buruh ketika anggotanya dipecat oleh perusahaan, kecuali membiarkannya pulang kampung.

Dampak-dampak krisis tersebut terus dialami hingga 1936-an. Keanggotaan serikat buruh kembali normal menjelang 1940-an. Tapi, menurut Ingleson, membaiknya kondisi serikat buruh hanya berlaku bagi organisasi-organisasi yang memiliki struktur dan model organisasi yang

tahan terhadap krisis dan deraan politik kolonial. Sayangnya, John tidak menyebut secara langsung model organisasi buruh seperti apa yang memiliki daya tahan untuk melawan kebijakan ekonomi-politik Kolonial Belanda waktu itu. Ia hanya menggambarkan bahwa program perlawanan terhadap penjajah, tuntutan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja diikuti pula oleh aktivitas-aktivitas organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi anggota dan keluarganya. Hanya organisasi yang demikian yang bertahan pada masa itu. Tentu saja, hal ini telah diujicobakan oleh serikat-serikat masa lalu yang sukses mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan.

Kembali lagi ke dunia kontemporer. Pada 2010, upah minimum rata-rata naik 6 persen. Tapi kenaikan itu dibalas setimpal dengan kenaikan tarif dasar listrik yang rata-rata 10 persen. Bahkan, suara sumbang dari beberapa pengusaha untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan (UUK) kembali dinyanyikan, sejak awal Januari 2010. Alasan untuk merevisi UUK tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan pada 2006; seputar pesangon yang memberatkan pengusaha, pemutusan hubungan kerja yang rumit, soal status kerja dan perekrutan tenaga kerja. Intinya, mempekerjakan maupun memecat buruh dianggap terlalu mahal.

Di kalangan serikat di berbagai daerah diteriakan pula persoalan represi terhadap aktivis serikat: aktivis serikat yang dipidanakan akibat persoalan yang sepele, anggota-anggota yang dipecat atas nama penyehatan perusahaan dan lain-lain. Namun, keadaan ini seolah dibiarkan oleh negara. Lalu, apa yang dapat kita dilakukan? Itulah PR bersama yang harus dipikirkan dan dicari pemecahannya. *Toh*, urusan serikat bukan hanya urusan pimpinan organisasi. Serikat sebagaimana dalam kredonya adalah wadah belajar dan berdemokrasi.

Sidang pembaca yang berbahagia, Jurnal Kajian Perburuhan Sedane (Jurnal Sedane) Volume 9 Nomor 1 2010 kembali di hadapan Anda dengan tulisan-tulisan perburuhan. Terdapat tiga artikel, dua wawancara, tinjauan buku, profil tokoh dan dinamika perburuhan semester I 2010. Semoga tema-tema tersebut dapat menginspirasi kita untuk memperkuat dan memajukan serikat buruh. Setiap tulisan dapat dibaca secara acak, tidak perlu runut.

Rubrik Gagasan menghadirkan tiga artikel. Pertama, Meninjau Ulang Kelas Pekerja dan Pendekatan Lintas Belahan (*Cross-Cleavage Approach*); Studi

Kasus Perjuangan Gerakan Sosdem Di Skandinavia yang ditulis oleh Cherry Augusta. Kedua, Pentingnya Membangun Terbitan Berkala Serikat Buruh yang disumbang oleh Abu Mufakhir. Ketiga, Melawan Dalam Kepatuhan; Perlawanan Buruh Ramai Mall di Yogyakarta olahan Yogi Setya Permana.

Rubrik Dialog mengajak kita untuk memikirkan ulang model-model pengorganisasian yang selama ini sedang dijalankan. Ternyata, yang kita hadapi bukan hanya buruh tetap. Ada ribuan calon buruh dan buruh kontrak serta *outsourcing* yang belum tersentuh oleh model pengorganisasian selama ini. Kami menurunkan dua wawancara: bersama Ketua Persatuan Buruh Kontrak Mengguat (PBKM) Jawa Barat dan Presiden Paguyuban Pekerja Muda Peduli. PBKM adalah organisasi buruh kontrak yang dibentuk di luar perusahaan untuk memperjuangkan kepentingan buruh-buruh kontrak. Sementara PPMP berupaya mengorganisir calon-calon buruh (pemuda) sekaligus buruh.

Di rubrik Tokoh kami mengingatkan lagi mengenai sang tokoh pergerakan nasional yang melawan dengan pena. Dia adalah jurnalis *cum* aktivis antikolonial, Mas Marco Kartodikromo. Melalui tangan lihainya Lutfhi Adam, profil Mas Marco tampil begitu bersahaja dalam upaya membebaskan Indonesia dari gurita kolonialisme.

Di rubrik Tinjauan Buku, Yasmine Soraya menambah referensi kita mengenai perkembangan kapitalisme, Supercapitalism; *The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life.*

Melalui pengantar ini kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis; Cherry Augusta, Abu Mufakhir, Yogi Setya Permana, Luthfi Adam dan Yasmine Soraya yang telah bersedia mengirimkan tulisannya. Kami pun menghaturkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia dipublikasikan wawancaranya.

Kepada kawan-kawan yang tidak berhenti memberikan masukan, kritikan dan doanya, kami mengucapkan terima kasih. Kami tunggu kritikan kalian yang lebih tajam! Tidak lupa, Tim Jurnal juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyumbangkan dana untuk penerbitan Jurnal Sedane. Karena sumbangan kawan-kawanlah Jurnal ini bisa terbit. *Thank's banget ya*!

Selama membaca!

Meninjau Ulang Kelas Pekerja dan Pendekatan Lintas Belahan (*Cross-Cleavage Approach*); Studi Kasus Perjuangan Gerakan Sosdem di Skandinavia

Cherry Augusta

Abstract

The Scandinavian social democrat's ability in managing societal cleavage of politics is an important part in their relative success of promoting the ideas of social democracy, and welfare state. But there are revived and contested arguments about what kind of cleavages that mostly played significant role and strategically managed to pave the way for democratization, and also what kind of approaches used in managing them. Social democrats play highly important role in organizing the working class. Organized working class as democratic potential become increasingly significant when it enfranchised. Furthermore, the class met typical contexts in capitalism development and traditional cleavages of Scandinavia, in which there is cross-cutting cleavages. The cross-cleavages approaches definitely most used in the struggle, particularly throughout coalition with another class, territorial and cultural groups, gender, and even religious groups.

Key Terms: Social Democrat, Societal Cleavage, Organized Working Class, Croos-Cutting Cleavages, Cross-Cleavages Approaches

A. PENGANTAR

Tidak ada keraguan bahwa kemampuan dari kaum Sosialis Demokrat (Sosdem) di Skandinavia dalam mengelola belahan-belahan sosial dalam politik menjadi bagian yang penting dari kesuksesan relatif mereka: mempromosikan gagasan-gagasan sosial demokrasi dan negara kesejahteraan. Tetapi, terdapat sejumlah argumen yang berkontestasi mengenai jenis belahan (*cleavage*); apa yang paling memainkan peran signifikan dan secara strategis melapangkan jalan bagi demokratisasi, serta pendekatan apa yang digunakan untuk mengelola *cleavage* tersebut. Dengan demikian, akan sangat berarti untuk meninjau ulang peranan kelas pekerja dan bagaimana kaum Sosdem mengelola belahan-belahan kelas sosial (*social class cleavages*) dalam proses demokratik berbasiskan sejarah sosial demokrasi di Skandinavia.

Ruth Berins Collier, dalam kata-kata kritisnya mengatakan, "Pertanyaan mengenai peranan kelas pekerja dalam demokratisasi merupakan bagian debat panjang dalam *concern* demokrasi liberal, yang dipahami sebagai sekumpulan institusi tertentu. Apakah rejim demokratik merupakan hasil dari kemenangan dari bawah, yang mensubordinasi atau mengeksklusi kelompok-kelompok yang merebut kekuasaan elit yang keberatan (terhadap demokrasi), atau sebuah penaklukan dari atas, di mana pihak-pihak yang berkuasa atau kelompok-kelompok ekonomi yang muncul

dan tidak memegang kekuasaan, mencapai agenda-agenda politik mereka sendiri serta berupaya untuk memperkuat posisi-posisi politik mereka?" (Collier, 1999: 1).

kaum Sosdem Skandinavia telah relatif sukses me-manage societal cleavages dalam pertarungan politik

Mudah dipahami bahwa kaum Sosdem yang secara jelas memahami bahwa negara-negara Skandinavia memiliki karakter belahan sosial (*societal cleavages*) istimewa, yang dapat menjadi bersifat positif atau negatif bagi gerakan sosdem secara keseluruhan, tergantung pada bagaimana kaum Sosdem mengelola dan mengolahnya. Sejauh pengalaman sejarah Skandinavia, *societal cleavages* yang paling mendominasi di Skandinavia sangat kompleks. Ia meliputi kelas sosial, ekonomi, agama, budaya, teritorial, dan jender. Stein Rokkan (1967) menggarisbawahi geografi, agama, dan kelas sosial sebagai *cleavage* utama di dalam politik Norwegia. Sementara Oddbjorn Knutsen (1998) menekankan kelas sosial, sektor pekerjaan, dan jender sebagai belahan politik (*political cleavages*) di Negara-negara Skandinavia. Meskipun, antara Rokkan dan Knutsen memiliki penekanan-penekanan yang berbeda dalam pandangannya, namun keduanya sangat menekankan kelas sosial. Karenanya, di sini saya memfokuskan pada kelas sosial sebagai *political cleavages* utama.

Walaupun *cleavages* tersebut, tentu tidak *fixed*, karena dinamikanya yang meliputi sejumlah transformasi bentuk, pola, dan karakter akan berbeda dalam ruang dan waktu. Dinamikanya dari waktu ke waktu sangat menentukan jalan dari proses demokratis itu. Ia dapat menjadi potensi atau ancaman bagi proses demokratik. Kita dengan mudah dapat menemukan fakta bahwa Skandinavia memiliki sejarah panjang dan dengannya mengalami beragam konflik dan kompromi antar-*cleavage*. Dengan demikian, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, kaum Sosdem Skandinavia telah relatif sukses me-*manage societal cleavages* dalam pertarungan politik. Sejumlah isu terkait *societal cleavages*, telah memunculkan beragam debat dan konflik politik mengenai praktik kebudayaan, kebijakan sosial, hubungan antara pusat-pinggiran (*center-periphery*), dan lain-lain. Struktur dan formasi dari *societal cleavages* terkonstruksi melalui periode sejarah yang panjang, sejak masa lalu, saat ini dan masa depan dari Skandinavia. Bagaimanapun, ia sangat memengaruhi proses dalam membangun negara-negara bangsa di Skandinavia. Lebih lanjut, persoalan ini telah mengarahkan isu-isu kontemporer mengenai bagaimana Bangsa Skandinavia menemukan kembali nasionalisme mereka dalam era globalisasi, transnasionalisme, neoliberalisme dan postfordisme.

Dalam me-*manage* belahan (*cleavage*) tersebut, kaum Sosdem menggunakan berbagai strategi, pendekatan dan institusi, meliputi pengorganisasian kelas pekerja, pengaturan kesejahteraan (*welfare*

arrangement), pelembagaan solidaritas sosial (*institutionalization of social solidarity*), mempromosikan kesatuan yang didasarkan pada kesadaran kelas, dan nilai-nilai dasar tertentu dari paham welfarisme. Bukanlah hal yang sederhana tentang bagaimana me-*manage* cleavage tersebut, di dalamnya terdapat dilemma dan tantangan, di samping memang juga ada kesempatan di dalamnya. Namun, kesuksesan relatifnya adalah strategi tersebut telah menurunkan konflik etnis, bahasa, dan agama. Konflik tersebut kemudian menjadi lebih tersatukan dalam konflik kelas. Gerakan sosdem tampaknya telah mempelajari tentang strategi me-*manage societal cleavage* dari pola-pola yang relatif konsisten pada dukungan dan isu-isu elektoral yang berbasis pada *cleavage* tersebut sepanjang periode dan teritori tertentu.

Dalam politik elektoral, terdapat pola-pola dukungan politik terhadap kaum Sosdem dan para pesaingnya berdasarkan pada kecenderungan-kecenderungan dan karakter-karakter *societal cleavage* tersebut. Bagaimanapun, pola-pola tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat dari *cleavage*, serta jenis strategi apa yang digunakan oleh kaum Sosdem dalam upaya meraih 'simpati' semua komponen rakyat Skandinavia. Ia akan terus berubah, isu-isu baru seperti masalah-masalah demografik, imigrasi, transnasionalisme, dan globalisasi akan turut berpengaruh.

Lebih lanjut, dalam paper ini, untuk menjawab pertanyaan utama saya mengenai: bagaimana kaum Sosdem me-*manage* kelas pekerja dan *class cleavage* lainnya dalam politik membangun negara kesejahteraan (*welfare state*), dan apakah ia memiliki signifikansi dalam keberlangsungan negara-negara kesejahteraan di Skandinavia? Pertama, saya akan secara komparatif dan kritis mereview struktur kelas Skandinavia. Kedua, saya akan secara komparatif mengeksplorasi asal-usul dan dinamika dari masing-masing kelas di Skandinavia. Terakhir, saya akan menelusuri strategi dalam me-*manage social-class cleavages* melalui *cross-cleavage approach*.

B. Struktur, Konflik dan Transformasi dari Kelas Sosial Skandinavia

Dalam hal keterhubungan (*linkage*) antara kelas sosial dan negara kesejahteraan (*welfare state*), terdapat beberapa kontensi dan argumen yang dapat diperdebatkan mengenai struktur kelas di Skandinavia, antara lain mengenai homogenitas atau heterogenitas dan bagaimana ia dipengaruhi serta memengaruhi sifat (*nature*) dari negara kesejahteraan Skandinavia. Knut Halvorsen dan Steinar Stjerno mengutip pendapat berikut ini, "Walaupun Norwegia lebih homogen dalam hal etnisitas dan agama serta struktur kelas yang lebih egaliter dibandingkan dengan sebagian besar bangsa Eropa lainnya, homogenitas merupakan sebuah ide yang terkonstruksi secara sosial yang digunakan dalam proses *nation building*," kata antropolog Norwegia, Marianne Gullestad (2001). Sejarahwan, Anders Bjornson (1990), berpendapat bahwa kelas pekerja bersifat heterogen dan secara sosial terfragmentasi dari segi geografi, budaya, keahlian, dan lain-

lain, serta bahwa solidaritas dan kesatuan merupakan produk dari perjuangan dan kerja pengorganisasian gerakan buruh sendiri. Sejarawan lainnya, Peter Baldwin (1990) – berpendapat bahwa perhatian terhadap petani dan partai merupakan hal yang pokok dalam politik dan kepentingan-kepentingannya bersifat krusial dalam pembangunan karakter universal negara kesejahteraan Skandinavia (Halvorsen and Stjerno, 2008: 50).

Di Norwegia, posisi petani (*peasant*), kemudian pekerja (*worker*) relatif kuat, dan kelas atas posisinya tidak begitu kuat – hal ini telah menciptakan sebuah bentuk keseimbangan; kelas-kelas popular tidak secara penuh tersubyekkan. Dan, pada akhirnya – kondisi-kondisi damai ini telah menyuburkan kondisi-kondisi damai berikutnya yang menciptakan sebuah budaya politik (Kjeldstadli, 2007: 60). Mobilisasi kelas pekerja selama bertahun-tahun sesudah pengenalan hak pilih (*manhood suffrage*) menghasilkan konflik jenis baru (*new lines of conflict*) dalam sistem tersebut, tetapi tidak terdapat polarisasi sepanjang dimensi sosial tertentu: poros pusat-pinggiran (*center-periphery*) lama memotong poros kelas-atas (*upper-class*) baru dan menghasilkan sebuah sebuah sistem aliansi yang semakin kompleks. Isu-isu lama dalam kebijakan kebudayaan secara berbeda terbukti lebih divisif ketimbang isu-isu baru dalam konflik kelas yang ada selama ini hingga 1918 (Rokkan, 1966: 78-79).

Industrialisasi dan urbanisasi sangat menentukan baik dari segi transformasi struktur kelas maupun konstelasi politik. Esping Andersen, berpendapat bahwa naiknya kategori-kategori strata menengah baru, telah membentuk salah satu dari perubahan yang paling serius dalam struktur kelas masyarakat-masyarakat yang maju (Andersen, 1988: 29). Rokkan menyiratkan dalam pendapatnya bahwa, perolehan luar biasa yang dicapai oleh kaum Sosdem sejak 1910 sebagian hanya bisa dipahami melalui perubahan-perubahan yang dibawa dalam komposisi pemilih (*electorate*) selama proses industrialisasi dan urbanisasi; sekitar dua per tiga dari perolehan tersebut harus dikaitkan dengan mobilisasi pada masing-masing stratum yang meningkat, tidak hanya pada kelas pekerja industri tetapi juga pada kaum proletar perdesaan serta kelas menengah perkotaan (Rokkan, 1967:427).

Di Skandinavia, dua gelombang mobilisasi datang dengan jarak yang berdekatan satu sama lain dan sejumlah isu tidak datang dengan potensi ke arah penyelesaian (*settlement*) sebelum bagian berikutnya memaksa dirinya sendiri berada pada politik yang terorganisir (*body politic*). Hasilnya, berupa sebuah sistem konstelasi kepartaian yang sangat berbeda: terdapat tendensi yang sama menuju polarisasi kelas sebagaimana yang terjadi di Inggris, tetapi ia tidaklah datang melalui kekuatan yang sama di seluruh kawasan dan kutub konflik kelas, tidak sama antara di perdesaan (*rural*) dengan area-area perkotaan (*urban*) (Rokkan, 1966: 79).

Namun, Gosta Esping Andersen, dalam hal ini secara responsif meneorisasi fakta bahwa terjadi transformasi struktur kelas di Skandinavia

seperti saya paparkan di atas. Dia berpendapat, "Jarak ideologis secara tidak meragukan mendorong percepatan runtuhnya teori kelas. Tetapi mungkin untuk ketidakcocokan (*incompatibility*) yang tampak dengan realitas sosial modern yang sebagian besar bersifat partisan mengenai kematiannya yang tak terlihat (*silent death*). Gagasan masyarakat yang ditentukan oleh kelas (*class-ridden*) mungkin, saat ini, terlihat berakhir (mati). Tetapi ia memiliki relevansi pada saat-saat sebelumnya. Pada 1950-an, tesis berakhirnya ideologi berpendapat bahwa perjuangan kelas telah terhentikan oleh kemakmuran kelas pekerja, ia hanyalah diikuti oleh label militansi dan konflik yang ekstrim pada 1960-an. Kemudian memunculkan permasalahan menyangkut para pegawai (*salariat*) baru, kelas menengah yang pernah ada sebelumnya, dan para elit professional. Dan sekarang, batu loncatan lama dari teori kelas, kelas pekerja industri, sedang berada dalam keruntuhan drastis. Erosi struktur kelas tradisional kita (Skandinavia) menyangkut pertanyaan apakah banyak ilmuan yang hadir terkait dengan kemunculan masyarakat postindustrial (Andersen, 1993: 7).

> ***Kelas pekerja yang terorganisir (organized working class) muncul sebagai aktor kunci dalam pembangunan demokrasi penuh***

C. Divisi dan Dinamika Kelas Sosial Skandinavia

Sebagaimana disebutkan di atas, baik Rokkan (1967) maupun Knutsen (1998) menggarisbawahi kelas sosial sebagai belahan (*cleavage*) utama di dalam politik Skandinavia. Kelas sosial dan ekonomi adalah *cleavage* yang paling dominan dan memainkan perannya dalam proses demokratik di Skandinavia serta secara umum dalam demokrasi Negara-negara Eropa Barat. Oddbjorn Knutsen menuliskan bahwa *cleavage* politik yang paling penting adalah kelas sosial, atau pembagian pekerjaan-pekerjaan lainnya pada sebuah dimensi hirarkis. Posisi-posisi dalam pasar kerja (*labour market*) – atau, lebih istimewanya, struktur hirarkis dari berbagai posisi – biasanya dilihat sebagai *cleavage* politik utama (Knutsen, 1998: 1).

Kelas sosial-ekonomi yang terpenting di dalam proses demokratik di Skandinavia adalah kelas pekerja dan para pesaingnya: para elit. Tetapi di posisi tengah dan juga paling memainkan peran penting adalah kelas menengah, dan faktanya, negara kesejahteraan merupakan rumah bagi semua kelas serta kaum Sosdem berada pada posisi mengupayakan kesejahteraan bagi semua kelas. Bernt Hagtvet dan Erik Rudeng, mengatakan, "Posisi kaum kiri adalah pada pemahaman bahwa negara kesejahteraan merupakan alat untuk mengintegrasikan kelas pekerja di dalam masyarakakat yang sebagian besar terdiri dari masyarakat borjuis, dan keuntungan-keuntungannya (*benefit*) meluas terutama kepada kelas

menengah" (Hagtvet dan Rudeng, 1984: 240).

1. Kelas Rendah (*Lower*) dan Pekerja

Dalam hal hubungan antara kelas dan demokratisasi, sejumlah ilmuwan meyakini tentang kelas pekerja sebagai aktor prinsipil dalam demokratisasi. Mereka melihat bahwa "kekuatan prodemokratik yang paling konsisten" adalah kelas pekerja, ia "mendorong maju" dan "bertarung untuk" demokrasi melawan resistensi dari aktor-aktor kelas yang lain, seringkali ia memainkan "sebuah peran prodemokratik secara desisif" (Collier, 1999: 10-11). Kelas pekerja yang terorganisir (*organized working class*) muncul sebagai aktor kunci dalam pembangunan demokrasi penuh, fenomena ini hampir terjadi di mana-mana, dan pada banyak peristiwa para pekerja yang terorganisir (*organized workers*) juga memainkan sebuah peran penting dalam pembangunan demokrasi terbatas (Collier, 1999: 11).

Collier telah mengklarifikasi bahwa, melalui sedikit generalisasi yang agak kasar, kita bisa mengatakan bahwa di Eropa, kelas pekerja seringkali memerlukan kelas menengah sebagai teman (*allies*) agar sukses dalam mendorong demokrasi (Collier, 1999: 12). Dia menunjukkan fakta mengenai demokrasi di Norwegia sebagai berikut, "Pendirian rejim demokratik di Norwegia terjadi pada periode dari tahun 1814 hingga 1898. Reformasi-reformasi utama yang membentuk proses demokratisasi tersebut bisa dipahami dalam *term* dinamika kompetisi partai dan mobilisasi elektoral, dengan kelas pekerja muncul pada permukaan di tahap akhir demokratisasi" (Collier, 1999: 66). Sederhananya, kelas pekerja adalah aktor terpenting tetapi pengaruhnya akan signifikan jika ia diorganisir, lebih dari itu, kekuatan dari kelas bawah (*lower classes*) dikondisikan melalui emansipasi dan hak pilih (*suffrage*). Walaupun kelas pekerja tersebut kuat dan terorganisir, melakukan koalisi dengan kelas lain dalam perjuangan kelas, secara mutlak diperlukan.

> ***sejumlah ilmuwan meyakini tentang kelas pekerja sebagai aktor prinsipil dalam demokratisasi***

Dalam memerhatikan pembangunan dan struktur institusi serta organisasi yang terkait dengan pasar kerja di Negara-negara Bangsa Nordik (Skandinavia), sangat berharga bagi kita untuk memahami baik keseragaman maupun perbedaan diantaranya. Walter Korpi menekankan pendapat, adalah benar bahwa sejumlah faktor – historis, geografis, dan ekonomi – berkontribusi terhadap sejumlah keseragaman. Sungguh terdapat sejumlah upaya serius menuju kerjasama di antara para pekerja di Negara-negara Bangsa Nordik (Skandinavia). Pada tahap-tahap awal, *the Scandinavian Worker's Congresses* (Kongres-Kongres Pekerja Skandinavia), didirikan pada 1886, yang memiliki beberapa signifikansi, dan sejumlah kecil

serikat telah didirikan di seluruh basis Bangsa Nordik. Kenyataannya semua serikat (*union*) telah masuk ke dalam persetujuan (*agreement*) dengan organisasi-organisasi pesaingnya di Negara-negara Nordik lainnya terkait aksi saling mendukung dalam kasus mogok (*strike*) dan *lockout.* Persetujuan-persetujuan (*agreement*) tersebut terus memiliki signifikansi hingga saat ini. Sebagian terkait pasar kerja utama bangsa Nordik (*common Nordic labor market*) yang didirikan pada 1950-an, kerjasama di antara serikat-serikat di Negara-negara Nordik menjadi lebih intensif pada periode pascaperang (Allardt et al., 1981: 308-309).

Setelah arus deras industrialisasi yang diikuti oleh transformasi kondisi kerja yang ekstrim, kelas pekerja Norwegia semakin sangat terorganisir dan secara aktif teraspirasikan, pencapaian dan perjuangan mereka menghasilkan kondisi dan pernghargaan yang lebih baik serta diperkuat secara politik oleh mereka sendiri dan Partai Buruh, mereka mendapatkan pelajaran dan pengalaman, khususnya dari kondisi-kondisi pembangunan industri dan krisis ekonomi yang dalam. Kapabilitas-kapabilitas kelas pekerja dalam me-*manage* isu-isu yang bertentangan dari pertemuan silang-belahan (*crosscutting cleavage*), antara lain teritorial dan kebudayaan, juga diperlukan.

Sementara di Swedia, kita harus mempertimbangkan dampak dari hubungan industrial Bangsa Swedia (*Swedish industrial relations*) dan kebijakan upah yang solidaristik;[1] unionisasi tidak terlalu tinggi (jumlahnya sekitar 85 persen), tetapi masing-masing serikat juga spesifik didasarkan pada kelas (*quite class-specific*). Pada tingkat nasional, terdapat tiga federasi yang dominan: LO, para pekerja kerah biru yang mengorganisir diri (*organizing blue-collar workers*) (kelas III dan IV), TCO, dan sejumlah kecil bagian dari kelas I, serta SACO, yang mewakili para buruh bergaji/formal (*salaried employees*) dengan gelar akademik (mayoritas dari kelas I). Sekurang-kurangnya hingga awal 1980-an, distribusi dari penghargaan kerja (*job rewards*) seringkali ditentukan melalui negosiasi-negosiasi yang tersentralisasi antara federasi-federasi pekerja dan tiga serikat nasional (*national unions*) (Andersen, 1993: 105).

Menurut Halvorsen dan Stjerno, arus industrialisasi yang deras telah menciptakan kelas pekerja yang lebih luas dan lebih militan. Para pekerja yang terorganisir menuntut kondisi hidup yang lebih baik dan reformasi-reformasi sosial. Dukungan elektoral terhadap Partai Buruh yang meningkat tumbuh dengan cepat pada dekade pertama abad ke-20. Pergerakan serikat dagang (*trade union movement*/LO) bekerja sukses dengan Partai Buruh yang mengorganisir dan memobilisasi kelas pekerja tersebut, dan sejumlah aksi mogok dilakukan untuk meningkatkan upah yang diikuti oleh perbaikan

---

[1] Berdasarkan hal ini, Gosta Esping Andersen berkesimpulan bahwa sistem negosiasi telah dibangun di sekitar struktur kelas, ketimbang belahan-belahan sektoral (*sectoral cleavages*).

kondisi kerja. Sebuah Partai Komunis didirikan pada 1923, tetapi ia tidak pernah menjadi ancaman substansial bagi Partai Buruh dalam persaingan memperebutkan suara kelas pekerja (Halvorsen and Stjerno, 2008: 13). Kapitalisme industrial juga menghasilkan sebuah gerakan buruh yang kuat pada akhir dekade abad ke-19. Untuk sementara, ia bersifat radikal-revolusioner. Mayoritas dari Partai Buruh Norwegia memilih untuk bergabung dengan Komunisme Internasional selama beberapa tahun sebelum 1920-an. Krisis ekonomi yang panjang, pengangguran dan hutang, selama antara masa perang telah mengubah hal ini, sejak awal 1930-an mereka mendukung program reformis Keynesian dalam upaya menggerakan roda ekonomi yang ada (Kjeldstadli, 2007: 11).

Rokkan berpendapat, tidak hanya di daerah pinggiran (*periphery*) yang terisolasi tetapi bahkan di area-area urbanisasi dan industrialisasi awal: oposisi teritorial terhadap pengaruh-pengaruh dari kota-kota lebih kuat ketimbang antara kaum pemilih lama (*the old established electorate*) dan para pemilih baru dari kelas rendah (*the lower-class entrants)*, serta Partai Buruh merasa sangat sulit untuk memeroleh dukungan dari luar sejumlah kecil kelompok inti dari para pekerja industri yang berserikat (*unionized industrial workers*) (Rokkan and Valen, 1964, Rokkan, 1966: 80).

Sebelum terjadinya kesetaraan hubungan jender (*gender relations*), terdapat kesenjangan jender yang signifikan dan kesadaran kelas yang rendah dari kaum perempuan serta juga posisi tawar perempuan yang rendah di Skandinavia. Kesadaran kelas dan posisi tawar perempuan yang kuat, secara positif memengaruhi struktur kelas pekerja, kelas pekerja mendapatkan keuntungan dan kekuatan dari partisipasi perempuan yang besar dalam *trade union* dan pergerakan buruh sosdem, akibat partisipasi perempuan yang besar dalam pekerjaan.

Oddbjorn Knutsen menuliskan hasil pengamatannya, selama dua dekade, bagaimanapun, para perempuan di sebagian besar Negara-negara Barat telah berubah dari yang semula bersifat konservatif ketimbang laki-laki menjadi lebih radikal. Istilah “ketimpangan jender” telah digunakan untuk melihat karakter dari perbedaan-perbedaan nilai berbasis jender dan perbedaan-perbedaan dalam pola-pola pemberian suara antara para perempuan dan laki-laki di sebagian besar demokrasi Barat, termasuk di Negara-negara Skandinavia. Nilai-nilai tradisional yang dimiliki perempuan menekankan orientasi-orientasi *private* yang terkait dengan tanggung jawab-tanggung jawab agama dan keluarga, yang dikenal sebagai basis bagi perbedaan-perbedaan tersebut. Lebih dari itu, perempuan kurang terintegrasi di dalam *trade union* dan struktur kelas pekerja, serta dengan demikian bersifat kurang solidaristik dan juga kurang terorientasi secara kolektif dibanding laki-laki (Knutsen, 1998: 5).

Sementara Rokkan menyuguhkan data yang menunjukkan hasil elektoral yang kurang berbeda sebagai berikut, “Banyak perempuan dari kelas pekerja yang telah berpindah ke posisi-posisi *private* yang

berpenghasilan (*private salaried*) cenderung mengalami ketidakpastian mengenai politik mereka dan gamang untuk memilih di antara dua posisi yang berlawanan (Rokkan, 1967: 434).

2. Kelas Menengah (*Middle Class*)

Dalam konsepsi kelas, kelas menengah merupakan bagian dari strata elit dan seringkali dianggap sebagai lawan dari kelas pekerja, tapi pada bagian tengah dan tipe-tipe moderat (*moderate manners*), bagaimana pun, terdapat konteks sosial dan ekonomi tertentu di balik kemunculan dan pertumbuhannya. Collier berpendapat, strata elit bisa terdiri dari kelas-kelas yang memiliki tanah atau "kelas-kelas menengah" atau "sektor-sektor menengah" – suatu kategori heterogen dari sebagian besar sektor urban (mencakup borjuasi, borjuasi-kecil profesional, manajerial, dan kelompok-kelompok kerah putih), mereka dihasilkan oleh sebaran industrialisasi, komersialisasi, dan pertumbuhan kapitalis (Collier, 1999: 17).

Dalam hal hubungan antara status sosial dan orientasi politik yang diharapkan, Knutsen, berpendapat bahwa ekspektasi umum dalam hubungan dengan ideologi-ideologi politik adalah bahwa anggota-anggota dari kelas menengah dan yang memiliki pekerjaan (*occupations*) dalam status sosial tinggi akan memberikan suara kepada partai-partai nonsosialis, sementara kelas pekerja dan pihak yang berada pada posisi-posisi status sosial rendah akan memiliki orientasi-orientasi yang lebih radikal dan akan memberikan suara kepada partai-partai sosial (Knutsen, 1998: 2).

Rokkan secara teoretis menganalisis polarisasi politik antara kelas-kelas sosial di Norwegia, dan dia menyimpulkan bahwa, "Di Norwegia, pertarungan yang krusial untuk menguasai parlemen, akan semakin berbentuk perebutan suara-suara kelas menengah dari kalangan para pekerja yang bergaji (*salaried employees*), kalangan teknisi, dan personil administratif. Stratum luas ini di antara kelas pekerja industrial dan kelas menengah lama memunyai posisi yang stabil dalam hitungan bobotnya sejak awal abad ini dan menjadi sepertiga dari penduduk dari bangsa ini (Norwegia). Tidak ada satu pun partai yang mampu menancapkan klaim eksklusif terhadap stratum ini" (Rokkan, 1966: 94-95).

Teori-teori lain menekankan orientasi yang lebih radikal mengenai kelas menengah baru (*new middle class*) tersebut. Yang paling banyak di antaranya Politik Baru (*New Politics*), memiliki para pendukung yang berpendapat bahwa segmen-segmen dari kelas menengah baru akan memiliki nilai-nilai postmaterialis baru dan akibatnya memberikan suara kepada *green* (aliran politik hijau) atau partai-partai kiri-libertarian. Sesuai dengan polarisasi kelompok tersebut terdapat hipotesis-hipotesis di dalam teori Politik Baru (*new Politics theory*), munculnya poros baru dari polarisasi kelompok, erat terkait dengan munculnya dimensi materialis/postmaterialis sebagai sebuah belahan kepartaian (*party cleavage*). Kelompok-kelompok

sosial itu cenderung untuk memberikan nilai-nilai postmaterialis (Inglehart 1984: 32-33; 1997: 248-252; Knutsen, 1998: 3).

Rueschemeyer membuat sebuah perbandingan yang memadai antara Eropa dan Amerika Latin, dia berpendapat bahwa di Amerika Latin, ”Dibandingkan dengan Eropa, kelas pekerja urbannya kurang memainkan peran yang mengemuka sebagai kekuatan prodemokratik. Kekuatan yang menggerakkan di balik pembentukan awal demokrasi [di Amerika Latin], kemudian, yaitu kelas menengah. Melalui sebuah generalisasi yang kasar kita dapat mengatakan bahwa di Eropa kelas pekerjanya seringkali memerlukan kelas-kelas menengah sebagai mitra (*allies*) untuk berhasil dalam mendorong demokrasi, sementara di Amerika Latin terdapat beberapa cara lain (Rueschemeyer et al. in Collier, 1999: 11). Dengan demikian, adalah jelas bahwa strata menengah akan memainkan peran penting ketika borjuasi kecil menghilang dan kelas pekerja tradisional mengalami stagnan. Demokrasi sosial tidak bisa menghindari tugas dalam membangun koalisi-koalisi yang menyatukan konstituensi intinya yang lama, yaitu strata kerah putih (*white-collar strata*) (Andersen, 1988: 30).

Kepentingan yang positif dan instan dikembangkan dalam reformasi kebijakan sosial oleh kelas-kelas menengah, perbedaan dengan yang terjadi di Inggris telah terkonfirmasi dengan jelas dalam pengalaman di Skandinavia. Sejak 1930-an, Swedia telah merasakan aura tersebut, di kalangan-kalangan tertentu, dari tipe ideal masyarakat moderen, hal ini suatu petanda dari evolusi sosial (Baldwin, 1990: 134).

Di Norwegia, Partai Buruh bisa mengantisipasi pertumbuhan kelas menengah baru, dan dengan sukses menciptakan basis politik melaluinya. Ketika sebuah kelas menengah baru terbentuk – sebagian sebagai hasil dari ekspansi negara kesejahteraan tersebut – pada 1960-an, Partai buruh mampu bersaing dengan Venstre (Partai Liberal) dan Hoyre (Partai Konservatif) untuk memperoleh suara mereka. Persaingan ini menghasilkan konsensus politik yang lebih luas, juga dalam area kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) (Halvorsen and Stjerno, 2008: 19).

Kemudian, apakah hubungan antara dampak negara kesejahteraan dan pertumbuhan kelas menengah dalam hal stratifikasi sosial di Norwegia (dan Swedia)? Pada level agregat, efek keseluruhan pada stratifikasi sosial tampaknya menjadi sebuah kombinasi yang kompleks: negara kesejahteraan mengurangi kekuatan numerik dari proletariat, fordist dan post-industrial, melalui pemberhentian diri dini dari pekerjaan (*early retirement*). Ia mendorong pertumbuhan kelas menengah melalui meningkatnya kalangan professional, semi-profesional dan pekerjaan-pekerjaan jasa padat karya (*skilled service jobs*), yang dengan demikian menurunkan nilai penting relatif dari proletariat manual. Hasil lengkapnya adalah kecenderungan tatanan

stratifikasional menuju kelas menengah[2] (Kolberg and Kolstad dalam Andersen, 1993: 58-59, 76).

Pemberian hak-hak tertentu (*enfranchisement*) kepada kelas bawah telah mengakibatkan sebuah perubahan dramatis yang besar dalam politik Norwegia. Kota-kota dan pusat-pusat industri merupakan yang pertama kali terpolarisasi antara strata menengah dan strata bawah, tetapi pergeseran tersebut secara gradual menyebar ke komunitas-komunitas rural tradisional dan ke daerah pinggiran-pinggiran pantai (Rokkan, 1966: 81).

Sederhananya, kelas pekerja yang terorganisir secara politik dan secara strategis telah membuat koalisi kelas dengan kelas menengah dalam perjuangan kelas (*class struggle*), dan sebagaimana kelas pekerja, kelas menengah perlu diorganisir juga, terdapat pertarungan yang ketat antara partai-partai politik. Di Norwegia, sebagaimana yang disampaikan Rokkan, kelas menengah baru muncul sebagai sebuah kekuatan politik sesudah partai-partai mengorganisir mereka dengan diposisikan berada pada kelompok-kelompok inti dari pendukung-pendukungnya serta juga terpecah (*split*), baik dalam hal asal-usul sosio-ekonominya maupun loyalitas politiknya, untuk menghasilkan inti yang berbeda (*distinctive nucleus*) dalam aksi elektoral. Sebuah dasar menengah yang meluas (*expanding middle ground*) masih terbuka di dalam sistem tersebut dan telah memberikan kesempatan-kesempatan yang amat besar untuk kampanye massa (*mass electioneering*). Stratum yang baru itu menjadi target utama dari propaganda partai, dan upaya-upaya untuk menunjukkan suara-suara tambahan yang langka, mengakibatkan konvergensi dalam garis kebijakan dan penghalusan dalam oposisi-oposisi ideologis. Kelas menengah yang baru, membagi suaranya di antara garis politik Buruh, Liberal, Kristen, dan Konservatif tetapi pada saat bersamaan mereka menghasilkan suatu pengaruh yang menyatukan pada sistem tersebut (Rokkan, 1966: 95).

3. Kelas Atas (*Upper Class*)

Sebagaimana kelas menengah, kelompok-kelompok kelas atas merupakan bagian dari strata elit dan berada pada posisi yang paling sering berlawanan dengan kelas bawah. Dalam hal hubungan antara kelompok-kelompok itu dengan demokratisasi, Collier berpendapat bahwa, di antara

[2] Jon Eivind Kolberg dan Arne Kolstan dalam membahas "Tatanan stratifikasional Post-Industrial: Pengalaman Norwegia", menyebutkan tiga poin lain dari keempat poin mengenai dampak negara kesejahteraan pada stratifikasi sosial: Pertama, kategori-kategori stratifikasi yang rasional (*make sense*) dalam hal tingkat standar indikator-indikator kehidupan (otoritas, penghasilan-penghasilan, tunjangan-tunjangan, risiko-risiko kesehatan, otonomi pekerjaan, jam kerja, capaian pendidikan), biasanya diasumsikan berkorelasi dengan posisi sosial. Kedua, fluiditas jalan individu (*individual trajectories*) merupakan hal yang substansial. Ketiga, kesempatan-kesempatan mobilitas ke atas (*upward mobility*) bagi para pekerja jasa tanpa keahlian\(*unskilled service workers*) bergantung pada tipe industri-industri jasa di mana seseorang bekerja.

kasus-kasus dalam sejarah, dua dari pola-pola demokratisasi yang ada dibentuk oleh tujuan-tujuan dan strategi-strategi dari strata elit, yaitu, menengah dan kelompok-kelompok kelas atas (Collier, 1999: 33). Pada pemaparan lainnya, Rosemary Crompton mengidentifikasi kelas atas (*upper class*) sebagai kelompok yang relatif kecil namun dominan, yang mencakup para pemilik kekayaan terbesar dan para pemegang kendali industrialisme kapitalis. Lebih lanjut, dia berpendapat, sebuah elemen utama kontinuitas, bagaimanapun, berada pada konsentrasi utama dari kuasa ekonomi, organisasional, dan politik di dalam suatu kelas 'atas (*upper*)' yang hanya meliputi sekelompok kecil minoritas dari populasi (Crompton, 1993: 191-192).

Di Denmark, demokrasi terutama telah didorong oleh koalisi borjuasi-perdesaan (*bourgeois-rural*) yang meminta digantinya monarki absolut dengan bentuk pemerintahan konstitusional (Collier, 1999: 36). Sementara di Norwegia, dekade pertama abad ke-20 ditandai dengan sebuah transformasi besar dalam masyarakat Norwegia. Tidak seperti Swedia, misalnya, Norwegia tidak memiliki kelas atas industrial dan finansial (*industrial and financial upper class*) yang kuat, akibatnya para investor asing memainkan peranan yang lebih signifikan dalam pembangunan industri berskala besar (Stratch, 2001 in Halvorsen and Stejerno, 2008: 13).

Fakta mengenai sejarah kapitalisme di Norwegia, diperjelas oleh Knut Kjeldstadli, dia mengatakan, "Kapitalisme merkantilis pada abad ke- 17, 18, dan 19 ini telah dijalankan oleh borjuasi yang meningkat. Walaupun para petani (*peasants*) juga mencoba mengekspor kayu (*lumber and planks*), mereka tidak pernah memiliki modal dan jaringan (koneksi) pasar untuk dapat bersaing dalam waktu yang panjang. Borjuasi ini direkrut dari luar negeri – orang Denmark dan Jerman sebelah utara, dari dalam negara bagian para konglomerat, Orang Jerman dari kota-kota Hansa di sekitar Baltik serta orang Belanda dan Skotlandia. Perlahan-lahan mereka ternaturalisasi (menjadi warganegara Norwegia), kelompok yang semula merupakan para pendatang kemudian telah menjadi borjuasi Norwegia (Kjeldstadli, 2007: 9).

Negara-negara Kesejahteraan Bangsa Nordik (Skandinavia) datang, dengan hasil yang baik, layak dipromosikan untuk menjadi contoh dalam upaya kebijakan sosial (social policy endeavor).

D. Pendekatan Lintas Belahan (Cross-Cleavages Approach): Strategi, Dilemma dan Tantangan

Dari review di atas, terlihat bahwa kesuksesan relatif kaum Sosdem di Skandinavia dipengaruhi dan dihasilkan melalui sejumlah strategi, khususnya

melalui pengorganisasian kelas pekerja dan membuat koalisi dengan kelas lainnya, strategi ini telah relatif sukses dalam menurunkan konflik-konflik belahan (*cleavage*) lainnya dan menyatukan seluruh belahan (*cleavage*) ke dalam perjuangan kelas untuk pembangunan negara kesejahteraan (*welfare state building*), institusionalisasi solidaritas sosial termasuk di dalam strategi-strategi tersebut. Tentu, sejumlah faktor dan konteks banyak masuk di dalamnya, kita dapat mengatakan bahwa strategi-strategi tersebut saja tidak cukup tapi ia sangat menentukan.

Partai Sosial Demokratik dan basis-basis politiknya dari kelas pekerja yang terorganisir telah memainkan peran prinsipil dalam mengambil keuntungan dari keunggulan elektoral (*electoral advantage*). Sebagaimana Stein Rokkan menuliskannya dalam kasus Norwegia, sebagai berikut, “Pergerakan ke dalam kelas pekerja tampaknya mengakibatkan pergeseran generasi terbesar dalam kesetiaan politik (*political allegiance*). Ini hanyalah gambaran lain dari perubahan dasar menuju peningkatan keseragaman dukungan partai dalam stratum ini. Pergerakan ke dalam kelas menengah menghasilkan hasil yang lebih beragam: secara mengejutkan sejumlah pergeseran keluar dari sosialisme dan secara ganjil banyak pergeseran menuju sosialisme, paling tidak di antara yang berasal dari kelas pekerja. Sosialis yang menjadi anggota serikat buruh reguler (*regular labor union*), dan kurang memiliki kecenderungan untuk memberikan suara kepada sosialis jika ia merupakan anggota dari serikat kelas menengah yang berlawanan (*dissident middle-class union*) atau tidak diorganisir sama sekali” (Rokkan, 67: 433).

Sementara, Bernt Hagtvet dan Erik Rudeng berkesimpulan bahwa model negara kesejahteraan Skandinavia bisa dianggap sebagai sebuah upaya untuk memodifikasi, bahkan menghapuskan mekanisme pasar ketika berhubungan dengan kategori-kategori rakyat dan kebutuhan tertentu. Ini bisa dianggap sebagai hasil dari mobilisasi politik kelas pekerja – humanisasi atau “penjinakan” kapitalisme oleh korban utamanya – atau juga sebagai proteksi terhadap bahaya inheren dalam sistem pasar yang mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market system*) (Hagtvet and Rudeng, 1984: 236).

Tradisi panjang berkuasanya kekuatan Kiri di Skandinavia telah menyuburkan tendensi untuk berasosiasi bahkan berbagai reformasi terwariskan ke generasi lainnya dengan kalangan Sosdem yang mengikutinya. Negara-negara Kesejahteraan Bangsa Nordik (Skandinavia) datang, dengan hasil yang baik, layak dipromosikan untuk menjadi contoh dalam upaya kebijakan sosial (*social policy endeavor*). Lebih penting bagi interpretasi sosial, ia dianggap sebagai antitesis dari pendekatan Bismarckian[3] (Baldwin, 1990: 59).

Institusionalisasi solidaritas sosial sangat berarti dalam pendekatan-

---

[3] Kebijakan asuransi sosial Bismarck secara umum dianggap reaksioner, Bonapartist dan tidak solidaristik.

pendekatan lintas-belahan sosial (*cross-cleavages approaches*) dalam demokrasi sosial, Collier menyiratkan dalam pendapatnya berikut ini, "Apa yang berbahaya bukanlah partisipasi melalui kalangan pekerja individual yang terpecah-pecah, tetapi lebih pada tindakan di mana sejumlah rasa solidaritas atau identitas bisa berbentuk suatu konstruksi umum mengenai makna dalam tindakan partisipatoris (*participatory act*), sebagaimana pada pemahaman mengenai demokratisasi sebagai isu pekerja, keuntungan bagi para pekerja, dan sebagai sebuah kolektivitas. Biasanya (tetapi tidak selalu) ia diekspresikan secara organisasional (Collier, 1999: 15).

Dalam perjuangan institusionalisasi solidaritas sosial, pendekatan lintas belahan (*cross-cleavages approach*) seringkali digunakan dalam menghadapi titik silang (*cross-cutting*) antar-*cleavages*. Menurut Mikko Kauto et al., beberapa telah berpendapat bahwa peranan istimewa dari kelas dan belahan yang terkait dengan kelas (*class-related cleavages*) dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan kesejahteraan dilengkapi bahkan digantikan oleh belahan struktural (*structural cleavage*) lain dalam kapitalisme kontemporer. Yang pertama dan terjelas adalah jender. Dasar dari argumen ini, pertama, faktanya bahwa para perempuan lebih bergantung pada negara kesejahteraan, baik sebagai pekerja, anggota keluarga yang terbebas dari pekerjaan mengasuh yang berat dan tak digaji serta sebagai penerima keuntungan/tunjangan dari negara. Kedua, pengalaman-pengalaman khusus perempuan dapat membuat perempuan lebih cenderung menggunakan 'rasionalitas dalam mengasuh (*rationality of caring*), di mana perhatian, pertimbangan dan dedikasi lebih diutamakan (Kautto et al., 1999: 251).

Dalam hal belahan-belahan (*cleavages*) politik, Kautto et al. menggarisbawahi pembagian antara kiri politik (*political left*) dan kanan politik (*political right*), di mana kiri politik dan kanan politik di antaranya tampak kuat di Swedia, dan cukup kecil di Norwegia. Denmark menunjukkan pola yang sama dengan yang terjadi di Swedia, serta Findlandia berada di antara Denmark dan Norwegia. Kemudian, pola yang ada di Norwegia kurang lebih bersifat 'konsensual' ketimbang yang dimiliki oleh Swedia dan Denmark (Kautto et al., 1999: 254). Dalam konteks dan kepentingan politik elektoral dan mobilisasi massa, belahan politik (*political cleavage*) tersebut bergandengan tangan atau saling-bergantung dengan titik-silang antarbelahan (*crosscutting cleavages*), karena semua pihak menggunakan pendekatan lintas-belahan (*cross-cleavages approach*).

E. Penutup

Melalui tulisan ini, saya telah secara komparatif dan secara khusus menekankan pembahasan mengenai perjuangan kelas pekerja dan kaum Sosdem di Skandinavia. Kaum Sosdem memainkan peran yang amat penting dalam mengorganisir kelas pekerja. Sebagaimana terlihat pada perjalanan sejarah demokrasi di Skandinavia, kelas pekerja sebagai potensi bagi

demokrasi muncul secara signifikan ketika ia diorganisir dan diberikan hak tertentu. Lebih lanjut, kelas tersebut menemui konteks-konteks tipikal dalam perkembangan kapitalisme serta *cleavage* tradisional di Skandinavia. Penting untuk menekankan bahwa kelas pekerja dan kaum Sosdem ini tidaklah mudah dalam me-*manage* konteks dan titik silang-belahan (*cross-cutting cleavages*) tersebut, namun, kesuksesan relatif mereka sebelumnya dicapai melalui perjuangan politik yang panjang.

Pendekatan-pendekatan lintas-belahan (*cross-cleavages approaches*) secara jelas merupakan yang paling sering digunakan dalam perjuangan mereka, antara lain melalui koalisi dengan kelas lainnya, kelompok-kelompok teritorial, dan budaya, jender, serta bahkan kelompok-kelompok relijius. Bagaimanapun, konteks tersebut tidaklah bersifat *fix*, karenanya perkembangan dan dinamika belakangan ini tentu memerlukan modifikasi dan adaptasi yang diperlukan dalam pendekatan-pendekatan tersebut. Dalam isu-isu kontemporer, globalisasi yang diikuti oleh transnasionalisme, misalnya, diikuti oleh imigrasi massal, membuat pendekatan-pendekatan tersebut harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana Negara-negara Skandinavia menemukan kembali (*reinvention*) nasionalisme mereka serta akankah pendekatan lintas-belahan (*cross-cleavages approach*) relevan bagi integrasi. Saya menyadari bahwa segala sesuatu tidak secara mutlak ditentukan oleh faktor yang tunggal atau sejumlah kecil faktor saja, bagaimanapun, dari eksplorasi di atas, saya dengan mudah berkesimpulan bahwa pendekatan lintas-belahan tersebut merupakan yang paling relevan bagi masa depan Skandinavia.

Daftar Referensi

Allardt Erik, et al. 1981. Nordic Democracy: Ideas, Issues, and Institutions in Politics, Economy, Education, Social, and Cultural Affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Copenhagen: Det Danske Selskab.

Andersen, Gosta Esping. 1988. Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.

Andersen, Gosta Esping. 1993. Changing Classes: Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies. London: Sage Publications.

Baldwin, Peter. 1990. The Politics of Social Solidarity: Class Bases of The European Welfare State 1875-1975. Cambridge: Cambridge University Press.

Collier, Ruth Berins. 1999. Path Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America. New York: Cambridge University Press.

Crompton, Rosemary. 1993. Class and Stratification: An introduction to Current Debates. Cambridge: Polity Press.

Hagtvet, Bernt and Rudeng, Erik. 1984. Scandinavia: Achievements, Dilemmas, Challenges”, in Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Nordic Voices. American Academy of Arts and Sciences.

Halvorsen, Knut and Stjerno, Steinar. 2008. From Poverty to A Welfare State, in Work, Oil and Welfare: The Welfare State in Norway. Universitetsforlaget.

Kautto, Mikko et al. 1999. Nordic Social Policy: Changing Welfare States. New York: Routledge.

Kjeldstadli, Knut. 2007. Norwegian History, in Conference of European Association for International Education in Trondheim, September 12-15 2007.

Knutsen, Oddbjorn. 1998. Social Class, Sector Employment and Gender as Political Cleavages in Scandinavian Countries: A Comparative Longitudinal Study 1970-95. Oslo: Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Rokkan, Stein. 1966. Norway: Numerical Democracy and Corporate Pluralism, in Dahl,

Robert A. Political Oppositions in Western Democracies. Yale: Yale University Press.

Rokkan, Stein. 1967. Geography, Religion, and Social Class: Crosscutting Cleavages in Norwegian Politics, in Lipset, S.M. and Rokkan, S. Party System and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. The Free Press.

Pentingnya Membangun Terbitan Berkala Serikat Buruh

Abu Mufakhir [1]

Abstract

This article discusses the issue of trade union presence in Indonesia since the Reformation era crash. Reform is marked by two things: the birth of press freedom and freedom of association. Two things are important changes since the fall of the New Order regime which negate freedom of the press, and freedom of association. Freedom of the press is a new phase in which almost every day we are flooded with information. And, freedom of association encourages the emergence of new unions. However, of the many unions that emerged, very few are able to develop the newsletter as part of the propaganda work. At the national level there are only three periodicals which was built by labor unions, namely: Bintang Buruh (KASBI), Koran Perjuangan (FSPMI), and Suara Independen (GSBI). The existence of periodicals unions have an important function, at least as a learning tool members, the organizing tools and far more as a tool for building public opinion.

Kata kunci: serikat buruh, terbitan, propaganda, pers, informasi

Pendahuluan

Seiring dengan kebebasan pers sejak 1998, Indonesia memasuki babak baru di mana nyaris setiap hari kita dibanjiri informasi. Sebagian kecil dari informasi itu benar-benar kita butuhkan - sebagian besar lagi tidak; sebagian kecilnya lagi penting bagi perjuangan buruh yang merupakan elemen dalam masyarakat madani Indonesia - sebagian besarnya tidak penting atau bahkan menyudutkan agenda-agenda kepentingan buruh. Pada situasi tersebut keberadaan terbitan berkala serikat buruh sebagai alat dari kerja-kerja agitasi propaganda yang dilakukan sendiri oleh serikat buruh sangatlah penting. Terbitan akan mengabarkan perjuangan kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya tentang apa, bagaimana, metode, cita-cita dan dengan siapa harus bersama-sama memperjuangkan hak hidup sejahtera. Ketika itulah, secara bersamaan, terbitan berkala tersebut menjadi media belajar bersama yang menginformasikan kondisi dirinya baik kepada kawan sesama anggota maupun, kepada publik yang lebih luas.

---

[1] Tulisan ini, sebelumnya, merupakan makalah pada simposium "*New Frontier of Indonesia*-Japan *Relationship*", Universitas Indonesia, pada 15 Februari 2010. Disajikan kembali di sini untuk kepentingan pendidikan.

proses belajar di serikat kurang menyentuh kemampuan mendokumentasikan pengalaman, termasuk menulis

Semenjak 1998 pula, keran kebebasan berserikat dibuka. Hingga Juni 2007, tercatat ada 3 konfederasi (KSPSI/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSBSI/Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSPI/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), 86 federasi, dan lebih dari tiga ribu serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) tingkat pabrik.

Sejauh pengetahuan penulis, di tingkat nasional hanya ada tiga terbitan berkala yang dibangun oleh serikat buruh, yaitu "Koran Perjuangan" oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan "Bintang Buruh" oleh KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia). Keduanya relatif terbit satu bulan sekali. Dan, "Suara Independen" yang diupayakan untuk dapat terbit tiap dua bulan sekali oleh GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen). Sedang di tingkat lokal ada beberapa terbitan serikat buruh tingkat pabrik dan cabang. Mereka terbit tidak rutin dan nyaris hanya sesekali.[2] Sampai saat ini, di alam kebebasan informasi dan kebebasan berserikat, sayangnya, belum ada terbitan serikat buruh yang secara nasional mampu menyatukan tindakan dan pandangan kaum buruh.

Dalam dugaan penulis sebagian besar serikat pernah mencoba membuat terbitan, walau sekedar buletin dengan peredarannya yang sangat terbatas, dan usianya tidak pernah panjang, apalagi regularitasnya. Hal tersebut tentu saja karena berbagai persoalan. Namun yang terutama, sepanjang pengalaman penulis, terletak pada kurangnya pengalaman dan keahlian serikat buruh untuk membuat produksi gagasan secara berkala – walau sebenarnya organisasi serikat menyimpan potensi yang mumpuni.

Belum tergalinya potensi tersebut karena terhambat oleh semacam "tradisi" belajar di dalam serikat buruh, yang umumnya terbatas pada tradisi lisan. Salah satu tradisi lisan tersebut tecermin dari metode pendidikan yang hanya menggunakan model ceramah. Pemateri (atau pun penceramah) dari serikat buruh, biasanya, tidak membuat bahan tertulis. Akibatnya, peserta belajar di dalam agenda pendidikan (training/pelatihan) lebih banyak diposisikan sebagai "pendengar" belaka. Untuk hal ini, seorang aktivis perburuhan dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Bogor, Fauzi Abdullah (alm.) mengatakan bahwa metode pendidikan di serikat kerap memosisikan peserta belajar sebagai "penonton". Dengan keadaan-keadaan demikian, tentunya kita bisa bertanya: bagaimana kita bisa melampaui keterbatasan yang ada ini, sehingga peserta belajar dapat diajak bersama-sama untuk belajar menulis?

---

[2] Misalnya, buletin yang diterbitkan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (SP Farkes) Reformasi di Semarang (Wawancara dengan Khotib, Yayasan Wahyu Sosial, Semarang, 29 Januari 2010), buletin Panarub, Pimpinan Serikat Pekerja SPN (Wawancara dengan Lilis Mahmudah, Dewan Pengurus Pusat SPN, 20 Januari 2010).

Tragisnya lagi, tradisi belajar menulis merupakan hal yang hampir tidak pernah penulis temukan dalam agenda-agenda pendidikan serikat buruh. Artinya, proses belajar di serikat kurang menyentuh kemampuan mendokumentasikan pengalaman, termasuk menulis. Padahal, hal tersebut merupakan prasyarat dalam membangun terbitan berkala serikat buruh yang mandiri. Akibatnya, melumpuhkan kemampuan organisasi buruh secara finansial untuk memiliki anggaran yang cukup dan stabil dalam membiayai penerbitan. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi persoalan krusial yang mengganjal perkembangan serikat buruh yang independen.

Dalam kevakuman terbitan serikat buruh, produksi gagasan yang tertulis dan diterbitkan secara rutin akibatnya masih banyak didominasi oleh kelompok di luar serikat (umumnya oleh organisasi nonpemerintah). Dengan tetap menghargai bahwa terbitan yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah (ornop) sangat penting, terbitan berkala serikat buruh masih jauh lebih penting. Terbitan serikat adalah bagian dari kerja-kerja propaganda organisasi, sekaligus bagian yang tidak terpisah dari kerja-kerja pendidikan, pengorganisasian dan penciptaan iklim opini publik yang berpihak kepada perjuangan kaum buruh itu sendiri.

Tulisan berikut ini hendak menggali segi-segi utama dari terbitan serikat buruh yang sudah ada sejak 1998: bagaimana keberlangsungannya, apa saja hambatannya, dan sejauh mana kerja-kerja serikat tercermin dalam terbitan tersebut. Sebagaimana sudah dikemukakan, bahwa sampai sejauh ini baru tiga organisasi buruh saja yang secara relatif, memiliki terbitan secara berkala: KASBI, FSPMI dan GSBI. Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan analisis singkat terhadap terbitan dari tiga organisasi buruh itu secara bersandingan. Hendak diajukan oleh tulisan ini bahwa walau beberapa serikat buruh sudah berupaya menyusun terbitan yang menjadi salah satu kerja organisasi, hasilnya masih belum melegakan rasa haus anggota akan informasi yang mendidik dan memampukan peran serta anggota yang lebih luas di dalam organisasi. Persis di persimpangan inilah terletak “panggilan baru” bagi terbitan serikat buruh untuk secara serius memberdayakan fungsi terbitan. Terbitan sebagai sarana yang mengembangkan kemampuan anggota dan membangun aliansi-aliansi sosial demi perubahan sosial masyarakat yang lebih luas – seperti yang sudah dilakoni terbitan buruh pada masa lalu dalam memimpin pergerakan melawan kolonialisme Belanda.

Cerita Tentang Bintang Buruh, Koran Perjuangan dan Suara Independen

KASBI merupakan serikat buruh yang ketika berdiri pada 2005, langsung mendirikan terbitan. Terbitan tersebut berkembang menjadi terbitan berkala. Nama terbitan itu *Bintang Buruh*. Pada awalnya, *Bintang Buruh* dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi hasil kongres I KASBI. Kemudian sesuai dengan program perjuangan hasil kongres II di Malang

dinyatakan bahwa terbitan *Bintang Buruh* memiliki beberapa tujuan, terutama sebagai corong propaganda organisasi; menjadi bahan belajar bagi semua anggota dan bahan-bahan diskusi di basis-basis KASBI. Selain itu, terbitan *Bintang Buruh* juga dimaksudkan untuk memetakan sikap politik organisasi KASBI. Terbitan juga dimaksudkan sebagai salah satu bahan untuk konsolidasi Serikat Buruh Anggota (SBA) KASBI di berbagai wilayah.

Sampai saat ini, *Bintang Buruh* relatif terbit sekali dalam sebulan. Isinya memuat sikap organisasi sesuai dengan hasil kongres II KASBI, antara lain: perlawanan terhadap neoliberalisme, KASBI sebagai konfederasi sejati, mengenai pemerintahan yang propemodal, perlawanan terhadap PHK, *outsourcing* dan upah murah serta sikap politik terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai wujud bukan Pemilu rakyat. Rubrikasi *Bintang Buruh* dimulai dari: Salam Redaksi, Surat Pembaca, Obor, Berita Dari Kawan, Berita Aksi, Cerpen dan Budaya.

Sekretaris Jenderal KASBI periode 2008-2011, Khamid Istakhori melalui surat elektronik mengatakan kepada penulis bahwa sampai saat ini permasalahan terbesar dari upaya mengelola dan mengembangkan *Bintang Buruh* adalah menjaga regularitas terbitan. Selain itu, muncul pula persoalan pembiayaan, minimnya tulisan-tulisan dari basis (serikat buruh tingkat pabrik), serta belum meratanya penyebaran *Bintang Buruh* di kalangan anggota. Akibatnya, diskusi-diskusi muatan Bintang Buruh tidak merata.

Menurut Khamid, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberlakukan kewajiban berlangganan bagi anggota dengan harga Rp 2000 per eksemplar, kemudian mendiskusikan isi *Bintang Buruh* sebagai bahan pendidikan di basis, memobilisasi tulisan-tulisan dari basis, menampilkan berita-berita yang menarik bagi buruh tanpa meninggalkan ideologi organisasi, memperkenalkan *Bintang Buruh* di kalangan yang lebih luas, seperti petani, mahasiswa, dan lain-lain.

FSPMI yang berdiri pada 6 Februari 1999, kemudian membangun terbitan berkala yang dinamakan dengan *Koran Perjuangan*. Koran Perjuangan terbit pertama kali pada Maret 2007. Tujuan FSPMI menerbitkan *Koran Perjuangan* antara lain sebagai alat propaganda internal FSPMI dan untuk memberikan informasi yang berimbang tentang perburuhan. Dalam pandangan FSPMI, selama ini media (media korporasi) yang ada kurang berpihak pada buruh. *Koran Perjuangan* terus berusaha untuk terbit satu bulan sekali pada setiap tengah bulan. Informasi yang dimuat dalam *Koran Perjuangan* adalah mengenai perburuhan, seperti Revisi Undang-Undang (UU) Jamsostek, Pengupahan, Outsourcing, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan lain-lain. *Koran Perjuangan* diperuntukkan bagi semua Basis/Unit Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengurus Pusat FSPMI, Roni Febrianto melalui surat elektronik menyatakan bahwa permasalahan terbesar yang dialami oleh FSPMI dalam

mengelola dan mengembangkan *Koran Perjuangan* salah satunya adalah pendanaan. Masalah ini sementara dilakukan dengan subsidi khusus dari Direktorat Pendidikan DPP FSPMI.

GSBI berdiri 21 Februari 1999 membangun terbitannya yaitu *Suara Independen*, dengan waktu terbit tiap dua bulan sekali. Ismet Inoni, Pengurus Pusat GSBI dalam surat elektroniknya mengatakan kepada penulis bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah regularitas yang belum stabil dan penerbitan yang belum tepat waktu. Ada dua tujuan umum dari diterbitkannya *Suara Independen*; *pertama*, sebagai media informasi dan komunikasi, *kedua*, sebagai salah satu media pendidikan anggota dan juga kaum buruh pada umumnya.

Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, terbitan serikat buruh sesungguhnya memiliki peran utama pengorganisasian isu – yang sayangnya belum banyak dikembangkan oleh banyak organisasi buruh

Tiga Fungsi Terbitan Berkala Serikat Buruh

Dari gambaran singkat tadi, kita dapat melihat bahwa terbitan berkala serikat buruh sebagai organ agitasi-propaganda serikat dapat menyentuh langsung ke buruh anggotanya, karena sirkulasinya memang langsung. Dari hal tersebut, terbitan berkala serikat buruh jika terus-menerus dibangun setidaknya memiliki tiga fungsi pokok: *Pertama*, sebagai media pendidikan anggota, yang bisa berkembang menjadi media pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas. *Kedua*, sebagai media pengorganisasian, seperti memuat ajakan untuk aksi bersama, termasuk pengorganisasian isu. *Ketiga*, sebagai media propaganda untuk membangun iklim opini publik yang berpihak kepada perjuangan buruh dan melawan opini yang menyudutkan kaum buruh. Beragam fungsi tersebut bermuara pada perjuangan kaum buruh itu sendiri.

Terbitan berkala serikat buruh memiliki fungsi khusus yang berbeda dengan media korporasi, yang mengembangkan dirinya sebagai sebuah perusahaan. Media korporasi, seiring dengan liberalisasi dan industrialisasi media, semakin masuk ke dalam sistem pasar. Sehingga pers yang dihasilkannya cenderung ”menyuarakan” penguasa pasar. Dalam ”pertarungan” pasar, kepentingan yang tidak berduit kerap dilupakan, bahkan hanya jadi komoditas berita.

Doktrin pers sebagai penyangga demokrasi dan pemantau kekuasaan, dalam kenyataanya, semakin lemah dalam menghadapi berbagai tekanan dan campur tangan pemilik pasar. Pers modern telah berkembang menjadi badan usaha besar, tapi kerap ambigu: menyuarakan kepentingan publik atau mempertahankan oplah pengiklan. Dalam konteks demikianlah, media korporasi terlihat menjadi impoten dalam melawan,

mengadakan resistensi, atau bahkan melakukan kontrol atas gerak dominasi modal atas sendi-sendi demokrasi.

Perbedaan surat kabar milik serikat buruh dan surat kabar komersial jika dilihat dari aspek isi, setidaknya ada pada kejujuran dalam mengusung ideologi. Terbitan berkala serikat buruh secara sadar mengakui keberadaannya sebagai alat propaganda bagi kaum buruh. Ideologi yang diusungnya pun merupakan pembelaan dan perjuangan kepentingan kelas buruh, yang merupakan cerminan kelas tertindas dalam sistem kapitalisme. Sementara itu, suratkabar komersial sesuai dengan prinsip jurnalismenya, diyakini tidak boleh menjadi alat propaganda bagi siapapun. Suratkabar komersial harus terikat pada prinsip dan kaidah jurnalisme dan yang diyakini sebagai "independen." Independensi, sebagai salah satu elemen jurnalisme, menyaratkan pentingnya menjaga jarak dengan faksi-faksi politik. Di bawah supremasi pasar kapitalisme, ajimat prinsip-prinsip jurnalisme menjadi naif. Pada tataran empiris, tidak dapat dipungkiri bahwa suratkabar kerap dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu, bahkan menjadi corong propaganda penguasa dan pengusaha.

Hal-hal di atas, menjadi unsur pembeda suratkabar serikat buruh dan suratkabar komersial. Letak pembedanya ada dalam kerangka jurnalisme yang dijadikan dasar pijakan operasional kedua jenis suratkabar itu. Dalam suratkabar komersial, diyakini sebagai jurnalisme yang "obyektif" yang mampu meminimalisir pandangan-pandangan sepihak dan kebersikapan satu kelompok tertentu. Sedangkan suratkabar atau terbitan dari serikat buruh adalah terbitan yang berpihak; ia nyata-nyata berpendapat dan secara terang-terangan pula membela posisi kaum buruh. Karena, suratkabar serikat buruh adalah salah satu alat bagi kaum buruh untuk mencapai cita-cita perjuangannya.

Alat Pendidikan Anggota

Sebagai alat pendidikan, terbitan serikat buruh sudah pasti memuat pengetahuan yang dekat dengan kehidupan dan persoalan buruh, refleksi atas nilai-nilai dan praktik perjuangan, pandangan, sejarah dan tujuan dalam gerakan buruh itu sendiri. Tidak ketinggalan pula memuat pengalaman-pengalaman dalam berpraktik, seperti apa yang menjadi kelemahan, strategi apa yang dinilai berhasil dan harus dikembangkan. Sehingga terbitan itu pun sekaligus menjadi bagian yang penting dari pendokumentasian pengetahuan. Terbitan berkala mengembangkan budaya berpikir kritis dengan membangun analisis terhadap dinamika ekonomi politik dan segala kebijakan pemerintah yang kerap merugikan kaum buruh. Juga, menjadi membangun sikap kritis anggota terhadap serikat buruh itu sendiri. Tujuannya, agar ia dapat berkembang untuk menjalankan fungsi swakontrol di dalam serikat.

Alat Pengorganisasian

Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, terbitan serikat buruh sesungguhnya memiliki peran utama pengorganisasian isu – yang sayangnya belum banyak dikembangkan oleh banyak organisasi buruh.

Sebagaimana diketahui, bahwa kekuatan media korporasi sangatlah besar. Apa yang dianggap oleh media korporasi memiliki nilai penting, maka peristiwa itu akan menjadi dominan dalam pemberitaan. Dalam olahan media korporasi, suatu peristiwa yang sebenarnya tidaklah penting dapat diubah seolah-olah menjadi kebutuhan warga. Akibatnya, media massa *mainstream* tidak jarang menciptakan fantasi-fantasi yang menjauhkan pemirsanya dari realitas sosial.

Sejatinya, para petugas media massa melakukan seleksi atas isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Dalam konteks ini, pemburu berita akan menonjolkan aspek tertentu dari fakta yang terjadi. Tujuannya, agar informasi yang disajikan mendapat perhatian khalayak luas dan dapat memengaruhi opini publik. Dalam hal ini media massa telah mengarahkan pemirsanya ke dalam perspektif yang sama dengan media tersebut. Di dalam melakukan kerja-kerja jurnalisme, yang diyakininya sebagai "independen" dan "obyektif" itu, tidak jarang media melakukan pengalihan isu, baik sengaja atau tidak.

Dalam situasi demikianlah maka kerja-kerja terbitan berkala serikat buruh melakukan seleksi informasi atau isu tertentu (dan juga, mengabaikan isu yang lain) untuk disajikan kepada anggotanya menjadi sangat penting. Tujuannya agar anggota diberikan informasi dengan jujur, apa adanya dan dari sudut pandang kepentingan buruh. Terbitan berkala serikat buruh tetap menyajikan isu-isu yang memang dekat, penting dan sekaligus strategis bagi perjuangan buruh.

Terbitan berkala sebagai alat pengorganisasian juga harus terus-menerus mengupayakan terwujudnya partisipasi anggota yang lebih luas. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah menjadikan media serikat buruh sebagai sarana untuk mengumumkan agenda serikat, serta mengajak semua anggota agar terlibat dalam kerja-kerja serikat, seperti aksi bersama.

Dari kedua fungsi tadi, yaitu: pendidikan anggota dan pengorganisasian, jika terus dikelola dengan baik dan stabil, secara derivatif akan bisa mendorong lahirnya fungsi *ketiga*, yaitu: pembangunan iklim opini publik yang berpihak pada buruh. Opini publik merupakan salah satu hal yang penting dari proses konstruksi makna atas kenyataan sosial yang sedang terjadi. Serikat buruh, secara relatif, memang sudah memahami arti penting fungsi-fungsi ini dalam tataran ideal. Namun, fungsi-fungsi tersebut perlu untuk dikuatkan dan dikembangkan.

Dalam tataran kenyataan, serikat-serikat buruh yang telah berupaya mengeluarkan terbitan berkala itu telah berupaya menjalankan kedua fungsi utama itu. Hanya saja, nampaknya fungsi ketiga masih belum ditumbuhkembangkan.

Pembangunan Opini Publik yang Berpihak Pada Buruh

Pada masa Orde Baru, opini publik merupakan sesuatu yang dibangun dan diarahkan dari atas ke bawah: pemerintah mengontrol media massa. Informasi menjadi sosialisasi kebijakan dan terompet penguasa. Dengan kata lain, opini publik sebagai pendapat umum sesungguhnya, tidaklah ada. Apa yang dimunculkan sebagai opini publik tersebut bukan muncul dari proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan pendapat yang dinyatakan oleh pribadi warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Melainkan pendapat rejim yang dipaksakan untuk menjadi pendapat umum.

Di masa kebebasan pers sejak 1998 ini, masalahnya menjadi berbeda. Kini kita justru kebanjiran informasi. Dari sekian banyak lalu lintas informasi itu, ada beberapa yang saling menemukan ikatan dan menciptakan iklim opini publik. Media massa, melalui peliputannya yang intensif, tidak jarang telah memasilitasi pembentukan membentuk konsensus sosial yang mengerucut menjadi opini publik. Kisah Prita Mulyasari adalah salah satu contohnya. Selain sebagai kisah pencarian keadilan, Prita juga merupakan kisah yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh opini publik.

Sepanjang 2009 kemarin, bahwa kekuatan opini publik yang digalang oleh media massa dan gerakan sosial menunjukkan dampak yang lumayan besar. Seseorang bisa kehilangan jabatan dan hancur karir politiknya akibat opini publik. Atau, ketika seorang nenek diduga mencuri dua butir kakao kemudian dibawa ke pengadilan. Lalu, media meliputnya. Hal tersebut telah mendorong penciptaan opini publik. Dari opini tersebut pula muncul ungkapan bahwa nurani hukum dan keadilan sedang sakit di negeri ini. Dalam konteks ini, opini publik dapat dikatakan hadir sebagai “pembela.”

Ada pula cerita lain yang jauh berbeda. Seorang buruh pabrik setengah baya di Bekasi mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ia pun diseret ke pengadilan, karena dituduh mencuri gembok. Jika diperkirakan, harga gembok tersebut tidak lebih dari Rp 50 ribu. Atau, cerita juru parkir sebuah Mall di Tegal yang juga di-PHK. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Karena dituduh menggelapkan karcis parkir, yang nilainya tidak lebih dari Rp 12 ribu. Dalam kasus-kasus demikian media massa tidak menurunkan liputan apapun.[3] Meskipun keduanya aktivis serikat, publikasi dan pembangunan opini gagal dibangun. Sejatinya, kasus di atas adalah kriminalisasi – sama halnya dengan apa yang dialami oleh Bibit-Chandra. Dan, kebanyakan dari kita tidak tahu peristiwa itu bahwa keadilan hukum untuk masyarakat marjinal telah dibutakan oleh kepentingan ”si kaya”.

---

[3] Informasi kasus Bekasi didapat dari Hermansyah (aktivis serikat di Bekasi), sementara kasus Tegal didapat dari Khotib Oe Sunhaji (aktivis Yawas Semarang).

Belum adanya terbitan yang secara nasional menyatukan tindakan dan pandangan kaum buruh sekaligus terbitan lokal daerah yang reguler, merupakan salah satu hambatan besar dalam membangun gerakan buruh yang terkonsolidasi dengan kuat

Luputnya fungsi menyusun opini publik dari terbitan-terbitan serikat itu, ironisnya, membutakan buruh anggota akan arti penting kerja-kerja organisasi serikat. Dapat disebut di sini satu contoh yang penulis alami sendiri. Seorang teman yang merupakan buruh sektor jasa yang berkantor di Jakarta Pusat, dengan jujur pernah berujar, "Madyday adalah hari macet." Pikiran demikian ternyata mewakili hampir seluruh buruh. Sebuah kenyataan pahit, ternyata tidak sedikit sesama buruh menganggap aksi buruh hanyalah sumber kemacetan, yang membuat ia telat datang ke tempat kerja. Atau, bahkan, serikat buruh hanya dianggap sebagai organisasi "penuntut" yang hanya akan membuat diri kita di-PHK tanpa mendapat apapun. Bagaimanapun inilah wajah dari opini publik tentang serikat buruh. Sebuah opini yang tidak terlepas dari warisan otoritarianisme Orde Baru. Namun, di sinilah tantangannya: terbitan serikat buruh harus mampu mengolah dan menggalang dukungan publik bagi perjuangannya akan keadilan sosial.

Keberadaan terbitan berkala serikat buruh menyaratkan pengelolaan yang baik, regularitas yang stabil dan intensif, cetakan massal dengan sirkulasi yang menyentuh semua lapisan dan hingga semua level. Seandainya saja, sebuah terbitan dengan jangkauan luas dan merata bahkan dapat mencapai daerah terpencil, penulis yakin, akan melahirkan opini publik yang menjadi "pembela" dan dapat mendukung terpenuhinya proses menggapai keadilan bagi rekan aktivis buruh yang ter-*zhalimi* tadi.

Serikat Buruh Harus Punya Media

Kiranya sudah menjadi keyakinan kita bersama bahwa gerakan buruh haruslah didukung oleh kerja-kerja media yang dimilikinya. Oleh karena itu, gerakan buruh, cepat atau lambat, harus memiliki suratkabarnya sendiri untuk memublikasikan gerakannya atau mendiskusikan kepentingannya. Belum adanya terbitan yang secara nasional menyatukan tindakan dan pandangan kaum buruh sekaligus terbitan lokal daerah yang reguler, merupakan salah satu hambatan besar dalam membangun gerakan buruh yang terkonsolidasi dengan kuat.

Penulis berharap, tiga terbitan buruh yang sudah ada, *Bintang Buruh, Koran Perjuangan* dan *Suara Independen* dapat terus berkembang menjadi suratkabar lebih besar lagi. Sebab, baik disadari atau tidak oleh pengelolanya, ketiga terbitan tersebut menyimpan banyak potensi untuk semakin maju di kemudian hari. "Maju" di sini diartikan sebagai kemampuan secara secara kuantitatif, yakni menjadi suratkabar serikat buruh yang

bersifat nasional dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Juga, mampu memunculkan nuansa pembelaan dan keberpihakan publik atas kelas masyarakat yang tertindas. Persis di sinilah terbitan serikat buruh masa kini akan mampu mewujudkan gaung pesan yang diserukan pendahulunya, Semaoen, dalam terbitan *Sinar Djawa* lebih dari 90 tahun yang lalu:
"... Kaoem Boeroeh Roekoenlah! Roekoen membikin koeat dan koeat menambah selamat. Kaoem boeroeh, koempoellah djadi satoe!"

Daftar Referensi

Dahlan, Muhidin. *Revolusi Yang Lahir Dari Cetak,* dalam Majalah Basis, No. 01-02, Tahun ke-58, Januari-Februari 2009.

DS, Soegiri dan Cahyono, Edi. *Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Zaman Kolonial Hindia Belanda Sampai Orde Baru.* Hasta Mitra, Jakarta 2005.

Suryomenggolo, Jafar. *Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu?; Studi Perayaan Satu Hari Buruh 1946-1947,* dalam Jurnal Kajian Perburuhan Sedane, Vol 8, No. 2, 2009.

Daftar wawancara:

Khamid Istakhori, 22 Januari 2010 melalui surat elektronik
Ismett Inoni, 22 Januari 2010 melalui surat elektronik
Roni Febrianto, 22 Januari 2010 melalui surat elektronik

Melawan Dalam Kepatuhan: Perlawanan Buruh Ramai Mall di Yogyakarta

Yogi Setya Permana

Abstract

In this article I will uncover the causes of the weak position of labor in the presence of investors in a Mall in Jogjakarta and how these weaknesses lead to different patterns of resistance as we imagine. Labor Mall has a unique character compared to factory workers. Hegemony of capital owners through a critical awareness of consumerism succeeded in quelling labor. The pattern of patron-client relationships and the repressive policies of the financier who borrowed through the hands of the state repressive apparatus makes workers increasingly do not have the strength to fight back. But in a state of helpless and without power, the opposition still appears. They fight in a subtle, small, and in everyday life. Resistance of the people lose. The method used was case study with an anthropological narrative structure so it can capture more detail the phenomenon under study.

Kata Kunci: hegemoni, patron-klien, aparatus represif, perlawanan orang-orang kalah

A. Latar Belakang

Saat ini buruh dalam situasi ini terjepit di antara pemodal dan negara. Nilai tawar buruh semakin lemah di hadapan pemodal dan seketika juga negara tidak memedulikan nasib buruh yang teraniaya. Instrumen negara seperti aparatus represifnya acap kali digunakan pemodal untuk mengamankan kepentingannya terhadap kaum buruh. Salah satu instrumen yang bisa diambil oleh buruh dalam meningkatkan posisi tawarnya di depan pemodal adalah dengan membentuk sebuah organisasi. Ironisnya keberadaan serikat pekerja sering kali terkooptasi oleh pemodal sehingga tidak dapat mengartikulasikan kepentingan buruh yang diwakilinya.

Kasus yang terjadi pada salah satu Mall di Yogya mengisahkan betapa tidak berdayanya kaum buruh di depan pemodal yang telah 'menjinakkan' negara. Tidak adanya kesadaran kelas dan serikat yang solid semakin melemahkan buruh. Selain itu, pola relasi patron-klien dan kebijakan represif pemilik modal membuat buruh semakin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun dalam keadaan tidak berdaya dan tanpa kekuatan tersebut perlawanan tetap muncul. Mereka melawan dengan cara yang halus, kecil, dan dalam kehidupan sehari-hari. Perlawanannya orang-orang kalah.

Penelitian ini menjadi penting karena belum ada penelitian yang mengulas secara mendalam politik eksploitasi dan perlawanan buruh di Mall.

Studi-studi yang sudah ada lebih banyak menitikberatkan pada buruh di sektor industri seperti pabrik. Mall menjadi penting karena karakter dan tipe buruhnya memiliki perbedaan dengan buruh pabrik. Menjamurnya Mall di kota-kota besar merupakan implikasi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam rejim kapitalisme global. Akan tetapi, sungguh disesalkan bahwa tingkat kesejahteraan para buruhnya masih memprihatinkan.

Dalam tulisan berikut, akan diulas apa penyebab lemahnya nilai tawar buruh di hadapan pemodal sebuah Mall di Yogyakarta? Serta bagaimana kelemahan ini menimbulkan pola perlawanan yang berbeda dari yang selama ini kita bayangkan? Tujuan dari penelitian adalah menjawab dua pertanyaan tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang saya gunakan adalah studi kasus. Untuk bisa mendeskripsikan fenomena secara tepat dan jelas maka studi kasus dipilih untuk menjadi metode penelitian. Dengan karakteristiknya yang spesifik, unik, khusus, dan penekanan pada dimensi lokalitas akan memudahkan peneliti untuk menafsirkan dan menangkap fenomena yang terjadi. Tanda dan penanda yang berserakan membutuhkan kejelian dari peneliti untuk memerhatikan hal-hal kecil yang terlupakan. Studi kasus merupakan perangkat metode yang relatif akrab dengan kebutuhan penelitian seperti ini.

Sensitifnya isu tentang perburuhan saya rasakan betul ketika mencoba mencari data dalam penelitian ini. Setidaknya, saya harus menunggu beberapa lama untuk dapat bertemu dengan seorang narasumber, Danu.

[1] Sedikit bercerita, Danu merupakan seorang mantan karyawan salah satu Mall di kawasan Malioboro (Ramai Mall) yang dipaksa mengundurkan diri karena ikut terlibat dalam sebuah aliansi pergerakan perburuhan. Cerita berawal dari *May Day* 2006 lalu, di mana ia mengoordinir beberapa temannya untuk ikut dalam aksi solidaritas buruh, yang diadakan oleh berbagai elemen perserikatan buruh dan juga mahasiswa. Gerak-geriknya yang diketahui oleh pihak manajemen lantas menjadi perhatian dan dianggap sebagai sebuah ancaman. Pada awalnya, ia hanya mendapatkan peringatan dari pihak manajemen kemudian dipindahkan dari bagian pramuniaga menjadi penjaga parkir sampai akhirnya ia dipaksa mengundurkan diri dengan kompensasi sejumlah uang pesangon.

Dari Danu, saya selanjutnya melakukan penelusuran dan mendapatkan seorang teman buruh yang telah bekerja selama kurang lebih 12 tahun dan masih akan bekerja di sana untuk jangka waktu, yang ia sendiri pun tidak tahu. Perasaan takut sempat kami tangkap dari Yanti. Perempuan yang berada di bagian satuan pengamanan ini tampak lega

[1] Nama ini bukan nama sebenarnya. Semua nama yang saya cantumkan di sini menggunakan nama samaran untuk melindungi narasumber kami.

ketika ia diyakinkan oleh Danu bahwa saya tidak memiliki maksud apa-apa selain ingin memotret realitas yang dihadapi kawan-kawan buruh Mall. Dengan ekspresi datar ia pun dengan gamblang dan sedikit masih ada perasaan takut menceritakan kepada saya bagaimana nasib buruh salah satu Mall tertua di Yogyakarta tersebut, terutama wanita, yang selalu terjepit dan tidak dapat mengadu kemana-mana.

kesadaran kelas belum terbentuk secara maksimal karena hegemoni yang dilakukan oleh perusahaan

Perjalanan selanjutnya saya menemui Aan yang juga telah cukup lama bekerja di Mall tersebut. Berbeda dengan Yanti yang sedikit takut, Aan mengaku sangat senang dapat berbagi informasi dengan saya. Ia pun berharap, dengan ini, dapat membantu mereka untuk mengubah keadaan mereka dari luar, karena kesempatan untuk bergerak dari dalam sangat sulit bahkan dapat dikatakan tidak mungkin dilakukan.

C. Politik Eksploitasi Buruh Ramai Mall: Dari Make Up sampai Brimob

C.1. Hegemoni

Tidak seperti buruh industri, buruh Mall umumnya mendapatkan lingkungan kerja yang jauh lebih "nyaman". Dari penuturan Yanti; ruangan yang ber-AC (Air Conditioner), ritme kerja yang cenderung santai dan tidak terburu oleh target membuat para buruh tersebut merasa beruntung dapat bekerja di tempat seperti itu dengan hanya berbekal ijazah SMA. Selain itu, tuntutan untuk selalu tampil menarik di hadapan konsumen membuat mereka harus mempercantik diri dengan *make-up*. Bagi kebanyakan buruh yang merupakan wanita, hal ini secara psikologis memengaruhi kesadaran akan ketertindasan mereka. Setiap wanita pasti sepakat bahwa mereka ingin selalu tampil cantik. Selain itu, untuk menyamarkan penindasan, pihak manajemen memberikan hak khusus berupa potongan 10 persen dari harga barang bagi buruh yang berbelanja di hari belanja yang telah ditetapkan. Biasanya, di awal bulan setelah pemberian gaji.

Dalam kasus buruh Mall tersebut, kesadaran kelas belum terbentuk secara maksimal karena hegemoni yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi lingkungan kerja mendukung bagi proses hegemoni. Sejuknya AC, lingkungan yang bersih, seragam yang wangi, dan situasi yang mengondisikan untuk selalu bersolek, bagi para buruh yang kebanyakan perempuan, kondisi kerja seperti ini sudah dirasakan lebih baik dibanding dengan buruh lain yang bekerja di pabrik.

Fenomena di atas dapat dibaca sebagai cara perusahaan untuk mencitrakan bahwa pekerjanya berbeda dengan buruh di tempat lain. Mereka lebih terawat dan terjaga penampilannya sehingga diasumsikan tingkat kesejahteraannya pun relatif lebih tinggi. Pembeda dengan buruh pabrik ini mengacaukan kesadaran kolektif para buruh sebagai kelas yang

tereksploitasi. Identitas yang (di)kabur(kan) tersebut menyebabkan solidaritas kelas tidak terbentuk dan kerap mandul dalam menghadapi tekanan pemilik modal.

Identitas akan dimengerti oleh tiap aktor bila relasi antagonisme telah terbentuk. Suatu relasi di mana terjadi penegasan siapa lawan dan siapa kawan, siapa kita dan siapa mereka. Untuk memunculkan relasi antagonistik maka rantai ekuivalen harus dikondisikan terlebih dahulu. Rantai ekuivalen merupakan suatu aktivitas pemaknaan yang sebelumnya masih bersifat partikular berubah menjadi universal. Dalam kalimat lain, menurut pemikiran Gramscian, universalitas yang membentuk rantai ekuivalensi tersebut adalah blok historis. Kepemimpinan intelektual dan moral akan membentuk 'kehendak kolektif' yang lewat ideologi akan menjadi pengikat organik untuk menciptakan apa yang dinamakan 'blok historis'.

Pemodal berusaha memengaruhi kesadaran kognitif buruh agar dalam memandang realitas yang ada sesuai dengan apa yang digariskannya. Perasaan ketertindasan berusaha diminimalisir melalui konsensus. Hegemoni merupakan sebuah konsensus karena penindasan dilakukan dengan 'persetujuan' dari korbannya. Hegemoni merupakan upaya untuk mengarahkan masyarakat dalam memandang problematika sosial sesuai dengan kerangka nilai kelompok tertentu atau kelompok dominan.

Hegemoni berbeda dengan dominasi yang berbentuk mekanisme represif. Ada berbagai cara yang dipakai, misalkan melalui institusi yang menentukan secara langsung maupun tidak, struktur kognitif masyarakat (sekolah, media massa, gereja, partai politik, dan lain-lain). Pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan atau membangkitkan kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis pada kaum buruh. Mekanisme kelembagaan tersebut menjadi instrumen kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi dominan.

Konsensus yang diterima oleh pekerja pada dasarnya bersifat pasif. Munculnya konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Namun, hal itu terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual pembentuk kesadaran yang memungkinkannya untuk memahami realitas sosial secara efektif.

Ada tiga tingkatan hegemoni yaitu hegemoni total *(integral*), merosot *(decadent*), dan minimum. Hegemoni total ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Dalam masyarakat kapitalis modern hegemoni yang muncul adalah hegemoni merosot *(decadent),* di mana dominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan berat. Terdapat potensi konflik yang tersembunyi.

Kesadaran kritis adalah cara untuk melawan hegemoni. Kesadaran kognitif buruh sebagai arena pertempuran. Perlu dihadirkan wacana alternatif dan basis konseptual kepada buruh untuk menandingi wacana dominan sehingga muncul kesadaran. Aktor pemantik kesadaran tersebut

bisa datang dari wilayah pendidikan atau politik. Intelektual organik bertugas menyadarkan dan memimpin perlawanan buruh.

C.2. Kebijakan Represif Pengelola Mall

Tak pelak kebijakan-kebijakan represif juga dihadirkan oleh pihak manajemen dalam menekan buruh untuk meminimalisir perlawanan. Salah satu contohnya ialah manajemen mempekerjakan seorang preman yang bernama Joko Golok.[2] Ia membawahi beberapa orang yang berlatar berlakang profesi sebagai anggota Brigade Mobil (Brimob). Joko dan anak buahnya seperti sebuah 'mekanisme bayangan' dalam sistem kepegawaian yang langsung dibawahi oleh pemilik Mall. Tugas yang dilakukan Joko adalah mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Tak jarang intimidasi dilakukan kepada buruh agar patuh terhadap kebijakan perusahaan.

Aparatus represif negara (kepolisian atau militer) kerap direkrut oleh pemilik modal untuk mengamankan bisnis mereka baik untuk relasi eksternal maupun urusan internal. Menurut Louis Althusser, terdapat dua jalur pelembagaan kuasa kelompok dominan atau negara yakni Aparatus Represif Negara (ARN) dan Aparatus Ideologi Negara (AIN). Kelompok dominan di sini bisa diartikan sebagai negara atau kelompok borjuasi, yang merupakan representasi dari kelas yang berkuasa *(the rulling class).* ARN menjalankan fungsinya dengan jalan kekerasan atau represif. Komponen-komponennya antara lain birokrasi, militer, pengadilan, penjara, dan polisi

> *"The State apparatus, which defines the state as a force of repressive execution and intervention 'in the interest of the rulling classes' in the class struggle conducted by the bourgeoise and its allies against the proletariat." (hal. 90).*[e]

Aparatus represif negara yang dalam kasus Ramai Mall adalah polisi, yang digunakan oleh pemodal *(the rulling class)* untuk melanggengkan subordinasi terhadap buruh. Situasi yang kerap terjadi di Negara Dunia Ketiga atau negara pascakolonial di mana terdapat suatu transaksi mutualisme antara pemodal dengan negara, meskipun dilakukan dengan cara diam dan ilegal. Aparatus represif negara (polisi) memberikan jasa keamanan dan pemodal menebusnya dengan uang. Dalam bahasa Althusserian, negara justru menjadi alat yang bisa dipinjam oleh pemodal atau borjuasi untuk merawat eksistensi mereka sebagai kelompok dominan *(the rulling class).*

> ***Bagi perempuan, kehamilan merupakan suatu yang kodrati. Namun untuk buruh Mall tersebut, kehamilan adalah penderitaan.***

Bagi perempuan, kehamilan merupakan suatu yang kodrati. Namun untuk buruh Mall tersebut, kehamilan adalah penderitaan. Manajemen

[2] Nama disamarkan

memberlakukan peraturan hamil dan cuti hamil yang dinilai tidak memihak para buruh perempuan. Para buruh perempuan diperbolehkan hamil hanya setelah mereka dua tahun menikah. Dalam cuti hamil, para buruh perempuan tersebut hanya diperbolehkan cuti satu bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan. Di samping itu, gaji mereka selama cuti hamil tersebut tidak dibayarkan dan sesudah masuk dari melahirkan gaji mereka kembali sama seperti buruh yang sedang melakukan training atau dengan kata lain terjadi pemotongan gaji setelah melahirkan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Pekerja/buruh perempuan berhak memeroleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.

Pada 2005, manajemen memutuskan untuk tidak mengadakan program asuransi Jamsostek. Bagi buruh yang sebelumnya telah mengikuti program ini dan ingin mengambil uang asuransi, manajemen mengharuskan mereka untuk menandatangani surat pengunduran diri fiktif. Akan tetapi surat yang sedianya untuk mengurus asuransi ini digunakan oleh manajemen untuk mempermudah pemecatan bagi para buruh yang dinilai membangkang.

Selain itu, mekanisme represif lainnya antara lain memutasikan pekerja yang vokal ke pos pekerjaan yang sangat tidak nyaman. Bagi buruh Mall, pos yang paling buruk adalah penjaga toilet dan penjaga parkir. Buruh juga diberikan opsi untuk mengundurkan diri dan mendapatkan sejumlah uang pesangon atau bila membangkang akan diberikan kondisi kerja yang ‘tidak mengenakkan’. Hal ini dilakukan agar “virus” perlawanan tidak sempat menyebar kepada buruh lainnya.

C.3. Struktur Patronase di Ramai Mall

Temuan lain di lapangan memperlihatkan bagaimana hubungan patron-klien yang terbentuk dalam Mall tersebut. Relasi patron-klien ini memunculkan sikap *ewuh-pekewuh* dan ketergantungan antara klien terhadap sang patron. Hubungan ini terjadi akibat perekrutan tenaga kerja yang tertutup. Pekerja yang sudah mapan dan biasanya menempati posisi level menengah, memasukkan kerabat atau temannya untuk menjadi buruh di Mall. Tentunya, buruh level menengah ini berasal dari kalangan konservatif, yang tunduk kepada kemauan perusahaan. Pola relasional ini semakin dikuatkan oleh faktor etnisitas yang sudah mengakar dari awal, karena Mall tersebut merupakan perusahaan keluarga. Posisi-posisi strategis dalam Mall tersebut biasanya ditempati oleh pekerja yang beretnis sama dengan sang pemilik.

Ramai Mall merupakan sebuah perusahaan keluarga yang dibentuk sekitar awal dekade 90-an. Ramai Mall dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu *departement store* dan pasar swalayan. Dari kedua bagian tersebut, setidaknya, buruh Ramai berjumlah 500 orang. Dalam mengorganisir

buruhnya, Ramai Mall membentuk SPNIBA (Serikat Pekerja Niaga Barang dan Jasa). Pembentukan SPNIBA ini sendiri tidak lepas dari kooptasi manajemen perusahaan yang dipegang langsung oleh pemilik dan keluarganya. Penunjukan para pimpinan SPNIBA dilakukan oleh pemilik Ramai Mall dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya. Dengan penempatan orang-orang kepercayaan ini fungsi serikat buruh yang seharusnya, sebagai mediator kepentingan buruh terhadap pemilik modal, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penempatan orang-orang kepercayaan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan patron-klien. Karena, sang pemilik modal (patron) dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan keuntungan-keuntungan dalam bentuk jabatan dan juga pendapatan bagi pengurus SPNIBA tersebut (klien). Sebagai timbal baliknya, klien memberikan dukungan dengan merepresi kepentingan buruh.

Hubungan patron-klien dalam hubungan kerja di Ramai Mall juga dapat dilihat dari bagaimana perekrutan tenaga kerja dan pola kenaikan jabatan dilakukan. Sering kali perekrutan tenaga kerja dilakukan karena faktor kedekatan dengan seseorang yang memiliki posisi penting seperti personalia dan sebagainya. Pola perekrutan dengan menggunakan patron-klien ini yang kemudian didukung juga oleh faktor budaya *ewuh pekewuh* yang mengakibatkan sulitnya membangkitkan kesadaran kelas buruh Mall. Hubungan Patron-Klien ini juga yang pada akhirnya dipergunakan oleh para buruh sendiri dalam upaya meningkatkan jabatannya. Saling menjatuhkan dan mengkhianati perjuangan buruh merupakan hal yang seringkali terjadi dalam rangka menarik simpati sang patron agar mau menjadikannya klien. Hal ini terbukti pada salah satu narasumber kami, yaitu Danu.

Patron-klien merupakan sebuah hubungan antara kedua peran di mana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron.

Secara umum, terdapat dua kategori pertukaran, yakni arus patron ke klien dan arus klien ke patron. *Arus patron ke klien* memiliki beberapa kategori, *pertama*, *penghidupan subsistensi dasar*. Pada kasus ini bisa berupa pemberian lahan untuk menjalankan usaha dagang, pemberian modal usaha, atau bisa juga pemberian nasihat teknis. *Kedua*, *jaminan krisis subsistensi*. Patron diharapkan "menjamin kerugian" jika terjadi kegagalan dalam usaha dengan cara memberikan pinjaman. Kerugian tersebut harus "diserap" oleh patron agar kehidupan klien tidak rusak. *Ketiga*, *perlindungan.* Patron harus melindungi klien dari bahaya, baik bahaya pribadi maupun bahaya umum. *Keempat*, *makelar dan pengaruh*. Jika patron melindungi

kliennya dari perusakan yang berasal dari luar, ia juga menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menarik hadiah dari luar bagi kepentingan kliennya. Perlindungan merupakan peran defensifnya dalam menghadapi dunia luar, sedangkan kemakelaran adalah peran agresifnya. *Kelima*, *jasa patron kolektif*. Secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomi secara kolektif. Patron dapat mengelola dan menyubsidi sumbangan dan keringanan, menyumbang lahan untuk kegiatan kolektif dan mendukung sarana umum setempat. Sedangkan *arus klien ke patron*, seorang klien umumnya menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apapun bentuknya. Semakin besar apa yang diberikan patron kepada kliennya maka relasi ini dipandang sah dan bukan eksploitatif bagi klien.

James C. Scott melihat bahwa keragaman identifikasi manusia dan sifat kebutuhan manusia yang tidak bersinambung, tidak membuat legitimasi patron bagi klien dapat dirumuskan sebagai fungsi linear langsung. Sejauh patron melaksanakan "kewajibannya," maka legitimasinya terhadap klien tetap terjaga, namun jika terjadi pelanggaran atau perubahan, maka bisa dengan tiba-tiba terjadi perlawanan terhadap patron oleh klien. Legitimasi bukanlah fungsi linear dari sebuah neraca pertukaran, maka ada ambang-ambang tertentu bagi klien, dan jika neraca berada di bawah ambang tersebut, maka legitimasi juga akan menjadi cepat dan menyeluruh.

D. Melawan Dalam Diam

Namun dengan besarnya skala tekanan, apakah benar-benar menciptakan perlawanan dari buruh? Hegemoni yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap buruh tidak mampu mengooptasi keseluruhan alam pikir para buruh Ramai Mall. Hegemoni yang terbentuk merupakan *hegemoni merosot,* di mana tersimpan potensi konflik yang tersembunyi. Muncul beberapa elemen seperti Aliansi Jurnalis Independen, organisasi ekstrakampus seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), *Non-Government Organizations* (NGO) yang antara lain LBH Yogyakarta, bergabung dalam KOBRA (Koalisi Untuk Buruh Ramai Mall) yang memberikan dukungan baik moril dan taktik strategi perjuangan.

Melalui diskusi yang diselenggarakan secara diam-diam serta advokasi yang diberikan berhasil memantik kesadaran kritis para buruh Ramai Mall. Meskipun absennya serikat pekerja yang kritis dan kontributif dari internal buruh, namun kehadiran elemen-elemen tersebut cukup signifikan dalam menambah pemahaman buruh tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Kesadaran-kesadaran yang berusaha untuk terbangun secara kolektif inilah yang sedikit banyak mendorong para buruh untuk menunjukkan perlawanan dengan cara mereka sendiri terhadap pemodal.

Perlawanan yang kerap dilakukan bukanlah yang bersifat frontal dan jelas, akan tetapi lebih dalam bentuknya yang halus, kecil, skala terbatas, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter pekerjaan buruh Mall yang halus berpengaruh juga pada sifat perlawanan mereka. Sifat perlawanan mereka lebih dalam hal 'maksud' ketimbang konsekuensi. Tujuan utamanya bukanlah untuk langsung menjatuhkan atau mengubah sistem dominasi namun untuk bertahan hidup *(survival*) dan simbolis. Mereka berusaha sebisa mungkin bertahan dalam sistem dominasi tersebut dan seketika juga meminimalisir kerugiannya. Hal ini merupakan hasil dari negosiasi dari buruh Ramai Mall sebagai 'agen' terhadap represivitas 'struktur' yang dikondisikan oleh pemilik modal.

> *"…these forms of resistance reside in informal accountability arrangements where they require little or no coordination or planning. They make use of implicit understandings and informal accountablity networks, often represent a form of individual self-help, and typically avoid any direct, symbolic confrontation with the authority. Despite these informalities and silences, these forms of resistance embedded in such accountability relations were powerful: the subalterns managed to defend their interest against both conservative and progressive orders." (hal. 8)* [g]

Bentuk dari perlawanan ini antara lain gosip atau rumor. Dalam pergaulan sehari-hari, sesama buruh acapkali menggerutu terhadap kebijakan manajemen. Karena ketidakmampuan dalam menggalang kekuatan dan besarnya tekanan, sikap perlawanan tersebut hanya berujung pada kata-kata. Hal ini juga tampak dari ekspresi yang terpancar pada saat narasumber bercerita kepada kami. Saat 'ngrumpi' dengan komunitas-komunitas informalnya mereka bebas dari represi. Dengan bergosip dan menjelek-jelekkan pemodal, buruh merasa berkuasa secara penuh atas dirinya. Hal ini sebagai kompensasi atas tekanan yang selalu mereka terima.

> *"Rumours as public resistance to a repressive communication structure, and suggests that the political significance of rumours in the delegitimization of a particular ruling regime depends on the real and specific context within which they are produced and circulated." (hal. 158).* [h]

Gosip atau rumor merupakan implikasi dari relasi subordinasi sehingga menghilangkan komunikasi yang sehat antara buruh dan pemodal. Buruh tidak mampu mengartikulasikan kepentingannya dengan baik dalam perundingan untuk memperoleh solusi komprehensif. Situasi tersebut dikarenakan tersumbatnya saluran komunikasi di antara kedua belah pihak yang dapat dicontohkan dengan tumpulnya serikat buruh Ramai Mall, yang seharusnya mampu menjadi representasi kepentingan buruh. Kooptasi yang dilakukan pemilik modal terhadap serikat, menyebabkan serikat pekerja pun

hanya ‘papan nama’ belaka tanpa kinerja apa pun. Komunikasi yang terjadi hanya bersifat searah dan *top down* tanpa mendengarkan aspirasi para buruh. Rumor atau gosip ditujukan untuk menggoyang secara simbolik legitimasi kekuasaan pemilik modal maupun ideologi yang berusaha ditanamkan dalam lingkungan kerja.

Kasus penggelembungan jumlah barang yang dibeli juga termasuk ke dalam bentuk perlawanan yang kami tangkap. Hal ini biasanya dilakukan oleh buruh yang berwenang dalam hal penyetokan barang. Penggelembungan jumlah barang ini tentu saja dapat merugikan perusahaan karena jumlah barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan yang ada. Selain itu, hal ini juga memengaruhi neraca keuangan perusahaan karena memperbesar pos pengeluaran sementara pendapatan tidak bertambah. Pengutilan juga kerap dilakukan oleh buruh. Pencurian barang dalam volume terbatas acap kali terjadi.

Pencurian dalam volume terbatas atau yang sering disebut dengan pengutilan tidak bermaksud seperti pencurian yang ingin memberikan kerugian besar kepada Mall. Pengutilan lebih sebagai ekspresi ketidakpuasan atau kekecewaan karyawan atas kebijakan manajemen yang eksploitatif. Ekspresi kekecewaan tersebut dilakukan dalam skala kecil agar tidak menimbulkan efek besar yang merugikan karyawan pelaku. Mereka tidak bisa menunjukkan perlawanan yang frontal dalam skala masif namun lewat peristiwa-peristiwa kecil yang diharapkan tidak terdeteksi oleh pihak manajemen. Kekuatan karyawan Mall yang masih lemah dan tidak terkoordinasi dengan baik hanya mampu melawan dalam bentuknya yang sporadis.

> *“The subalterns ‘weapons’ used in everyday forms of resistance, as Scott illustrated from his Malaysian fieldwork, were foot dragging, dissimulation, desertion, false compliance, pilfering, feigned ignorance, slander, arson, sabotage, and so on.” (hal. 7)”.*[9]

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, murah senyum dan keramahan adalah salah satu keniscayaan. Namun pelayanan seperti ini tidak terjadi di Mall tersebut. Buruh kerap cemberut dan tidak ramah dalam melayani konsumen. Seolah-olah memang tidak memiliki niat untuk bekerja dan melayani. Malas-malasan dalam bekerja juga mereka ekspresikan sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap perusahaan. Perilaku seperti ini bisa kita lihat salah satunya di tempat penitipan tas di mana pegawai yang bertanggung jawab acuh tak acuh dan selalu cemberut dalam melayani konsumen. Mimik wajah yang tidak menunjukkan keceriaan adalah simbol dari ketidakbahagiaan yang mereka harapkan akan berimbas pada respon konsumen. Itu adalah metode resistensi yang paling mudah dengan resiko yang paling minimal.

Selain perlawanan secara individu, terdapat pula perlawanan yang bersifat kolektif dan melibatkan semacam jaringan informal. Bentuk seperti

ini dapat dilihat dari penjualan voucher belanja yang seharusnya digunakan oleh buruh kepada konsumen. Pada setiap menjelang hari raya, pihak manajemen biasanya memberikan tunjangan hari raya berupa voucher bernominal tertentu kepada setiap buruh. Voucher ini biasanya dijual oleh para buruh kepada konsumen dengan bantuan teman buruh yang bertugas sebagai kasir.

E. Kesimpulan

Lemahnya nilai tawar buruh Ramai Mall disebabkan antara lain pengaruh hegemoni yang dilakukan oleh pemilik modal. Hegemoni tersebut mengakibatkan lemahnya kesadaran kritis dan mengacaukan solidaritas kolektif. Kesadaran kritis yang belum terbentuk secara masif membuat para buruh tidak mampu untuk menegaskan relasi antagonisme sehingga memupuskan potensi munculnya rantai ekuivalensi. Rantai ekuivalensi yang tidak terbangun menyebabkan solidaritas kolektif amatlah rapuh.

Ramai Mall adalah sebuah perusahaan keluarga sehingga terdapat struktur patronase yang amat kental. Relasi patronase yang melembaga tersebut menyuburkan budaya *ewuh-pakewuh* yang menghambat laju progresivitas buruh dalam perjuangan hak-haknya. Struktur patronase menjadi penentu tingkatan karir buruh dalam lingkungan kerja sehingga mengabaikan faktor meritokrasi. Serikat buruh internal pun terkooptasi oleh pemilik modal yang memasukkannya dalam struktur besar jaringan patronase. Pemimpin serikat buruh merupakan *client* dari patron di atasnya sehingga tidak memiliki kemauan untuk menentang kebijakan pemilik modal yang merugikan buruh. Akhirnya, serikat buruh pun mandul dalam fungsinya untuk mengartikulasikan kepentingan para buruh.

Penggunaan aparatus represif negara yakni aparat kepolisian oleh pemilik modal untuk menambah tekanan semakin membuat posisi buruh terjepit. Terjadi relasi transaksional antara alat negara dengan pemilik modal yang bersifat mutualisme untuk semakin menguatkan posisi pemilik modal sebagai kelompok dominan *(the rulling class).* Dengan munculnya aparat yang memainkan kontrol kekerasan di dalam lingkungan kerja, buruh menjadi khawatir akan keselamatannya sehingga memilih untuk tidak melawan kebijakan pemilik modal.

Akan tetapi, resistensi dari buruh tidak bisa dikatakan sepenuhnya menghilang. Bentuk hegemoni yang terbentuk adalah hegemoni minimum sehingga menyimpan potensi konflik dan perlawanan dari para buruh. Muncul beberapa bentuk perlawanan yang lebih bersifat simbolik dalam rangka menggoyang legitimasi pemilik modal. Tujuan perlawanan bukan untuk mengubah struktur dominasi namun lebih dikerangkai oleh semangat '*survival'* di tengah struktur yang eksploitatif. Perlawanan-perlawanan tersebut merupakan hasil dari negosiasi buruh sebagai 'agen' dengan 'struktur kerja' yang dikondisikan oleh pemilik modal. Perlawanan-

perlawanan tersebut antara lain rumor/gosip, penggelembungan harga barang, pengutilan, pencurian, dan ketidakramahan terhadap pengunjung.

Daftar Referensi

Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Laclau, Ernesto dan Chantal Moffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis; Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru*. Resist Book, Yogyakarta.

Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999. *Negara dan Hegemoni*. Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

Althusser, Louis. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Resist Book, Yogyakarta.

________, Louis. 2006. *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Toward an Investigation)* dalam Aradhana Sharma and Akhil Gupta (Ed.). *The Antropology of The State, a Reader*. Blackwell Publishing, Oxford.

Scott, James C. 1993. *"Perlawanan Kaum Tani"*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hidayat, Dedy N. 2002. *Don't Worry, Clinton is Megawati's Brother: The Mass Media, Rumours, Economic Structural Transformation and Delegitimazation of Suharto's New Order.* International Communication Gazette; 64; 157

Alawattage, Chandana dan Danture Wickramasinghe. Tanpa Tahun. *"Weapons of The Weak: Subaltern Resistance and Transformation of Governance Stuctures-Case of Ceylon Tea.* Research Paper. Aberdeen University Business School dan University of Manchester

Dialog

Pengantar Redaksi

Sebagaimana diketahui, maraknya penggunaan buruh kontrak secara langsung maupun melalui agen tenaga kerja di pabrik-pabrik, semakin memperlemah daya juang serikat buruh. Ini diperparah dengan minimnya pendidikan yang mencerahkan buruh anggota untuk menghadapi persoalan-persoalan di tempat kerja. Akibatnya, baik buruh tetap maupun buruh kontrak tidak tersentuh oleh geliat perjuangan serikat buruh. Alhasil, upaya-upaya perjuangan buruh seakan mandeg dan berputar-putar untuk menyelesaikan kasus per kasus.

Di antara kejumudan tersebut, beberapa serikat buruh mencoba berinovasi dengan melakukan pendidikan secara luas (buruh dan calon buruh) dan mengorganisasikan buruh kontrak. Rubrik Dialog kali ini menurunkan dua obrolan yang memotret persoalan aktual perburuhan: bagaimana pendidikan untuk buruh dan calon buruh dan bagaimana mengorganisasikan buruh kontrak.

Syarif Arifin melakukan wawancara kepada dua organisasi di Bandung Jawa Barat, yakni Fenny Ketua Persatuan Buruh Kontrak Menggugat (PBKM) pada 6 Mei 2010 di Kantor Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Cimahi Jawa Barat. Dan wawancara dengan Rohmat Sodikin, Presiden Paguyuban Pekerja Muda Peduli-Youth Christian Worker (PPMP-YCW) pada 10 Mei 2010 di Metro Bandung Jawa Barat.

Fenny: PBKM itu wadah belajar buruh kontrak

Sebagaimana diketahui, perekrutan buruh kontrak secara langsung maupun melalui agen tenaga kerja, semakin marak. Mereka pun kerap direkrut untuk mengganti buruh tetap di bagian inti produksi. Keadaan ini semakin memperlemah daya juang serikat buruh. Faktor utamanya, bahwa rata-rata serikat buruh berbasis buruh tetap. Hal tersebut diperparah dengan kemandegan model-model pengorganisasian dan perjuangan untuk buruh kontrak.

Di antara kemandegan tersebut, sejatinya, beberapa serikat buruh mencoba berinovasi mengorganisasikan buruh kontrak: ada yang diintegrasikan dengan organisasi yang telah eksis, ada pula yang berinisiatif membuat wadah khusus. Ide yang kedua, salah satunya adalah pembentukan Persatuan Buruh Kontrak Menggugat (PBKM)-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Kami mengaggap penting untuk menampilkan apa dan bagaimana kiprah PBKM dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi serikat buruh lain. Dengan kata lain, bahwa buruh kontrak bukan “makhluk lemah” yang sewaktu-waktu di-PHK sehingga tidak bisa berorganisasi. Juga, menegaskan bahwa buruh kontrak maupun buruh tetap, sama-sama manusia yang hidup dan penghidupannya dikuras untuk kepentingan akumulasi modal.

Berikut wawancara Redaktur Jurnal Sedane, Syarif Arifin bersama Ketua PBKM, Fenny, pada 6 Mei 2010 di Kantor KASBI Cimahi Jawa Barat. Saat wawancara, Fenny ditemani Ponisah anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Cimahi Jawa Barat.

Sejak kapan Anda bekerja sebagai buruh kontrak?

Buruh kontrak itu dilegitimasi oleh UUK No. 13 Tahun 2003. Saya bekerja sejak tahun 2006, setelah ganti pemerintahan pun, masih saja buruh kontrak dan entah sampai kapan. Mungkin dua hari lagi atau tiga hari lagi (diputus kontrak). Saya juga tidak tahu. Saya tidak mempunyai kepastian untuk masa depan. Semua buruh kontrak tidak memiliki kepastian masa depan buat dirinya sendiri, apalagi buat keturunan dan keluarganya. Kalau buruh kontrak, jangankan memikirkan satu tahun ke depan, satu bulan, satu hari pun kita tidak akan pernah tahu. Mereka bisa sewaktu-waktu diputus kontraknya.

Bagaimana PBKM dibentuk?

Buruh kontrak itu merupakan korban. Sebagai korban, kita harus melakukan perjuangan agar tumbuh kesadaran. Karena itu pula, kita (buruh kontrak) berorganisasi.

Awalnya, para buruh kontrak merasa didiskriminasi di dalam perusahaan, PT Kahatex. Mereka melihat hak-hak buruh dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak didapat oleh buruh kontrak. Di PKB tercantum bahwa buruh kontrak dan tetap, haknya sama. Tapi, buruh kontrak tidak pernah menerima hak mereka. Mereka berinisiatif membentuk serikat (untuk memperjuangkan hak mereka). Karena mereka rawan diputus kontrak, maka dibentuk organisasi di luar perusahaan.

PBKM berdiri pada 2007. Pada awal dibentuk anggotanya mencapai 300 orang di PT Kahatex. Sekarang hanya 70 orang. Kami menduga, ini ulah perusahaan, untuk menghabisi anggota PBKM. Memang ada yang habis masa kontraknya, tapi kebanyakan “dihabisi” masa kontraknya. Saat ini, PBKM memiliki anggota di tiga perusahaan.

Organisasi ini bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan buruh kontrak. Pada awal pembentukannya, PBKM sempat melakukan mogok dengan tuntutan: persamaan hak antara buruh tetap dan buruh kontrak.

Aksi itu membuahkan hasil, di antaranya transparansi kontrak di perusahaan. Kita sekarang mendapatkan hak uang makan. Kini, buruh kontrak didaftarkan pula di Jamsostek. Pada awalnya, mereka tidak tahu mengenai hak-hak mereka, meskipun tiap bulan upahnya dipotong untuk Jamsostek. Jadi, hak buruh kontrak setara dengan buruh tetap: sama-sama mendapatkan hak diikutsertakan di dalam Jamsostek.

Bagaimana merawat PBKM?

PBKM itu wadah belajar buruh kontrak. Di dalamnya ada pendidikan-pendidikan untuk semua buruh kontrak. Mereka terlibat dalam rapat-rapat organisasi. Metode yang kita lakukan untuk PBKM adalah pengorganisiran, propaganda, pendidikan, dan rekrutmen.

Yang paling penting adalah bagaimana menanamkan mengenai pentingnya berorganisasi untuk buruh kontrak. Tidak ada materi khusus untuk buruh kontrak. Yang membedakan hanya ancaman terhadap buruh kontrak lebih besar daripada buruh tetap.

PBKM itu 'kan anggota dari KASBI, cuma kita tidak mencatatkan ke Disnaker, itu karena memang tentang tadi, ancaman kita (pemutusan kontrak tiba-tiba). PBKM itu wadah diskusi, *nah* KASBI itu sendiri adalah buat wadah perjuangan dan perlawanan dari PBKM itu sendiri.

Apa hambatan dalam mengorganisasikan buruh kontrak?

Mengumpulkan buruh untuk berorganisasi, pada dasarnya, sangat sulit. Tapi, buruh kontrak itu lebih sulit. Kesulitan utama karena masa kerjanya sangat pendek.

Kesulitan lain dalam mengajak berorganisasi adalah melawan rumor dan doktrin perusahaan, seperti kata "Cuma sekedar mengingatkan, untuk kalian karyawan kontrak yang baru kerja, pernah ada kejadian yang seperti ini-itu, anak kontrak jangan ikut-ikut berorganisasi, kalian masuk ke sini saja sudah bersyukur". Dengan berorganisasi saja, sebenarnya, kemenangan buat buruh kontrak.

Apa tuntutan PBKM?

Kita *pingin* sistem kerja kontrak itu dihapuskan dan jangan ada buruh kontrak lagi. Anehnya, pemerintah masih saja mau memperluas perekrutan buruh kontrak.

Buruh kontrak ini korban kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel. Kita akan tetap melakukan pengorganisasian dan pendidikan untuk mengajak buruh (kontrak maupun tetap) agar berorganisasi dan melawan itu semua.

Apa pesan Anda untuk buruh kontrak di tempat lain?

Untuk serikat buruh di Indonesia yang lain mungkin harus lebih menjadi serikat yang benar-benar serikat: serikat yang benar-benar mengatasnamakan buruh, benar-benar serikat yang berasal dari buruh, yang mengerti kepentingan buruh, dan mereka harus menjadi serikat yang dibuat untuk serikat, oleh serikat, dan untuk serikat juga. Dan, untuk karyawan kontrak dimanapun berada, penindasan yang selama ini dilakukan oleh rejim-rejim sudah bukan harus kita diamkan lagi, kita harus mulai bangkit. Penindasan yang kita rasakan benar-benar terasa oleh diri kita sendiri. Bayangkan, apa yang akan terjadi nanti kalau seandainya kita hanya diam dan diam dan diam: tidak akan ada perubahan. Perubahan hanya akan terjadi jika kita mengubah itu semua. Jika kita hanya diam maka akan jadi korban penindasan maka bangkit dan lawan adalah keharusan.

Siapapun hari ini pemimpin serikat sudah selayaknyalah mereka menjadikan serikat itu bukan sebagai serikat markus yang hanya mengatasnamakan buruh: “bermain” dengan pengusaha dan melakukan lobi-lobi yang justru akan mengorbankan kita. Ya sudahlah, kita kembali kepada inti tujuan awal. Pembentukan serikat buruh adalah awal untuk perjuangan kaum buruh, dan itu harus dikembalikan ke situ lagi.



Rohmat Sodikin:
Ambil peranan sesuai kapasitas untuk menggalang persatuan

Bagaimana PPMP-YCW menjalan kegiatannya?

PPMP ini organisasi massa yang prinsipnya itu adalah gerakan massa. Kita bergerak mengorganisasikan sektor-sektor, yaitu buruh dan pemuda pengangguran. Target kita itu pemuda. Kenapa pemuda? Karena kita lihat bahwa banyak sekali pemuda rata-rata putus sekolah, terus mereka menjadi pengangguran. Terus juga, banyak buruh di pabrik itu kaum muda. Telah menjadi budaya di pemuda, setelah lulus sekolah mereka bekerja. Dan, kalau bekerja pun, dalam arti bikin lamaran, masuk satu pabrik. Jadi, mereka ketergantungan terhadap modal. Tidak berpikir bagaimana mengembangkan potensi diri sendiri.

Nah, kalau di perburuhaannya, kita berbicara tentang bagaimana membangun satu gerakan. Gerakan ini berbicara tentang jaminan perlindungan hak buruh dan kampanye tentang upah layak. Tapi, secara garis besar kita kampanye tentang pekerjaan yang adil dan layak bagi buruh dan bagi pemuda. Yang dibayangkan bahwa semua orang itu harus mendapatkan pekerjaan. Teknisnya advokasi, pengorganisiran, pendidikan, dan aksi-aksi.

PPMP memiliki dampingan lima pabrik. Kalau untuk pemudanya ada di enam daerah. Wilayah kerja kita ada di Semarang, Jakarta dan Bandung. Kita juga mengorganisasikan pengamen-pengamen jalanan.

Dalam pandangan PPMP-YCW, apa persoalan aktual perburuhan?

Permasalahannya, pertama, di tingkatan upah yang berbeda: di masing-masing daerah itu berbeda. Bisa disebabkan pengaruh otonomi daerah. Terus perbedaan di tingkatan isu tentang upah sektoral. Belum lagi kelemahan keterlibatan buruh (dalam berorganisasi) karena permasalahan status kerja kontrak. Kalau fenomena terakhir ini, keterlibatan buruh itu semakin berkurang dalam organisasi-organisasi; entah itu keterlibatan dalam forum diskusi atau keterlibatan dalam pendidikan, bahkan keterlibatan di dalam mobilisasi aksi dalam melakukan tuntutan-tuntutan atau kampanye-kampanye. Nah, itu salah satu yang menyebabkan melemahnya gerakan buruh.

Bagaimana dengan penentuan upah?

Kalau di peraturan dikatakan bahwa upah itu harus menuju kebutuhan hidup layak. Tapi, setiap tahunnya tidak pernah upah itu bisa menutupi kebutuhan hidup layak. Nah, biasanya, perdebatan di dewan penguapahan dipersulit. Misal, teman-teman serikat di dewan pengupahan mengusulkan angka Rp 1,3 juta, APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menawar Rp 1 juta. Nah, karena perdebatannya sulit dan terjebak pada permasalahan waktu, biasanya pemerintah mengambil jalan tengah, jadi Rp 1.06 juta. Kalau serikat menolak juga, maka dipakai metode voting. Karena komposisinya pun sudah berbeda, suara serikat buruh pasti kalah.

Soal komponen upah. Kalau di survei, ada beberapa komponen yang hilang, bahkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Contoh komponen tentang celana. Celana itu disebutkan adalah *Cardinal*. *Cardinal*, kalau kita cek harganya di toko hampir Rp 300-400 ribu, cuma begitu disurvei ke pasar, *Cardinal* yang bajakan harganya Rp 20.000.

Ada pula soal *setting* waktu. Kalau pagi, harga masih mahal. Kalau siang sudah murah, apalagi sore. Dewan pengupahan melakukan survei pasar itu, sore hari. Harganya sudah murah.

Jadi, sebenarnya, kenaikan upah dari KHL itu tidak pernah diperdebatkan, tidak pernah disurvei dan tidak pernah dirundingkan. Tiap tahun kenaikan rata-ratanya 10 persen. Itu beberapa problem di dalam dewan pengupahan

yang kami terima dari beberapa daerah. Dari persoalan itu, kita menawarkan bahwa upah buruh itu harus naik 50 persen dari UMK di setiap kota/kabupaten.

Bagaimana strategi menghadapinya?

Strategi yang dilakukan adalah strategi pengorganisasian. Kita mengajak teman-teman di forum diskusi, terutama untuk buruh kontrak agar mereka mempunyai organisasi. Entah itu nanti organisasinya di tingkat pabrik ataupun kawasan, bahkan tingkat lintas kawasan atau lintas sektor. Memang bisa saja mengangkat isunya tentang penolakan sistem buruh kontrak, mungkin bisa saja bikin aliansi buruh kontrak, seperti itu. Kita coba mengorganisasikan buruh-buruh kontrak dan kita wadahi dalam komunitas. Tadinya sih, rencananya, buruh kontrak itu mau dibikin serikat di luar pabrik. Biasanya, buruh-buruh kontrak ini, kalau diajak berorganisasi mereka selalu mengatakan, kami buruh kontrak. Jadi, kalau pun berorganisasi, mereka akan diintimidasi, semacam di-PHK dan diputus kontraknya. Tapi, ketika buruh ini habis kontrak, atau kalau dia tidak diperpanjang, akan mencari kerja di pabrik lain yang tidak jauh dari kawasan pabrik itu sendiri. Makanya kami berpikir, bagaimana kalau buruh kontrak ini diorganisasikan di luar pabrik, entah itu organisasi kawasan atau apa.

Pengetahuan apa yang diperlukan bagi buruh kontrak?

Mereka (buruh kontrak) harus memahami tentang hak-hak sebagai buruh; entah itu hak-hak normatif ataupun pemahaman tentang upah. Jadi, minimal kalau teman-teman buruh ini paham, ketika masuk bekerja dia melihat apakah “di kontraknya” dicantumkan tentang hak-hak normatif. Biasanya, si calon pekerja ini selalu terikat dalam kontrak, dia tidak memahami hak-haknya. Jadi, apa yang ditawarkan pihak perusahaan selalu diterima. Jadi, salah satunya adalah pendidikan tentang perburuhan. Lalu yang keduanya pendidikan tentang keorganisasian.

Di serikat-serikat buruh “kuning” tidak pernah ada pendidikan tentang apa itu hak normatif, apa itu upah, dan tidak ada pengenalan apa itu organisasi. Wajar sekali, jika buruh-buruhnya tidak tahu apa-apa: bagaimana mekanisme upah, dan siapa yang melahirkan upah.

PPMP menawarkan sebuah metode bahwa setiap aksi yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan matang. Jadi, ketika menentukan aksi itu harus mendalami untuk melakukan sebuah aksi yang lebih baik. Jadi, posisinya tidak provokasi. Mogok, mogok, terus di-PHK tapi buruhnya dibiarkan. Jadi, biar teman-teman buruh sendiri yang mempelajari dan menentukan seperti apa. Tindakan apapun yang mereka lakukan, itu sudah menjadi sebuah keptusan yang matang.

Ada lagi yang ingin disampaikan?

Secara umum gerakan buruh itu lemah, dengan sistem kerja kontrak dan upah rendah. Pesannya, bagaimana semua lembaga; entah itu serikat buruh, mahasiswa, LSM atau NGO sendiri, untuk mengambil peranan masing-masing dari kondisi ini. Ya, kalau gerakan buruhnya sudah jelas: melakukan pengorganisasian, pendidikan, dan lainnya. Kita harus mengambil peranan masing-masing sesuai kapasitas gerakan ataupun organisasinya sendiri. Terus, harus tetap melakukan kampanye, yaitu pentingnya sebuah persatuan. Harus terus kita mengajak, entah itu secara individu ataupun secara organisasi untuk menggalang persatuan, sektoral atau multisektor. Jadi, penting sekali itu untuk membangun persatuan.



TOKOH

Mas Marco Kartodikromo Sang Mimicry Man

Luthfi Adam

Sejak dua tahun yang lalu, pikiran saya tidak teralihkan untuk terus menelusuri jejak seseorang dari masa lalu bernama Mas Marco Kartodikromo. Hasilnya, berbagai monumen sejarah yang muncul ke permukaan sebagai diskursus yang tersebar dari masa ke masa. Sejauh ini, saya belum menemukan teks yang menganalisis atau menceritakan hubungan Mas Marco dengan kajian postkolonialisme. Hal tersebut menambah semangat saya untuk membuat kajian tentang Mas Marco menggunakan perspektif kajian postkolonialisme.

Nama Marco pertama kali saya temukan dalam tetralogi novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer. Di buku ketiga, *Jejak Langkah*, alkisah, Minke sang tokoh utama mempekerjakan seorang tukang pukul yang kemudian diajari menulis untuk suratkabar yang didirikannya *Medan.* Karena keuletan dan semangat belajar yang tinggi, Marco berhasil mengambil hati Minke yang kemudian menjadikannya wartawan *Medan*. Sebelumnya, di suratkabar *Medan* telah bekerja Wardi dan Tjipto, yang kemudian menjadi sahabat Marco. Dikisahkan Pramoedya, Minke dijebloskan ke dalam penjara lantaran ia memuat tulisannya sendiri yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah kolonial. Minke marah, namun nasi sudah menjadi bubur, Minke diasingkan ke Ambon*. Jejak Langkah* berakhir dengan diasingkannya Minke. Nah, di buku keempat, *Rumah Kaca*, Pramoedya meneruskan kisah dengan membalik kacamata. Ia menjadikan seorang intelijen Manado bernama Pangemanann yang diberikan tugas memantau pergerakan tokoh-tokoh pribumi sebagai tokoh utama, tokoh kedua adalah Marco, yang dianggap Pangemanann adalah biang kerusuhan dan pewaris gerakan Minke, Minke kemudian hidup dalam pengawasan Pangemanann, seperti dalam rumah kaca.

Tetralogi Bumi Manusia merupakan sebuah novel fenomenal yang setengah dari isinya merupakan data sejarah. Minke adalah R.M. Tirto Adhi Soerjo, seorang yang kini telah dikenal sebagai “perintis pers Indonesia”, pendiri Sjarikat Prijaji (1906) dan perintis Syarikat Dagang Islamijah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Sarekat Islam. Wardi adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto adalah dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Sedangkan Marco, siapakah Marco?

Nama lengkapnya Mas Marco Kartodikromo, lahir di Cepu, 1890. Anak keluarga priyayi rendahan yang lulus sekolah bumiputera Angka Dua di Bojonegoro kemudian sekolah di sekolah swasta Bumiputera-Belanda di Purworejo (Shiraishi, 1997).

Penjelasan Takashi Shiraishi dalam bukunya *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997)* tentang Marco, mirip dengan apa yang ada dalam novel *Rumah Kaca* karya Pramoedya, terutama tentang kiprah Marco bersama Minke (Tirto Adhi Soerjo) dan juga dalam suratkabar Medan *(Medan Prijaji)*. Shiraishi menerangkan, setelah lulus sekolah bumiputera Belanda tersebut, Mas Marco kemudian bekerja menjadi jurutulis pada Dinas Kehutanan sebagai jurutulis rendah sekitar 1905. Tidak lama kemudian, ia pindah ke Semarang dan menjadi juru tulis di NIS (jawatan perkeretaapian Hindia Belanda), sambil belajar bahasa Belanda dari seorang Belanda. Pada 1911, Mas Marco sempat bekerja sebagai jurnalis magang di *Medan Prijaji*-nya Tirto Adhi Soerjo. Pada 1912, ia hijrah ke Surakarta untuk bergabung dengan suratkabar *Sarotomo* yang merupakan organ resmi *Sjarikat Dagang Islamijah* (yang kemudian berubah menjadi *Sarekat Islam*) sebagai editor dan administrator (Shiraishi, 1997).

Tulis Shiraishi (1997), Marco adalah anggota “kaum muda”, yang diciptakan oleh pendidikan gaya Barat. Marco tidak menempuh pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi yang disediakan bagi pribumi seperti ELS kemudian HBS lalu OSVIA atau STOVIA. Oleh karena itu, Marco dari segi pendidikan masih di bawah pemimpin pergerakan lain seperti Tirto Adhi Soerjo, Tjokroaminoto, dan Soewardi atau Tjipto. Kebolehannya menjadi pemimpin pergerakan karena keuletannya sebagai otodidak. Oleh karena itu, menurut Shiraishi:

> *Segala sesuatu yang berbau Belanda atau Eropa saat itu merupakan lambang kemajuan, dan Marco pada hakikatnya kurang maju dibandingkan dengan pemimpin pergerakan lainnya seperti Tjokroaminoto dan Soewardi. Mungkin "kekalahan" inilah yang membuatnya begitu tergila-gila pada simbol-simbol modernitas dan tampil di depan umum dalam gaya Eropa seperti sinyo, sementara Tjokroaminoto dan Soewardi tetap dalam baju Jawa (Shiraishi, 1997).*

Jika benar dugaan Shiraishi, maka Mas Marco telah melakukan apa yang disebut teoretisi Postkolonialisme, Homi Bhabha sebagai *"mimicry"*. Dalam artikel *"Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse"*, Bhabha menjelaskan *mimicry* sebagai sebuah praktik peniruan dari seorang yang terjajah terhadap penjajah. Peniruan tersebut terjadi karena dalam relasi antara penjajah dan terjajah selalu terdapat ruang yang memungkinkan pihak yang terjajah tidak sepenuhnya berada di bawah kendali si penjajah. Jika penjajah kerap melakukan pensubyeksian melaluli praktik pemberian stereotip, maka bagi si terjajah, selalu ada celah untuk melakukan peniruan terhadap si penjajah. Hubungan ambivalensi ini yang memungkinkan Mas Marco bergaya seperti penjajah, melalui fashion misalnya.

Keberadaan ruang yang memungkinkan terjadinya praktik *mimicry*, terjadi juga karena kesempatan yang dibuka oleh si penjajah. Mas Marco, seperti kata Shiraishi, merupakan "kaum muda" yang dibesarkan dalam semangat modern. Ternyata istilah "kaum muda" ini bukanlah sekedar merujuk pada kategorisasi umur, melainkan semangat yang membedakan dengan kaum sebelumnya.

Istilah "kaum muda" dipopulerkan oleh Abdul Rivai pada 1906 dalam harian *Bintang Hindia* yang ia pimpin (Adam, 2003). Istilah ini muncul dalam semangat jaman yang disebut jaman kemajuan, yang merupakan jargon dari politik etis. Namun, sesungguhnya politik etis sendiri bukanlah sebuah praktik yang sengaja membuka peluang agar pribumi Hindia Belanda dapat menyejajarkan diri dengan kaum kolonial Belanda. Politik etis yang oleh para etisi Belanda diberi jargon "kemajuan menuju modernitas", kata "kemajuan" itu berarti kemajuan kegiatan ekonomi yang telah mengalami reorganisasi, makin tinggi tingkat percepatannya, makin terpusat, namun juga secara ekspansi makin meluas. Usaha menuju kemajuan ini menumbuhkan kebutuhan akan para pegawai yang makin besar. Maka, salah satu praktik yang dilakukan pemerintah kolonial adalah dengan mengajarkan pribumi pendidikan modern. "Kaum muda", adalah kaum yang kemudian mengakses dunia baru ini. Berbagai sekolah dengan kurikulum *ala* Barat didirikan. Yang paling penting adalah penguasaan bahasa Melayu tinggi, sebagai bahasa resmi administrasi. Lulusannya dapat bekerja menjadi karyawan di perusahaan swasta (kaum *particulier*) maupun pemerintah yang biasa disebut *pangreh praja* yang biasanya adalah para priyayi kelas rendah (bergelar Mas). Dua kaum inilah yang kemudian membentuk kelas menengah di jaman etis, yang kemudian menamakan diri mereka dengan sebutan "kaum muda", kaum yang memiliki semangat berbeda dari generasi sebelumnya (Shiraishi, 1997: 37-40).

Praktik memberikan pendidikan modern merupakan sebuah usaha kolonial Hindia Belanda untuk memberikan stereotip baru bagi pribumi Hindia Belanda. Menjadikan pribumi sebagai manusia modern, merupakan kebutuhan bagi pengembangan praktik kolonial itu sendiri. Di sini, bisa kita lihat sebuah praktik di mana penjajah juga memiliki ketergantungan pada si terjajah. Hubungan antara penjajah dan terjajah bersifat *negotiable*; terjajah memiliki posisi tawar pada si penjajah meskipun sifatnya patah-patah, tidak akan sekuat atau melebihi kekuatan kuasa penjajah pada terjajah. Namun, praktik ini membuktikan konsep Homi Bhabha bahwa terdapat hubungan yang ambivalen antara penjajah dan terjajah. Telah terjadi perubahan praktik menjajah yang sebelumnya eksploitatif menjadi kolaboratif.

Dimanakah Mas Marco dalam hingar bingar zaman modern? Mas Marco sebagai bagian dari “kaum muda” memosisikan diri sebagai seorang praktisi jurnalistik. Praktik jurnalistik pada masa itu juga mengalami sebuah perubahan. Dari segi konten, suratkabar menjadi sebuah wahana di mana jargon-jargon kemajuan keluar kandang. Dari segi bisnis, pesatnya pertumbuhan warga yang melek huruf menjadikan suratkabar tumbuh bak jamur di musim hujan. Pasar yang paling mendominasi adalah kaum muda itu sendiri. Abdul Rivai di tahun 1906, lewat *Bintang Hindia*, mengategorikan tiga kelompok orang Hindia pada masa itu, yaitu “orang awam”, “bangsawan usul”, dan “bangsawan pikiran”. “Kaum muda” kemudian bisa dikategorikan sebagai “bangsawan pikiran”, menjadi bangsawan karena prestasinya dalam menguasai pengetahuan (Adam, 2003). Kategori ini merupakan sebuah ejekan pada para bangsawan yang sejak lahir otomatis menjadi bangsawan, karena darahnya yang biru, yang belum tentu mengejar pengetahuan modern. Dan, Rivai sendiri meyakini bahwa kaum bangsawan pikiran inilah yang akan memimpin pribumi Hindia Belanda ke gerbang kemajuan. Jenis bangsawan ini pulalah yang menjadi kaum peniru ulung karena mereka tidak terikat oleh *adapt* secara ketat seperti para bangsawan usul. Maka, bangsawan pikiran ini bukan hanya meniru untuk belajar pendidikan Eropa, namun juga ikut minum lemonade, pergi ke café-café, dan berpakaian layaknya orang Eropa.

Para pelaku di dunia jurnalistik di zaman modern itu hampir dipastikan adalah bangsawan pikiran. Memang ada pula bangsawan usul yang kemudian menjadi jurnalis, seperti Tirto Adhi Soerjo dan Soewardi Soerjaningrat yang bergelas Raden Mas. Namun, alih-alih mereka mengambil keuntungan dari gelar mereka untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan kolonial, para bangsawan usul tersebut malah mendeklarasikan diri sebagai “kaum mardika”. Istilah ini dipopulerkan oleh Tirto Adhi Soerjo ketika ia memelopori gerakan baru dalam praktik jurnalistik, yaitu mendirikan perusahaan suratkabar sendiri yaitu *N.V. Medan Prijaji,* pada 1907. Istilah *kaum mardika* merujuk pada pengertian tentang

kaum yang tidak mencari pendapatan dengan bekerja bagi pemerintah kolonial. Semangat kaum muda dan bangsawan pikiran ini pula yang menggerakan para pemuda di STOVIA untuk mendirikan organisasi Boedi Oetomo pada 1908. Pada perkembangannya, hampir setiap organisasi modern dimotori oleh kaum muda dan bangsawan pikiran. Dan tiap organisasi modern pun pasti memiliki suratkabar sebagai organnya.

Mas Marco berada di ketiga kategori tersebut, sebagai kaum muda, bangsawan pikiran, dan juga kaum mardika. Sebagai seorang otodidak sejati, Mas Marco tidak hanya belajar menjadi jurnalis dari Tirto Adhi Soerjo, namun ia juga memelajari semua hal yang berhubungan dengan dunia modern dari Tirto. Sebagai jurnalis, Mas Marco mewarisi ketajaman pena Tirto. Mas Marco juga melibatkan diri menjadi aktivis Sarekat Islam, organisasi yang juga dipelopori Tirto. Lebih jauh Mas Marco bahkan mewarisi tradisi Tirto sebagai pelopor. Setelah bergabung dengan *Sarotomo*, suratkabar organ Sarekat Islam Surakarta sebagai redaktur, Mas Marco di tahun 1914 mendirikan sebuah perkumpulan wartawan Hindia Belanda yang pertama dengan nama *Inlandsche Journalisten Bond* (IJB). IJB kemudian menerbitkan majalah *Doenia Bergerak* sebagai organnya. Inilah masa Mas Marco sebagai pemimpin pergerakan kaum jurnalis, kaum yang menurut Mas Marco sendiri berada paling depan dalam arena pergerakan, pemimpin pergerakan itu sendiri (Shiraishi, 1997).

Pada saat Mas Marco mendirikan IJB dan menerbitkan *Doenia Bergerak*, zaman seakan-akan memang benar-benar bergerak. Pada awal abad ke 20, zaman modern sudah tidak bisa dibilang lagi zaman etis, namun melampaui zaman etis. Euforia zaman itu, dalam perspektif postkolonialisme, seperti diungkapkan oleh Bill Ashcroft, lebih cocok dikategorikan sebagai jaman *"the empire writes back"*. Zaman ketika si terjajah yang selama ini selalu diberikan stereotip, balik memperbincangkan si penjajah sekaligus memperbincangkan proses keterjajahannya. Artinya, si terjajah pada masa ini telah merasa sadar akan keterjajahannya, dan sadar akan posisi tawar yang makin tinggi.

Sejak 1912, dengan berdirinya Sarekat Islam, yang dipelopori oleh Tirto Adhi Soerjo dan diteruskan oleh H. Samanhoedi dan Tjokroaminoto, istilah zaman pergerakan juga bergerak merasuk dalam benak para cendikiawan-cendikiawan pribumi pada masa itu. Salah satunya adalah keberanian para pemimpin suratkabar menamai suratkabar mereka dengan semangat kemajuan dan pergerakan semisal, *Sinar Hindia, Sinar Djawa, Kaoem Moeda, Bintang Hindia, Bintang Timoer,* dan yang paling mencolok adalah *Doenia Bergerak*. Isi suratkabar juga makin kritis terhadap kondisi kolonial, bahkan sudah cenderung frontal. Dan, Mas Marco jeli melihat kondisi zaman, ia menyaksikan bahwa para jurnalis adalah para pemimpin

pergerakan itu sendiri (Shiraishi, 1997).

Saya melihat posisi jurnalis memang sangat strategis karena mereka memiliki kemampuan mengemukakan pendapat. Seperti kita rasakan bahwa kemampuan menulis berbanding lurus dengan membaca, maka kaum jurnalis adalah kaum yang membaca. Mereka membuka diri ke dalam pengetahuan dan kemudian menyampaikannya kembali kepada publik. Jurnalis pada masa itu ibarat juga pendidik, terutama pendidik bagi kesadaran kondisi zaman. Itulah sebabnya hampir semua pemimpin organisasi modern juga adalah jurnalis. Dan, dalam kondisi tawar yang memuncak itulah, Mas Marco mengumpulkan jurnalis ke dalam sebuah serikat wartawan dan mengundang semua anggotanya untuk menulis di majalah *Doenia Bergerak* sebagai organ IJB.

Bergerak melalui *Doenia Bergerak*

"***Doenia Bergerak***. *Dari Inlandsche Journlisten Bond kita telah terima organnja jang dinamai Doenia Bergerak, keloear satu minggu sekali. Redakturnja toean Marco di Solo President dari itoe I.J.B. buat lid harganja f 1 dan boekan lid f 2 tiga boelan. Isinja karangan yang keras-keras dan penting bagi bumiputera. Kita poedjikan ini bisa pandjang oesianja dan dapet maksoednja"* (Tjahaja Timoer, 11 Februari 1914).

Begitulah *Tjahaja Timoer* mensyukuri kehadiran *Doenia Bergerak*. Isi karangan yang keras memang telah terbukti sejak edisi percontohan *Doenia Bergerak*. Mas Marco menulis dalam pendahuluan edisi tersebut sebagai berikut:

"DOENIA BERGERAK akan menoeroet geraknja doenia. Tetapi kalau doenia kami ini miring alias berat sebelah tentoe kami akan bertereak kepada jang wajib, soepaja ... sebab kami takoet kalau-kalau kita boemi-poetra teroes dilaoetan kesoesahan dan kehinaan [...]
DOENIA BERGERAK akan menjampaikan soearanja kita orang jang kena tindesan fitenahan dan tipoean, tetapi tiada soeka memoat soaranja orang-orang jang soeka main soelap.
DOENIA BERGERAK mentjari daja oepaja, soepaja kita kaoem jounalist mempoenjai Fonds (oeang sediaan) goena menoeloeng anak bininja lid I.J.B. jang terkena persdelict lantaran membela keperloean oemoem.
DOENIA BERGERAK akan menoeloeng lid I.J.B jang terkena bahaja fitenah. Dari itoe kami berseru kepada sekalian Boemi-poetra bangsa: journalisten; patriotten (orang-orang jang tjinta tumpah darahnja dan bangsanja). Toendjanglah kami, ingatlah pepatah belanda TIJD IS GELD (Tempoe itoe oeang)" (*Doenia Bergerak* Edisi Percontohan, 31 Januari 1914).

Mas Marco menjelaskan posisinya dengan begitu gamblang dalam teks di atas. Posisi Mas Marco ada dalam kesadaran tentang hukum yang obyektif, bahwa si terjajah berhak melaporkan ketidakadilan yang menimpanya kepada yang bewajib. Di paragraf terakhir Mas Marco memunculkan kategori yang merupakan sebuah sikap antikolonial yang sangat gamblang: patriotten (orang-orang yang cinta tumpah darahnya dan bangsanya). Namun, sepertinya Mas Marco menikmati posisinya yang hibrid, ia asyik menggunakan kata Belanda seperti *Tijd is Geld* (waktu adalah uang), lengkap dengan kalimat "ingatlah pepatah Belanda". Kalimat tersebut membuat posisi Mas Marco terlihat ada di dua tempat, asyik menggunakan istilah-istilah berbahasa Belanda untuk menyampaikan pesan antikolonial. Apakah benar Mas Marco antikolonial?

Sikap antikolonialisme secara kultural bukan menyangkut perlawanan yang sifatnya revolusioner. Pada masanya, Mas Marco melakukan perlawanan tersebut dengan otonomi kreatif dalam berpendapat dan mengidentifikasi diri. Sebagai contoh, masih dari Edisi Percontohan, Mas Marco memuat surat protes Dr. Rinkes tentang artikel Mas Marco yang dimuat di suratkabar Sarotomo. Surat itu sebetulnya ditujukan kepada H. Samanhoedi sebagai Presiden Sarekat Islam. Sebelumnya, tulisan Mas Marco yang berisi protesnya atas penunjukkan anggota *Welvaart Commisie* (komisi kesejahteraan) yang ia anggap tidak representatif. Dr. Rinkes kemudian menyurati H. Samanhoedi yang isinya menyangkal tuduhan Mas Marco dengan judul *Menjangkal Kekeliroean*:

> [...] *Welvaart commisie itoe terjadi dari beberapa lid, baik bangsa Eropa baik bangsa boemi poetra. Jang diangkat lid itoe semoenja toean-toean jang telah berpoeloeh-poeloeh tahoen tinggal di Hindia dan selamanja dalam pekerdjaannja beramah-tamahan dengan boemi poetera, boleh dikatakan pengetahoeannja banjak, pemeriksaaanja sampai tjukup dan pendapatan dan pikirannja sampai matang. Boekan sekali-kali toean-toean jang belom tahu apa-apa seperti kata "Marco" itoe. Antara lid bangsa Djawa adalah Boepati Demak dan Boepati Serang. Kalau membatja kabar ini teranglah bahwa "Marco" itoe amat keliroe. Siapakah berani mengatakan kedoa boepati itoe tiada sajang kepada ra'jatnya ataoe mengisap darah? Boekankah kedoea bupati itoe telah masjhur namanja tentang kebidjaksanaanja dan kemoerahannja?*[...]

Mas Marco memuat surat tersebut dalam *Doenia Bergerak*, lengkap dengan jawaban dari surat tersebut. Mas Marco memberi judul polemik tersebut *"Marco: Pro of Contra Dr Rinkes".* Di awal tulisan jawaban Mas Marco terhadap surat Dr. Rinkes Mas Marco mempertanyakan pada dirinya sendiri apakah ia harus setuju atau tidak dengan pendapat Dr. Rindes:

sebuah kebingungan untuk bersikap patuh pada penguasa, sekaligus tidak patuh karena penguasa juga sama manusianya seperti dirinya. Lalu, Mas Marco menulis:

Seorang seperti Paduka Tuan Dr. Rinkes, adviseur voor de Inlandsche, zaken, jang sudah dipertjaja oleh Regeering dari hal keadaannia Bumi-putera, sudah tentu beliau:

1. Lebih mengerti, baik dan busuknja nasib kita Bumi-putera dari-pada lain orang.

2. Lebih tjinta kepada kita Bumiputera dari pada lain orang; dan

3. Lebih tjukup pengetahuan beliau dari pada kita Bumi-putera, baik, tentang perkara apa sadja.

Tetapi bagaimanakah keadaannja Marco? Seorang apakah dia?

Marco seorang dari: orang ketjil-stand; tiada pernah mengindjak romah sekolah; kurang lebar pemandangannja; enz. enz.

Meskipun begitu, takdir Tuhan Jang Esa. Marco diberi: dua mata; dua telinga; dua tangan; satu kepala; satu mulut enz. Sebagai orang kebanjakan.

Kedua mata Marco itulah tiada berbeda dengan kedua matanja seorang keluaran Universiteit (sekolah tinggi). Djadi kalau Marco melihat barang berwarna putih, tentu barang itu menampak kemata orang2 jang terpeladjar putih djuga. Begitu seterusnja.

Di sinilah letak momen ketidakpatuhan Mas Marco yang telah mencapai taraf otonom. Stereotip yang diberikan pihak penjajah telah sama sekali tidak bekerja karena Mas Marco justru menganggap dirinya setara dengan Dr. Rinkes sebagai manusia yang punya dua mata, dua telinga, dua tangan, satu kepala dan satu mulut. Juga, Mas Marco tidak menunjukkan kerendahan diri jika ia harus dibandingkan dengan seorang lulusan universitas. Mas Marco merasa ia telah setara secara penguasaan pengetahuan dengan lulusan universitas sekalipun. Mas Marco meneruskan:

Sebagai jang telah saja sebutkan No. diatas bahwa PT Dr. Rinkes lebih tahu tentang nasibnja Bumi-putera dari pada saja. Apakah PT Dr. Rinkes, atau leden dari Welvaartscommissie sudah sama menjaksikan sendiri, bila hidupnja orang2 ketjil didalam kesukaan?Hidup jang bagaimanakah jang dibilang: senang suka; selamat; dan tiada kekurangan suatu pun apa?

Kerapkali saja bertanja orang2 desa, betapakah keadaan hidup mereka itu? Pertanjaan saja itu didjawab oleh orang itu. Orang2 ketjil kebanjakan hidupnja: sehari makan sekali; jang sedik" mam perkara ikan tidak sekali2 dipikirkannja, asal ada garam dan tjabe-rawit sudah tjukup...Apakah kalau manusia hidup serupa itu

dikata: senang dan tiada kekurangan!? Ini pun ta'gampang diketahui.

Sekarang membitjarakan No.2 tersebut diatas, jaitu: P.T. Dr. Rinkes dan sekalian leden Weivaartscommissie terlalu tjinta kepada kita Bumi-putera. Manakah jang lebih ditjintai: badan sendiri atau badannia lain orang!! Saja sangat pertjaja bahwa leden WC. itu djuga tjinta kepada orang2 ketjil, tetapi masih terlalu amat tjinta diri sendiri. Marco pun terlalu tjinta dengan diri sendiri, dari itu dia selalu bertereak sadja, sebab kalau teriaknja itu dikabulkan dia djuga turut enak.

Kalau saja pikir pandjang, leden WC. seakan2 Dokter (doekoen) umpamanja. Tetapi kita orang Bumi-putera, orang2 jang sakit sudah pajah. Siapakah jang lebih keras minta sembuh dari sakit? Dokter (dukun) kah? Atau orang jang sakitkah? Sepandjang pendapatan saja,"tentu sisakit jang amat keras minta hindar dari bahaja itu. Adapun Dokter (doekoen) hanja melakukan semestinja sadja. baik sisakit djadi sembuh baik tidak, itulah tergantung Tuhan punja kuasa, asal Dokter (doekoen) ta' kurang gadjinja tiap2 bulan sudah tjukup.

Lain rupa kalau jang sakit itu badan sendiri dan Dokternja pun diri sendiri.Diatas No. 3 saja berkata bahwa P.T Dr. Rinkes lebih tjukup pengetahuan beliau dari pada lain orang (Bumi-putera). Ini hal tidak perlu saja terangkan lebih pandjang, tentu tuan2 pembatja telah mengerti sendiri.

Tetapi saja berani berkata, bahwa P. T. Dr Rinkes dan leden WC jang berpangkat Regent, tentu sekalian itu kurang – atau boleh djadi tidak pernah bertiampur gaul dengan orang-orang desa (orang-orang kebonjakan). Barangkali leden WC itu hanja tanja sadja kepada prijaji jang berpangkat Wedono kebawah sampai Lurah desa.

Di sini, saya ingin membandingkan teks Mas Marco di atas dengan teks *"Als' Ik Netherlander Was*" (Seandainya Saya Seorang Belanda) yang ditulis Soewardi Soerjaningrat. Soewardi dalam tulisannya mengandaikan diri sebagai seorang Belanda. Meski pesannya adalah sebuah protes terhadap ketidakadilan terhadap praktik penghisapan yang dilakukan penjajah. Soewardi dalam tulisan tersebut masih mengakui adanya ketidaksetaraan antara orang Belanda dan dirinya. Pengandaian "Seandainya saya seorang Belanda", merupakan sebuah protes terhadap praktik kolonial namun tetap mengakui ketidaksetaraan antara dirinya dengan orang Belanda. Antara si terjajah dan si penjajah. Lain hal dengan Mas Marco. Ia dengan lugas berkata bahwa dirinya tidak berbeda dengan orang Belanda, bahkan ia menyejajarkan diri dengan Dr. Rinkes yang memiliki posisi tinggi dalam jabatan kolonial. Bahkan di akhir karangannya, Mas Marco menganggap bahwa para anggota W.C. sama sakitnya dengan *wong cilik.* Jika *wong cilik* sakit karena kapar dan hidup dalam lingkungan tidak sehat, maka para

anggota W.C sakit karena gila hormat dan gila kekayaan.

Bisa dikatakan, selama setahun penerbitan *Doenia Bergerak* berlangsung, isi tulisan yang dimuat mengandung nafas yang sama. Mas Marco kerap memompa semangat itu dengan memberikan catatan kaki yang menyentil dan nakal. Seperti apa yang telah terjadi pada Tirto Adhi Soerjo, dan Tiga Serangkai pendiri *Indische Partij* (Douwess Dekker, Soewardi, dan Tjipto), Mas Marco juga berurusan dengan delik pers gara-gara praktiknya di dunia jurnalistik. Karena beberapa tulisan yang dimuat olehnya di *Doenia Bergerak* Mas Marco di penjara. Berbagai respon muncul setelah Mas Marco masuk bui. Surat kabar memberitakan dengan gencar dan para pemimpin pergerakan melakukan advokasi untuk membebaskan Mas Marco. Advokasi itu berhasil, Mas Marco bebas sebelum waktunya. Sebuah tulisan dari sahabatnya, Soosro Koornio, Redaktur *Saro Tomo*, dalam *Saro Tomo* edisi ekstra untuk menyambut pembebasan Mas Marco mengatakan:

[...] Keloearnja M. Marco dari pendjara jang loear biasa itoe bertegas doea roepa:

A. *pergerakan Hindia merasa keroegian, jang beloem temponja loear, M. Marco soedah dikeloearken. Sebab selama M. Marco di dalem pendjara, boleh dikatakan sebagi menghidoep-hidoepken perasaan tjinta bangsa, nationalitetitsgevoel. Inilah jang di antjas dan diboetoehkan oleh bangsa pergerakan kita. Sebaliknja boleh dikatakan bahwa, pergerakan kita soedah moelai tadjam kekoeatannja, tandjanja dapet mengeloearkan M. Marco dari pendjara. Betoel menoeroet boeni soerat pemerentah , keloearnja M. Marco dari ichtiarnja sendiri, tetapi apakah actienja pergerakan kita itoe bakal disemboenikan sadja?(Saro Tomo,* No. Extra*,* 1916)

Dijebloskannya Mas Marco ke dalam penjara memang membuat geger jaman pergerakan. Semua suratkabar yang bernuansa radikal sama-sama menghidupkan wacana agar Mas Marco dibebaskan. Dalam tulisan Sosro koornio tersebut terdapat kalimat bahwa keberadaan Mas Marco di penjara ternyata menumbuhkan rasa *"nationaliteitsgevoel"*, yaitu perasaan cinta pada Tanah Air. Di penjaranya, Mas Marco membuka ruang tersendiri bahwa bayangan tentang sebuah bangsa hadir karena kesamaan simpati dari sebuah komunitas yang terjajah.

Hal di atas sekaligus mengkritisi konsep nasionalisme yang diungkapkan Benedict Anderson yang melihat adanya suatu kontradiksi mendunia di mana yang dikuasai dan dijajah diundang untuk menjadi satu dengan yang berkuasa. Namun tetap dalam posisi yang tidak setara: kekuasaan terpusat di Barat secara struktural. Lebih cocok mengacu pada konsep Partha chatterjee yang melihat dua model nasionalisme, *pertama*,

nasionalisme sebagai gerakan politis yang menentang negara kolonial, dan *kedua*, nasionalisme sebagai konstruk alami yang memungkinkan terjajah mengemukakan perbedaan dan otonomi mereka. Maka, kemunculan konsep *"nationaliteitsgevoel"* sebagai cikal bakal dari tumbuhnya nasionalisme di Hindia Belanda, merupakan sebuah sikap penentangan terhadap negara kolonial secara politis, mencuat dalam sikap mereka menghadapi kondisi kolonial, sekaligus juga telah ditemukannya sebuah spiritualitas yang masih dalam proses "menjadi". Yang paling jelas kata "pergerakan" itu telah menjadi spiritualitas tersendiri yang membuat pribumi Hindia Belanda berani untuk menyetarakan diri dengan kaum kolonial.



Gambar: Mas Marco terbaring sakit di Boven Digoel ditemani istrinya.

Selanjutnya, Mas Marco tidak pernah berhenti menjadi jurnalis. Ia keluar masuk penjara dengan kasus yang itu-itu saja: berurusan dengan delik pers. Mas Marco tidak berhenti meniru gaya orang Belanda, tetap memakai jas, tetap menggunakan abjad "c" dalam namanya "Marco", namun juga tetap menggunakan gelar "Mas", sebuah nama yang sungguh *hybrid*. Dari namanya kita bisa mengartikan usaha meniru sekaligus mengejek yang dilakukan Mas Marco, seorang priyayi kelas rendahan yang bergaya kebarat-baratan. Bahkan di novelnya, *Student Hidjo*, sang tokoh, Hidjo, dikonstruksi mirip dirinya yang pandai meniru gaya orang Belanda. Di samping kemarahan pemerintah kolonial terhadap tulisan-tulisannya yang terlalu kritis pada zamannya, jangan-jangan sebetulnya sang penjajah hanya malu oleh

seorang priyayi rendahan yang terlalu pandai meniru yang kemudian terasa mengolok-olok harga diri sang penjajah? *Mimicry* menjadi *mockery*.

Akhir hayat Mas Marco dihabiskan di Boven Digoel, tempat pengasingan para pemimpin *Partij Komunism Indische,* yang melawan pada 1926. Mas Marco ikut menjadi bagian dari gerakan itu, yang membuatnya menjadi lengkap sebagai antikolonialis yang kultural, politis, sekaligus radikal.

Daftar Referensi

Adam, Ahmat. 2003. Sejarah *Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
Bhabha, Homi. 1984. *"Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse"*
Loomba, Aniaa. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926.* Jakarta: Pustaka Grafiti.
Toer, Pramoedya Ananta. 2003. Sang Pemula, Jakarta: Lentera Dipantara.
______________________ . 2001. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra
______________________ . 2001. Rumah Kaca. Jakarta: Hasta Mitra

Surat kabar:

Doenia Bergerak edisi percontohan, 31 Januari 1914.
Saro Tomo, No. Extra, 1916.
Tjahaja Timoer, 11 Februari 1914



Supercapitalism The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life

Penulis: Robert B. Reich
Tebal Buku: 272 halaman
Bahasa: Inggris
Ukuran: 17 x 24 x 3 cm
ISBN: 978-0-307-26561-6 (2007)
Penerbit: Alfred A. Knopf

Tinjauan Buku

Yasmine MS Soraya

Bagaimana hubungan antara kapitalisme dan demokrasi? Bagaimana pula hubungan di antara keduanya memengaruhi perilaku manusia modern? Dan apa pula dampaknya bagi kita yang tinggal di Negara Dunia Ketiga?
Merenungi pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu kiranya kita membaca buku "Supercapitalism" yang ditulis oleh Robert B. Reich. Bukan untuk langsung menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Melainkan untuk menjadi bahan awal yang dapat kita jadikan pijakan jika hendak mencermati perkembangan kondisi sosial-politik global, serta pengaruhnya bagi negara Indonesia.

Robert B. Reich adalah seorang profesor Kebijakan Publik (*Public Policy*) di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Ia pernah bertugas sebagai sekretaris bidang perburuhan pada pemerintahan President Bill Clinton. Ia melawan *sweatshop* di Amerika dan buruh anak ilegal di seluruh dunia. Ia juga berperan dalam menaikan upah minimum, dana pensiun dan jaminan pekerjaan. Pada 2003, Reich mendapatkan penghargaan dari Václav Havel Foundation atas kontribusi kerjanya dan memelopori pemikiran dalam bidang ekonomi sosial. Robert B. Reich sangat aktif dalam menulis. Buku *Supercapitalism* ini adalah buku ke-11 hasil karyanya.

Secara umum, di dalam buku ini, Reich mencoba menguraikan permasalahan mengenai hubungan demokrasi dan kapitalisme saat ini – dalam konteks Amerika Serikat. Dalil utama buku ini adalah,

perkembangan kapitalisme berjalan seiring dengan perkembangan jaman. Kapitalisme dan demokrasi di Amerika Serikat pernah memiliki masa emas pada 1945 hingga 1970-an. Pada masa itu, pengusaha, buruh dan negara dianggap dapat berjalan beriringan dengan adanya kontrak sosial dan masing-masing pihak memiliki suara dalam memengaruhi perekonomian. Hal ini terjadi, karena pada masa itu teknologi belum berkembang seperti sekarang. Contohnya, pada masa itu hanya terdapat tiga perusahaan pembuat mobil di Amerika dan satu bank serta kekuatan masih berada di tangan rakyat.

Jaman telah berganti. Pada akhir abad 20, dengan adanya persaingan yang tinggi dan inovasi serta integrasi global, apa yang dikenal sebagai “kapitalisme” berubah menjadi “kapitalisme global.” Lalu seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, dan dunia menjadi seakan tanpa batas, “kapitalisme global” pun berubah menjadi makhluk ganas tak terkendali yang diberi nama oleh si penulis sebagai “superkapitalisme.”

Buku yang memiliki enam bab ini memaparkan dengan jelas garis besar permasalahan “superkapitalisme” dari perspektif sejarah. Dengan dukungan berbagai data, grafik serta contoh-contoh nyata yang diperoleh Reich dari data lapangan, buku ini memaparkan konsekuensi-konsekuensi “superkapitalisme” yang terjadi di Amerika.

Pada bab 1 buku ini, Reich mendalilkan bahwa Demokrasi Kapitalisme pada era 1945-1970 (di Amerika) merupakan aturan negosiasi yang rumit dan berkesinambungan antara para pemainnya seperti pengusaha dan buruh, atau pun agen dan legislator (parlemen). Konsekuensi penting yang terjadi dalam masa ini, yaitu; *pertama*, skala ekonomi yang besar, produktivitas yang tinggi dan keuntungan yang meningkat, *kedua* pekerjaan yang bersifat tetap, *ketiga* distribusi keuntungan yang besar (juga terhadap pekerja kerah biru hingga petani dan komunitas kecil lainnya), *keempat* konsumen yang membeli barang dan menggunakan pelayanan berjumlah jutaan sehingga menstabilisasikan ekonomi yang juga memiliki skala produksi yang besar. Hasilnya, pada masa itu, adalah meningkatnya jumlah kelas menengah di seluruh negeri, dan sistem politik yang stabil.

Pada masa itu, konsumen memang tidak menerima produk yang termurah dan kualitas terbaik. Pemegang saham dianggap “pasif dan figur yang memiliki tidak banyak fungsi”. Saham perdagangan

hanya berjumlah 3 juta pada awal 1960-an dan tidak melebihi 10 juta pada 1970. Inovasi teknologi berjalan lambat dan hanya terdapat beberapa perusahaan besar. Meskipun begitu, masyarakat lebih menikmati keamanan dan stabilitas, dan juga pendapatan terbesar yang pernah mereka dapatkan seperti upah jam kerja yang terus meningkat hingga akhir 1970. Dalam ketenangan sosial yang terlindungi ini, kelas menengah pun dapat memberikan suara seperti dalam asuransi kesehatan untuk para pensiun dan dalam perlindungan lingkungan.

Pada bab 2 buku ini, Reich mengajak kita untuk mengikuti jalan menuju "superkapitalisme". Apa sebenarnya yang dimaksud dengan "superkapitalisme"? Reich menjelaskan bahwa "superkapitalisme" ialah di mana kekuatan sosial ekonomi saat ini berada di tangan para konsumen dan investor. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, para konsumen dan investor dapat mengakses dan memiliki pilihan yang lebih banyak dari sebelumnya. Mereka dapat memilih serta memutuskan pilihan berdasarkan penawaran terbaik. Oleh karenanya, persaingan antarperusahaan menjadi lebih tinggi. Mereka harus memberikan daya tarik ekstra untuk produk mereka. Ini berarti: produk yang lebih murah, lebih baik dan tinggi manfaat. Dan, untuk mewujudkan produk tersebut, perusahaan mesti memotong biaya produksi. Caranya, dengan mengganti biaya buruh dan transpor dengan hasil teknologi. Itu sebabnya, Reich tidak menyalahkan perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility* -CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut hanya memenuhi tuntutan konsumen dan mereka telah melakukan usaha sesuai hukum dan peraturan.

Di lain pihak, dampak negatif dari "superkapitalisme" ini semakin beragam: ketidakstabilan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan, tidak adanya jaminan pekerjaan (*job security)*, serta penyediaan pelayanan dan produk yang berlebihan, dan yang terutama: pelanggaran terhadap hak manusia, khususnya hak pekerja.

Reich mengungkapkan bahwa pada 1950-an masyarakat percaya pada pemerintah. Tetapi, sekarang masyarakat percaya bahwa pemerintah bergerak sesuai dengan kepentingan suatu pihak: tidak mendengarkan suara rakyat lagi. Demokrasi digambarkan sekarat. Lima puluh tahun lalu, serikat buruh berjumlah 35 persen dan sekarang hanyalah 8 persen. Pada 1945-1970 demokrasi berjalan dan berkembang. Tetapi sekarang, kapitalisme berkembang pesat

dan demokrasi menurun. Saat ini, suara konsumen dan investor adalah suara yang paling didengar.

Pada bab 3, Reich memaparkan bagaimana posisi kita sebagai konsumen dan investor juga sebagai masyarakat. Sebagai konsumen dan investor, kita tentu senang mendapatkan barang terbaik dengan harga murah. Tetapi sebagai masyarakat yang peduli, kita tidak setuju akan adanya *outsourcing*, pemutusan hubungan kerja (PHK), perusakan lingkungan yang menyebabkan *global warming*, ketidakpastian kerja dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat yang peduli, kita menuntut agar perusahaan berbuat sesuatu yang lebih baik, tetapi sebagai konsumen dan investor kita senang dengan tawaran terbaik. Reich mengambil contoh kasus perusahaan besar Amerika, Wal Mart. Perusahaan ini hanya membayar upah buruh $10 dollar per jam (upah tersebut amat minim sekali!). Sehingga sangat tidak mungkin terbentuk kelas menengah yang kuat di Amerika. Hal ini dilakukan Wal Mart untuk menekan biaya produksi, sehingga barang yang dijual pun menjadi murah dan konsumen berlomba-lomba untuk membelinya.

Posisi kita di satu sisi sebagai konsumen dan investor, namun di lain pihak sebagai masyarakat yang kritis membuat kita bingung: apa mau kita. Maka dari itu, “superkapitalisme” pun berjaya dan kekuatan kita sebagai masyarakat pun berkurang dan demokrasi terkikis.

Pada bab 4 serta bab 5, Reich menjelaskan hubungan demokrasi, “superkapitalisme” dan politik. Reich menekankan bahwa perusahaan-perusahaan dalam masa “superkapitalisme” ini tidak hanya meningkatkan produktivitas - seperti yang dulu mereka tempuh dalam memenangkan persaingan memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi sekarang, mereka juga melakukan lobi terhadap pemerintah. Dahulu, sekitar tujuh ribu pelobi di pemerintahan, namun pada 1990-an menjadi 38.000 tukang lobi. Jumlah ini tidak termasuk pengacara yang mewakili perusahaan! Bahkan, kini juga, terdapat enam organisasi serikat buruh yang melobi – terlepas mereka ini serikat kuning atau merah.

Dari sini, Reich mendalilkan bahwa terlalu banyak campur tangan perusahaan dalam politik dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan banyaknya urusan lobi-melobi dalam pembuatan suatu peraturan, pemerintah tidak lagi mengindahkan suara masyarakat – melainkan lebih mendengarkan kepentingan kelompok bisnis.

Pada bab 6, Reich memberikan kesimpulan dan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasi adalah mengenai bagaimana menguatkan masyarakat dan demokrasi saat ini karena banyaknya masalah seperti kesehatan, global warming dan lain sebagainya. Reich memberikan usul, yaitu perusahaan bukanlah manusia, maka seharusnya dan tidak boleh memiliki peranan politik atau campur tangan dalam politik. Dan, bila seorang kandidat politikus mendapatkan dana kampanye, seharusnya tidak dipengaruhi oleh siapa yang menjadi penyumbangnya. Maksudnya, agar perusahaan tidak memiliki suara dan pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Reich mengungkapkan kekhawatirannya bahwa serikat buruh akan terus berkurang dan tidak akan berkembang di masa yang akan datang. Banyaknya buruh yang di-PHK karena perkembangan teknologi membuat serikat buruh pun hancur. Persentase buruh yang berserikat sangat kecil sekali. Hal ini berarti, kekuatan tawar menawar buruh menjadi semakin kecil – dibanding suara kelompok bisnis yang semakin kuat, - sehingga upah pun semakin kecil dan rakyat tidak akan memiliki suara lagi. Reich menekankan bahwa apabila sejak saat ini serikat buruh diperkuat maka kemungkinan besar demokrasi masih bisa terselamatkan. Para pekerja dari industri yang tidak rentan PHK (misal, industri ritel, restoran, hotel, rumah sakit, *child care*, perawatan manula dan sebagainya) kebanyakan tidak berserikat. Maka dari itu, para pekerja tersebut harus turut bergabung secepatnya dalam serikat. Dengan banyaknya buruh yang berserikat, maka suara masyarakat masih dapat didengar dan upah meningkat (upah buruh yang berserikat saat ini lebih tinggi dari upah buruh yang tak berserikat). Kita pun masih bisa menekan pemerintah untuk membuat peraturan yang seimbang.

Negara-negara lain pun tidak lepas dari ancaman dan memiliki kemungkinan terkena dampak "superkapitalisme" ini. Maka dari itu, buku ini sangat disarankan untuk dibaca agar kita, masyarakat, dapat belajar dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai dampak perkembangan jaman, khususnya dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Membaca buku "Supercapitalism" dapat kita rasakan suatu ketidakpuasan atas pasar serta politik di dalam negeri Amerika sendiri. Dari sudut kepentingan buruh di Indonesia, setidaknya kita mendapatkan masukan; *pertama*, serikat buruh di Indonesia perlu mempelajari persoalan ekonomi global yang terjadi. Karena

persoalan ekonomi ini memiliki dampak besar bagi persoalan buruh sehari-hari seperti menurunnya jumlah anggota, maraknya subkontrak atau *outsourcing*, tertundanya jaminan sosial dan lain sebagainya. Buku ini menjembatani buruh untuk mengerti keadaan ekonomi sosial saat ini. *Kedua,* buku ini sempat menyebutkan Indonesia menggunakan tenaga kerja anak untuk menghasilkan produk murah. Secara tidak langsung Reich menjelaskan bahwa negara berkembang adalah negara yang paling sakit dalam menerima dampak "superkapitalisme." *Ketiga,* buku ini disajikan dengan data dan bukti-bukti ilmiah, yang Reich dapatkan selama ia menjabat dalam pemerintahan. Maka, kita dapat percaya dan melihat betapa buruknya sistem ekonomi dan politik di Amerika saat ini. Hal ini dapat menjadi cermin bagi kita soal pengaruh kekuatan global dalam penyusunan kebijakan di Indonesia.

Dinamika Perburuhan Semester I 2010

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping sembilan media massa nasional dan sebelas media massa lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrot TV News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), juga buletin, majalah, dan jurnal perburuhan yang diterbitkan oleh serikat buruh maupun organisasi nonpemerintah (ornop). Juga, dilengkapi dan diperkuat dengan temuan-temuan lapangan dan laporan dari serikat. DINAMIKA diharapkan dapat memotret dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa perburuhan serta melakukan analisis penguatan serikat buruh. Analisis menyoroti dua dimensi, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami

Pendahuluan

SELAMA SEMESTER I 2010, banyak peristiwa yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan buruh. Peristiwa-peristiwa tersebut terekam dengan baik oleh media massa maupun di dokumen-dokumen serikat buruh. Di antara sekian peristiwa yang menonjol selama Semester I 2010, setidaknya ada empat peristiwa yang patut dicermati, yakni: 1) Implementasi perdagangan bebas (FTA) di kawasan Negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan China, AC-FTA. 2) Aksi protes 100 Hari-nya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 3) Aksi protes Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, dan 4) Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal Juli 2010.

Peristiwa-peristiwa tersebut berjalin kelindan: antara kebijakan ekonomi-politik dengan tingkat penghidupan buruh. Sejauh mana kebijakan pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Serta bagaimana serikat buruh mencari jalan keluar memperjuangkan kepentingan sosial dan ekonomi anggotanya. Pendekatan terhadap persoalan-persoalan di atas tidak murni hukum perburuhan.

Keempat peristiwa di atas, dianggap mewakili keseluruhan kejadian selama semester I 2010. Poin 1 dan 4 memperlihatkan bagaimana corak kebijakan ekonomi politik Pemerintahan SBY setelah terpilih untuk kedua kalinya, yang berada di landasan perdagangan bebas. Perdagangan bebas alias liberasi ekonomi, oleh para pemegang kebijakan, semakin diyakini sebagai jalan keluar keterpurukan ekonomi bangsa akibat krisis 1997/1998 dan krisis keuangan global 2008. ***

PADA 25 MEI 2010, melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), Pemerintah “berkomitmen” untuk menurunkan angka pengangguran hingga 5-6 persen dan kemiskinan sampai 8-10 persen. Ijin-ijin usaha untuk investasi pun dipermudah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dengan nilai investasi 2.000 triliun per tahun (ekon.go.id, 06/08/2010). Melalui peraturan tersebut, baik investor lokal maupun asing memiliki kepastian hukum. “Investor dari ASEAN diberikan kelonggaran dalam kepemilikan saham melebihi investor asing lainnya. Misalnya dalam sektor perhubungan di bidang usaha bongkar muat barang, investor dari ASEAN diperbolehkan memiliki saham asing maksimal 60%, sedangkan investor asing lainnya hanya 49%," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan (ceriwis.us, 10/06/2010). Perbedaan perlakuan itu

sebagai konsistensi pemerintah menjalankan kesepakatan-kesepakatan dengan Negara Asia.

Perangkat kebijakan di atas, memiliki keterkaitan pula dengan pengesahan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, September 2009 lalu. KEK menjanjikan pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan dalam memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor dengan penyederhanaan proses bisnis, jaminan ketertiban dan keamanan termasuk fasilitas keringanan fiskal. Bentuk fasilitas fiskal antara lain seperti pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada investor dalam waktu tertentu, keringanan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dikenakan PPN termasuk untuk pajak penjualan barang mewah (PPn BM), tidak dikenakan PPh impor dan lain-lain. KEK adalah lumbung untuk para investor menanamkan modalnya.

Jumlah investasi, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 1990 hingga 2009 melesat tajam. Pada 2009, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya mencapai Rp 37.799,8 miliar dari total proyek 248, tapi proyek Modal Asing (PMA) terus membesar (1.221) dengan nilai investasi hanya Rp 10.815,2 miliar. Perhatikan dengan keadaan 1990, di mana jumlah proyek PMDN mencapai 253 dengan investasi Rp 2.398,6 miliar, lebih besar dibanding proyek PMA yang hanya mencapai 100 proyek dengan nilai investasi Rp 706,0 miliar. Ini memperlihatkan, proyek-proyek yang dibiayai modal dalam negeri hanya naik beberap digit, sementara proyek-proyek asing terus membengkak. Hasil-hasil dari penanaman modal tecermin dalam aktivitas perdagangan luar negeri (ekspor-impor).

Indonesia, pada Januari-Mei 2010 telah mengekspor senilai US$ 60,10 miliar atau meningkat 47,68 persen dari 2009. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$ 48,93 miliar atau meningkat 39,93 persen. Ekspor nonmigas terbesar dilakukan ke Jepang, kemudian ke Amerika Serikat dan ke Uni Eropa. Impor migas dan nonmigas, Januari-Mei 2010, mencapai US$ 51,25 miliar atau meningkat 53,26 persen daripada 2009. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal dari China, Jepang, Singapura, ASEAN dan Uni Eropa. Tercatat, impor mesin/peralatan mekanik merupakan terbesar sampai Mei 2010 (BPS, 1 Juli 2010).

Aktivitas ekspor dan impor, setidaknya, dapat dikatakan proses produksi di perusahaan-perusahaan, khususnya eksportir terus berjalan. Dengan kegiatan impor menegaskan, Indonesia memproduksi barang-barang untuk diekspor lagi. Jika hipotesis di atas dipertahankan, agak sulit membenarkan suara sumbang; perusahaan sedang merugi, perusahaan

sedang menurunkan kapasitas produksi dan kemudian melakukan PHK atau menurunkan upah.

Sementara itu, poin 2 dan 3 memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebijakan ekonomi-politik tersebut. “Serikat-serikat semakin berani mengikat persatuan dan mengenyampingkan bendera masing-masing,” ujar Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Ridwan Manoarfa kepada Jurnal Sedane. Tampak, yang dirugikan dengan kebijakan negara mendorong kesadaran untuk bersatu dan berlawan. Serikat-serikat pun semakin cakap dalam mengambil bentuk-bentuk perlawanan. Bagaimana dan apa saja tuntutan serikat selama semester I 2010, akan diuraikan di bawah.

Upah dan Pemiskinan

KENAIKAN UPAH 2010 berkisar antara 2-14 persen atau rata-rata 6,19 persen dari upah 2009. Sebagian ada yang sesuai dengan 46 komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Dan, ada pula yang hanya belum mencapai KHL. “Beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat telah KHL. Tahun depan (2011) harus ada kenaikan lagi hingga 15-20 persen,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat (DPD SPN).

Upah tertinggi terdapat di Papua (Rp 1.316.500) kemudian Aceh 1.300.000, sementara yang terendah diratapi Jawa Timur (Rp 630.000) dan Jawa Tengah (Rp 660.000).

Pada 2010, Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan upah minimum provinsi (UMP). Serupa dengan itu, adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena itu, pengupahan diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. “Di Provinsi hanya mengkaji, menilai dan menetapkan upah yang telah diajukan oleh kota/kabupaten,” ujar Iwan. Ketika ditanyakan mengapa tidak menggunakan UMP. Iwan mengatakan, “UMP kerap dijadikan justifikasi oleh perusahaan-perusahaan nakal untuk menekan upah.” Hal senada diungkapkan Ridwan Minoarfa, keputusan gubernur biasanya menegasikan apa yang telah diajukan oleh dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kota.

Upah minimum merupakan batas minimum pengupahan yang hanya berlaku bagi buruh lajang yang bekerja kurang dari 1 tahun. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil survei dewan pengupahan kota/kabupaten, keadaan perekonomian dan keadaan inflasi di daerah. Dengan demikian, serikat buruh yang berada di dewan

pengupahan dituntut bekerja maksimal. Di tingkat perusahaan, serikat buruh pun harus memperjuangkan kenaikan upah yang lebih baik dari UMK.

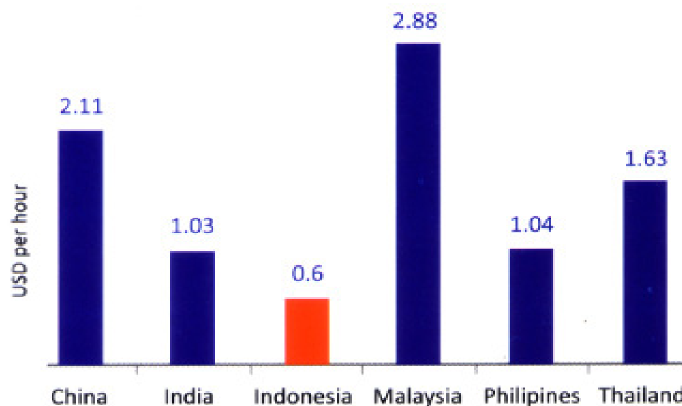
Di alam fleksibelisasi tenaga kerja, upah minimum dianggap sebagai biang kerok kakunya pasar kerja. Rejim fleksibelisasi mengharapkan, tidak perlu ada upah minimum. “Menentukan upah secara bipartit telah dituangkan jauh-jauh hari melalui Peraturan Bersama Empat Menteri (PB Empat Menteri Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global),” ujar Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi-KASBI) Khamid Istakhori. Menurut Khamid, ada klasul-klausul dalam peraturan tersebut untuk meliberalkan sistem pengupahan.

Selain jaringan pengaman, upah minimum diperlukan untuk mengantisipasi absennya kekuatan serikat buruh di tingkat daerah. Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan bahwa ketiadaan upah minimum provinsi akan merugikan kota/kabupaten yang serikat buruhnya lemah. “Dengan lemahnya serikat buruh di Sukabumi, maka dengan mudah upah ditekan,” ujar Rudi. Di Jawa Barat, upah tertinggi di tempat oleh Kabupaten Bekasi Rp 1.300.000 (UMKU I) sementara yang terendah ditempat Kabupaten Sukabumi Rp 671.500. Belakangan tersiar kabar bahwa Sukabumi merupakan tempat pelarian perusahaan-perusahaan di daerah daerah lain. Bahkan beberapa perusahaan multinasional semisal Danone Aqua Group bertengger di Sukabumi.

Pada akhirnya, besar dan kecil upah memperlihatkan sejauh mana kekuatan tawar serikat buruh dalam berunding di dewan pengupahan maupun di tingkat perusahaan. Sejauh mana keseriusan serikat buruh memperjuangkan upah. “Pengalaman kami menunjukkan bahwa tidak semua serikat buruh memiliki niatan baik untuk memperjuangkan kenaikan upah di dewan pengupahan,” ujar Khamid Istakhori. Khamid menegaskan bahwa anggota-anggota dewan pengupahan kerap tidak melakukan proses survei upah dengan jujur. Akibatnya, jaring pengaman buruh pun hanya sebatas memenuhi ketentuan normatif. Di level perusahaan, upah minimum kerap dijadikan batas maksimum dan berlaku untuk semua buruh yang bekerja di atas 1 tahun.

***

PADA 2009, TINGKAT UPAH DI INDONESIA merupakan yang paling rendah dibanding India, China, Malaysia, Filipina dan Thailand. Upah yang paling rendah itu masih saja dikritik sebagai penyebab larinya



Sumber: BKPM

investor alias *kudu* diturunkan lagi. Para investor bukan hanya mengkritik nilai upah yang sudah rendah itu. Juga, tidak menyukai sistem pengupahan yang tidak ramah pasar.

Grafik di atas, terdapat di situs resmi BKPM dengan keterangan, "Upah buruh di pusat-pusat urban masih relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan pusat urban yang telah menarik banyak investasi seperti di China dan India." Tampak, bahwa upah rendah merupakan alat promosi pemerintah untuk menarik investor. Atas nama investasi, bisa saja dimaknai, Pemerintah Indonesia memang mendoakan agar buruh Indonesia tetap berpenghasilan rendah dan dalam kubangan kemiskinan.

Pemiskinan di kalangan buruh diperparah dengan ragam kebijakan negara yang merampas buah keringat orang-orang yang bekerja. Di antara kebijakan itu, seperti dinyatakan GSBI dalam infogsbi.blogspopt.com, upah buruh harus rela rampas oleh kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) 21 dan iuran jaminan sosial tenaga kerja. Total, seorang buruh lajang tiap bulannya mengalami pengurangan upah sebesar 9,34 persen dan 12,24 persen bagi buruh yang berkeluarga. Hal ini kontras dengan kebijakan terhadap investasi yang diberikan berbagai fasilitas.

Sejauh mana kenaikan upah 2010 mampu menyesuaikan dengan keadaan harga? Inflasi, selama semester I 2010, merata di tiap kota (2,42 persen). Inflasi didonasi oleh kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan (BPS, Juli 2010). Bank Indonesia menyebutkan, meskipun ada perbaikan di sektor perekonomian, inflasi tetap tinggi (LKM Triwulan II-2010, Juli 2010). Artinya, kenaikan upah 2010, tidak sebanding dengan tingkat harga yang terus melonjak. Dengan kata lain, meskipun upah nominal terus meningkat, upah riil terus menurun.

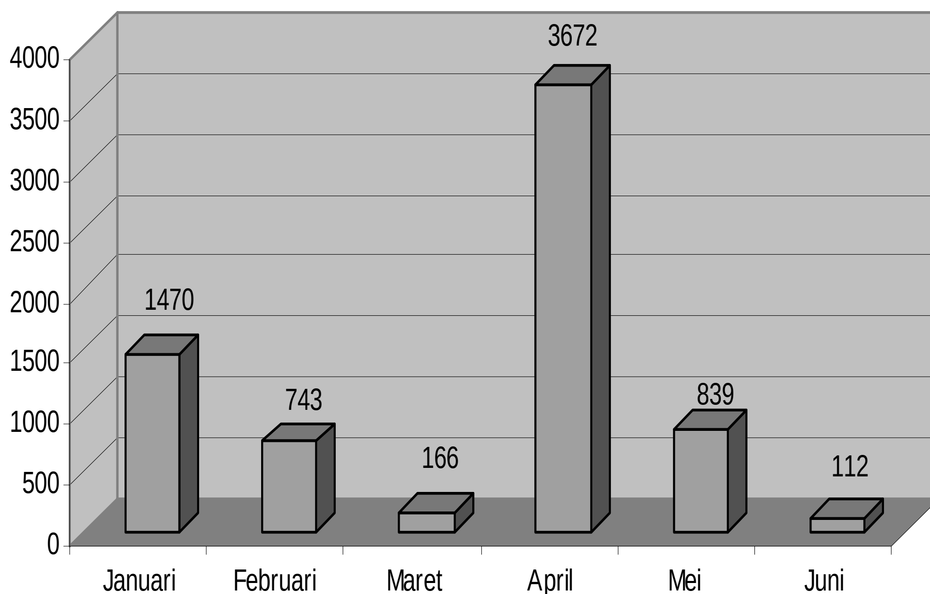
Dalam beberapa kasus, rendahnya upah merupakan salah satu penyebab melemahnya daya tahan buruh mempertahankan hak atas pekerjaan. “Saya punya keluarga, saya *ga* punya simpanan. Jadi, saya terima *aja* pesangon dari pengusaha,” ungkapan seorang buruh di Bekasi yang di-PHK awal Juni 2010. Besarnya beban yang ditanggung buruh maupun keluarga buruh, semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK tanpa perlawanan.

Hal tersebut diperparah dengan mekanisme hukum perburuhan. Pengadilan Hubungan Industrial, tidak semanis kredonya: cepat, adil dan murah. Setiap orang yang mempersoalkan kasus PHK, bukan hanya memakan waktu bulanan. Masa “penantian” itu yang menyedot tenaga, pikiran dan keuangan. Biasanya, di tengah perjalanan itu, berbagai siasati perusahaan yang berbau pemenuhan kebutuhan domestik dengan mudah menerpa militansi sang pejuang. Bukan hanya sistem hukum yang melemahkan buruh, namun deraan sosial terus menghantam buruh dari berbagai segi.

Inflasi adalah cermin tidak terprediksinya kenaikan harga. Semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Privatisasi dan pencabutan subsidi, semisal kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik merupakan biang kerok meningkatnya pengeluaran buruh. Kenaikan tarif dasar listrik atau dikuranginya subsidi untuk kebutuhan listrik mengerek kenaikan harga. Pun dengan privatisasi badan-badan pendidikan, kocek yang harus dikeluarkan keluarga buruh lebih besar daripada upah yang diterima. Tidak berlebihan jika beragam penelitian soal upah menyimpulkan, tingkat penghasilan buruh operator hanya mampu menutupi setengahnya kebutuhan hidup.

Pemecatan dan Pemberangusan Serikat

- Selama semester I 2010, tercatat angka PHK mencapai 7.002 orang. PHK tertinggi dialami oleh sektor Tekstik, Sandang dan Kulit (62 persen), menyusul Transportasi dan Komunikasi (18 persen), Perdagangan, Umum dan Jasa (6 persen), Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) (3 persen), Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) (2 persen), Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) (1 Persen).
- Angka PHK semester I 2010 lebih kecil dibanding semester I 2009. Semester I 2009 maupun semester I 2010, angka PHK terbesar sama-sama berasal dari sektor TSK. PHK tertinggi terjadi pada April dan terendah pada Juni 2010.
- Alasan-alasan PHK masih seputar dampak krisis keuangan global dan dampak implementasi perdagangan bebas, khususnya dengan China (ACFTA). Ada pula perusahaan yang sedang melakukan efisiensi, merger maupun akibat perpindahan kepemilikan saham. Namun, banyak pula PHK tanpa disertai alasan jelas.
- Di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PHK dilakukan dengan alasan restrukturisasi dan revitalisasi, melalui program pensiun dini.
- PHK semester I 2010, memiliki kecenderungan yang sama dengan semester I dan II 2009, yakni menyukseskan fleksibelisasi tenaga kerja dan membatasi peranan serikat.



Dari berbagai sumber diolah oleh Pusat Data dan Informasi LIPS

GRAFIK JUMLAH BURUH TER-PHK MEMPERLIHATKAN fluktuasi PHK baik di perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Sektor-sektor yang disoroti adalah Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK), Komunikasi dan Transportasi, Perdagangan, Umum dan Jasa, Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP), Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), Logam, Elektonik dan Mesin (LEM), Perkayuan dan kehutanan (Kahut), Pertanian dan Perkebunan, Asuransi dan Keuangan, Listrik, Air dan Gas, Farmasi dan Kesehatan, Pendidikan, Percetakan dan Penerbitan, Media Massa, Pelayanan Publik, serta Konstruksi.

Kasus PHK semester I 2010 mencapai 32 dengan total korban 7.002 orang. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) memperkirakan bahwa angka riil PHK bisa lebih besar. Sebab, ada pula buruh-buruh yang di-PHK dengan individual, namun tidak tertulis di media massa.

Beberapa perusahaan mengatakan masih mengalami kerugian akibat dampak krisis keuangan global dan perusahaan melakukan efisiensi. Selain itu ada pula perusahaan yang berkebaratan dengan kenaikan tarif dasar listrik, gas dan implementasi ACFTA.

Di sebuah perusahaan outsole sepatu Adidas, PT Framas Plastic Technology, PHK terus bergulir. Perusahaan mengaku sedang melakukan efisiensi.

PT Framas Plastic Technology, berdiri pada 1994 di Bekasi Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan cabang dari Framas Global, Jerman. PT Framas memiliki keterkaitan dengan PT Nikomas Gemilang di Serang dan PT Panarub di Tangerang. Sejak 2006, PT Framas terus mengurangi tenaga kerjanya dari 15.000 orang menjadi 700 orang ada 2009. Buruh-buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun hanya menerima upah ± Rp 1.300.000. Buruh bagian operator diwajibkan menggunakan sepatu pengaman, yang harus dibeli sendiri. Pada 2007, ketua serikatnya di-PHK dengan alasan tidak jelas. Pada 2008, sekitar 12 orang buruh perempuan di-PHK akibat menuntut perbaikan kondisi kerja. Pada 2010, beberapa orang yang vokal di serikat didemosi ke bagian cleaning service. Informasi sementara mengatakan, perusahaan terus melakukan perekrutan tenaga kerja baru dari perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing).

Saat ini, meskipun tidak ada jawaban dari pemerintah, beberapa buruh yang masih aktif di PT Framas Plastic Technology terus melakukan perlawanan.

Di perusahaan-perusahaan negara (BUMN) PHK dilakukan dengan dalih restrukturisasi, revitalisasi dan kerugian perusahaan. Di antaranya adalah PHK terhadap 900 buruh PT PAL Indonesia (Persero), melalui program pensiun dini, Maret 2010. Perusahaan mengaku sedang melakukan restrukturisasi dan revitalisasi. PT PAL adalah perusahaan kapal plat merah untuk pasar dalam dan luar negeri. (kompas.com, 16/02/2010)

Alasan lain adalah akibat diokupasinya perusahaan oleh pemilik lain. Seperti yang terjadi di koran *Berita Kota*. Pada Januari 2010, 144 pekerja *Berita Kota* di-PHK akibat perpindahan kepemilikan saham: dari PT Penamas Pewarta ke PT Metrogema Media Nusantara (salah satu anak perusahaan Kompas Gramedia Group). Praktik serupa terjadi pula di harian Suara Pembaharuan, Harian Investor Daily, dan Jakarta Globe (Tempointeraktif.com. 29/01/2010). Juga di Indosiar dan Televisi Pendidikan Indonesia.

Sementara itu, praktik kerja kontrak dan *outsourcing* tidak hanya di perusahaan swasta dan BUMN, lembaga-lembaga pemerintahan pun mulai menerapkannya. Melalui PP No 43 dan PP No 48/2005 tentang Pembatasan Penerimaan Pegawai Honorer di Lingkungan Kantor Pemerintah, pemerintah memilik legitimasi untuk merekrut tenaga kerja dari pihak ketiga. Status pekerja ini dengan mudah dihabisi, seperti yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada 600 tenaga honorer.

***

PHK semester I 2010 tampak menurun terhadap semester I dan II 2009. Jika saja benar, tentu saja ini merupakan kabar baik. Angka pengangguran, menurut BPS, hingga Mei 2010 mencapai 8,59 juta orang menurun dari angka 8,96 juta (Desember 2009) dari 116 juta orang total angkatan kerja. Dari angka tersebut 15,84 persen didominasi oleh lulusan D-1 dan S-1 (nasional.tvone.co.id, 9 Juni 2010).

Angka pengangguran seakan berkurang. Namun, sektor pekerjaan semakin memburuk akibat praktik fleksibelisasi kerja. Fleksibelisasi tenaga kerja bukan hanya telah menghilangkan hak atas pekerjaan, menurunnya pendapatan, juga menghilangkan kondisi aman di dalam bekerja. Akibatnya, di mana-mana muncul informalisasi kerja.

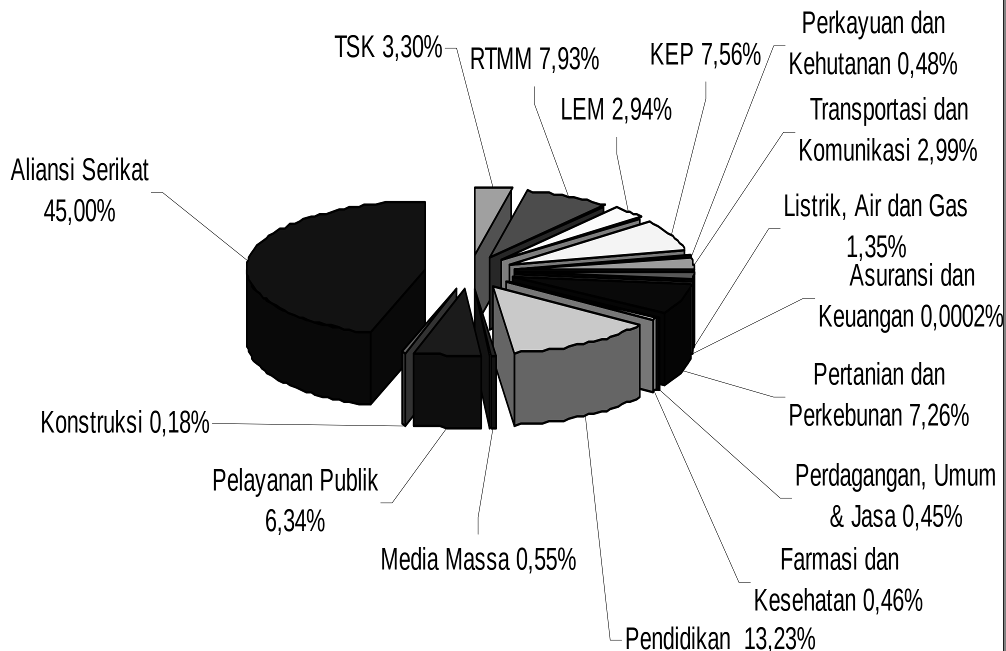
Patut dicatat, fleksibelisasi tenaga kerja terintegrasi dalam paket kebijakan iklim investasi. Melalui investasi, diharapkan dapat

menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk mendatangkan investasi, Pemerintah menggalang kerjasama di tingkat ASEAN maupun secara bilateral. Kerangka utamanya adalah perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA).

Resistensi

- Semester I 2010 terjadi 435 kali aksi massa dengan melibatkan 433.092 orang. Aksi tertinggi terjadi pada Mei sebanyak 109 kali dengan melibatkan massa lebih dari 195.203 orang. Intensitas aksi menurun pada Maret 59 kali dengan hanya melibatkan lebih dari 34.771 orang.
- Aksi terbanyak dilakukan oleh Aliansi Serikat dan terendah dilakukan oleh sektor Asuransi dan Keuangan. Rata-rata aksi menuntut Hak Normatif, diikuti menuntut Kebijakan Pemerintah.
- Dibanding semester I 2009 (445 kali aksi dengan 279.472 orang), terjadi penurunan intensitas aksi, tapi mengalami peningkatan massa. Daripada semester II 2009 (269 kali aksi melibatkan lebih dari 340.863 orang), terjadi peningkatan intensitas dan massa aksi. Semester I 2010, semester I dan II 2009, aksi-aksi masih menuntut Hak Normatif.
- Rata-rata, aksi dipusatkan di kantor pemerintah dan kota-kota besar: Bandung, Jakarta, Medan dan Surabaya. Ada pula aksi di depan pabrik. Metode aksi semakin beragam; ada yang membuka replika presiden, membuat teatrikal, pawai massa, rally massa, menginap di depan pabrik atau depan kantor pemerintah dan lain-lain.
- Kecenderungan tuntutan, yang didominasi oleh hak-hak normatif dapat dimaknai, pelanggaran negara terhadap hak-hak dasar buruh terus dilakukan.

PADA SEMESTER I 2010, ALIANSI SERIKAT menempati aksi terbanyak (45,00 persen), disusul pekerja pendidikan sebagai peringkat kedua (13,23 persen), setelah itu buruh-buruh sektor Rokok Tembakau Makanan dan
Minuman (RTMM) (7, 93 persen), Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) (7,56 persen), Pertanian dan Perkebunan (7,26 persen), Pelayanan Publik (6,34 persen), Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) (3,30 persen), Transportasi dan Komunikasi (2,99 persen), Logam Elekrtonik dan Mesin



Dari berbagai sumber diolah oleh Pusat Data dan Informasi LIPS

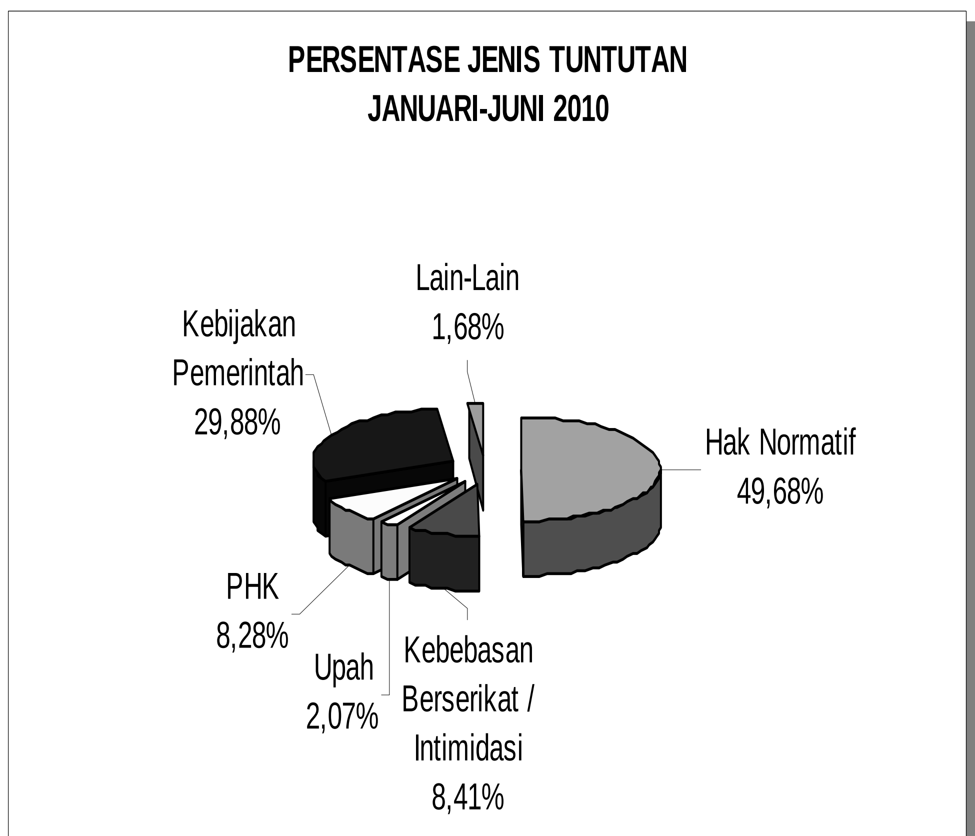
(LEM) (2,94 persen), Listrik Air dan Gas (1,35 persen), Media Massa (0,55 persen), Perkayuan dan Kehutanan (Kahut) (0,48 persen), Farmasi dan Kesehatan (0,46 persen), Perdagangan Umum dan Jasa (0,45 persen), Konstruksi (0,18 persen), serta Asuransi dan Keuangan (0,0002 persen).

Semester I 2010, intensitas dan partisipasi aksi terus meningkat. Di tengah gencarnya kampanye iklim investasi, pelanggaran terhadap hak-hak dasar buruh terus terjadi. Ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah diperlihatkan tuntuntan normatif, semisal upah sesuai dengan UMK, pesangon yang sesuai ketentuan undang-undang, dan lain-lain, menempati urutan pertama (49,68 persen). Sementara aksi-aksi menolak atau merealisasikan kebijakan pemerintah, berupa UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan menolak ACFTA, berada di peringkat kedua (29,88 persen). Sementara tuntutan terhadap penghormatan kebebasan berserikat pun terus mengemuka menempati urutan ketiga (8,41 persen). Umumnya, aksi-aksi menolak liberalisasi

sistem ketenagkerjaan yang dibahasakan dengan penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.

Sementara itu, intensitas aksi terhitung rendah di sektor Konstruksi (0,18 persen) serta Asuransi dan Keuangan (0,0002 persen). Sektor Konstruksi biasanya didominasi oleh jenis pekerjaan yang berbahaya, seperti pembangunan infrastruktur. Dan, sektor Asuransi dan Keuangan terbilang dihuni dengan pekerjaan pelayanan jasa dengan rata-rata pendidikan yang memadai, semisal perbankan. Melempemnya aksi-aksi di dua sektor ini diakibatkan masifnya perekrutan tenaga temporer. Buruh infrastruktur semisal pembangunan jalan tol relatif bekerja dalam waktu tertentu. Dua sektor ini menguatkan bahwa sistem kerja yang fleksibel, secara tidak langsung ikut memperlemah kesadaran berorganisasi bagi buruh.

Sementara itu, tuntutan-tuntutan yang lebih dari hak-hak ekonomis, semisal kebebasan berserikat (8,41 persen) dan meminta dipekerjakan kembali (menolak PHK) (8,28 persen), kenaikan upah (2,07 persen)



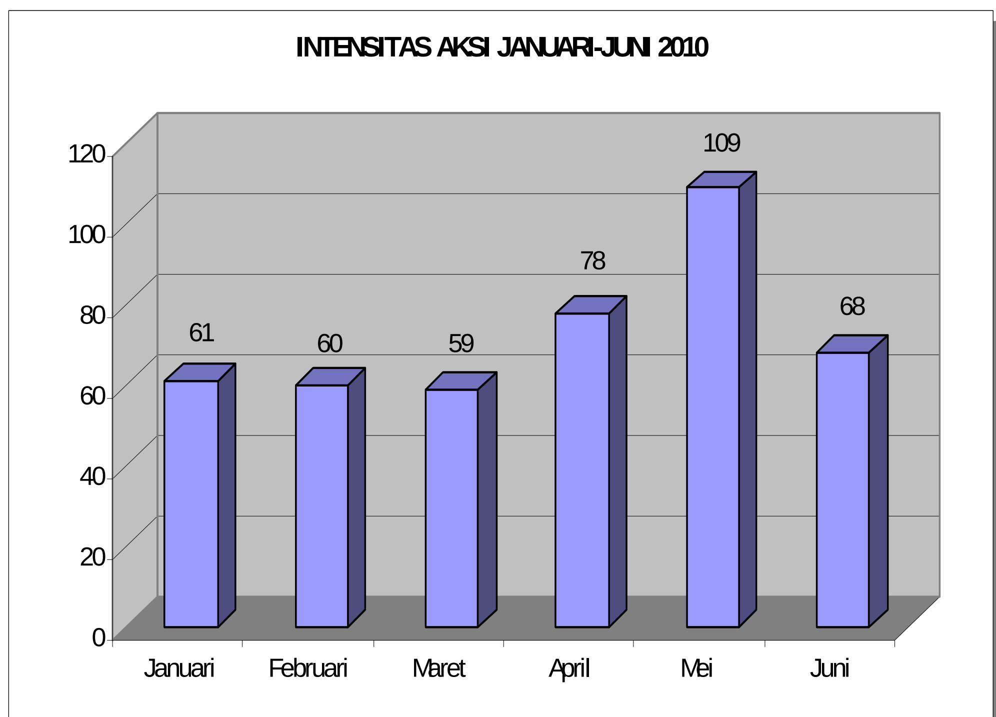
Dari berbagai sumber diolah oleh Pusat Data dan Informasi LIPS

menurun dibanding tuntutan normatif. Ini memperlihatkan pelanggaran pengusaha dan pembiaran negara semakin dahsyat.

Tampak sekali, serikat-serikat semakin akrab dengan metode-metode aksi massa yang dipusatkan kepada pemerintah. Momentum-momentum semisal Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional, yang diperlihatkan dengan intensitas tertinggi pada Mei (190 kali) dimanfaatkan dengan baik untuk mengampanyekan persoalan yang dihadapi rakyat.

Tingginya intensitas aksi pada semester I 2010 dibanding semester II 2009 dibentuk oleh beberapa hal. Pertama, menghebatnya perampasan hak-hak sosial dan ekonomi buruh (Hak Normatif 49,68 persen). Kedua, momentum penolakan implementasi ACFTA, peringatan 100 Hari-nya Pemerintahan SBY, yang dicerminkan oleh tuntutan kebijakan pemerintah (29,88 persen). Ketiga, munculnya kesadaran mengenai pentingnya persatuan, yang diperlihatkan dengan aksi-aksi Aliansi Serikat (45.00 persen).

Intensitas aksi meninggi pada Mei (109 kali) dan April (78 persen), disusul pada Juni (68 kali), Januari (61 kali), Februari (60 kali) dan



Dari berbagai sumber diolah oleh Pusat Data dan Informasi LIPS

menurun di Maret (59 kali). Aksi tersebar di berbagai wilayah, yang umumnya dipusatkan di depan-depan kantor pemerintahan.

Penutup

JANUARI 2010 LALU, Organisasi Buruh Internasional merilis temuannya bahwa sepanjang 2010 pengangguran tetap tinggi, sekalipun ada pemulihan ekonomi (Kapanlagi.com, 27/01/2010). Dari sini dapat diartikan bahwa pemulihan ekonomi dengan cara menalangi perbankan, pada awal 2008 lalu, tidak memiliki relevansi dengan penanggulang kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah Indonesia, pada awal Januari 2010 pun mengkalim berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan hingga 2 persen. Strategi ini dilakukan dengan membuka lebar pintu bagi investasi dan disusul dengan peraturan mengenai daftar negatif investasi. Akuan tersebut layak dipertanyakan. Sebagaimana dikatakan Ahmad Erani Yustika (Kompas.com, 6 Juli 2010), kebijakan investasi di Indonesia terlalu gegabah dan hanya menguntungkan para pedagang besar. Dalam pandangan Yustika, modal kerap bercokol di sektor-sektor sekunder, berpusat di Pulau Jawa, berbentuk jangka pendek dan dimiliki asing. Akibatnya, fundamen ekonomi Indonesia jalan ditempat dan kesenjangan pendapatan tetap menganga.

Liberalisasi keuangan dan perdagangan maka perekonomian Indonesia tidak beringsut. Kaum yang berpendapatan rendah dan stagnan serta para penganggur tetap saja dikerek oleh kenaikan harga barang pokok: inflasi. Hanya para pedagang besar, para distributor, importir dan lain-lain menikmati keuntungan inflasi (Yustika, Bisnis Indonesia, 15 April 2008). Para buruh tidak menerima keuntungan apapun, karena nasib mereka dipukul oleh kebijakan liberalisasi tenaga kerja.

Oleh karena itu, jika pemerintah tidak mengubah arah kebijakannya hanya akan membuahkan pemiskinan dan pengangguran. Sudah saatnya bagi serikat buruh mereposisi perannya. Kesan kuat di masyarakat bahwa organisasi buruh adalah tempat penanganan kasus—meskipun tidak semuanya. Kesan itu muncul karena praktik yang dilakukan hanya menangani kasus-kasus PHK atau kecelakaan kerja. Lalu, apa yang dapat dilakukan serikat?

Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam keadaan krisis kesadaran kelas buruh akan meningkat. Pendapat ini memerlukan pembuktian lebih lanjut. Berdasar penulusuran sejarah, pada masa memburuknya krisis ekonomi dan rejim yang otoriter, nafas buruh terengah-engah.

Dan, ruang gerak serikat buruh sempoyongan. John Ingleson dalam buku *Tangan dan Kaki Terikat; Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial* (2004) menelusuri bahwa pada masa krisis ekonomi 1930-an (depresi besar) rata-rata serikat buruh di Indonesia waktu itu mati suri. Karena, keangotaan buruh menurun dan iuran mampet. Keadaan baru pulih menjelan 1940-an. Namun itu pun tidak berlangsung lama, karena fasisme Jepang hampir melucuti seluruh kekuatan buruh dan serikat buruh.

Karena itu, fasisme, seperti halnya Orde Baru maupun kondisi ekonomi yang memburuk tidak positif bagi gerakan buruh. Dan, layak dipikirkan bersama—karena program pemerintah tidak bisa diharapkan—peran-peran apa yang dapat dilakukan serikat buruh, selain menyelesaikan kasus per kasus. Di masa-masa ekonomi sulit dan keadaan serikat melemah, aksi-aksi frontal kerap menjadi bumerang. Tak jarang, konfrontasi di depan manajemen membuahkan PHK. Mengajukan tuntuntan-tuntutan, baik kepada manajemen maupun kepada pemerintah harus ditempatkan pula untuk mengorganisasikan, mendidik dan melindungi buruh dari kerugian yang paling fatal.

Layak pula dipikirkan, bagaimana caranya menempatkan serikat sebagai wadah belajar berdemokrasi dan meningkatkan kemampuan. Selain, belajar mengikat solidaritas antarburuh. Di era fleksibelisasi tenaga kerja, mau tidak mau buruh kontrak dan *outsourcing* terhampar luas. Praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan oleh serikat lain dalam mengorganisasikan buruh-buruh tidak permanen patut dicontoh dan diterapkan.

Deraaan yang dihadapi buruh bukan hanya upah dan PHK, di pelupuk mata kebijakan privatisasi adalah penyebab terpuruknya kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Untuk menghindari kesan eksklusivisme gerakan, serikat buruh sudah saatnya memerhatikan tuntutan-tuntutan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan elemen masyarakat, semisal menuntut pendidikan dan kesehatan terjangkau dan berkualitas. ***

Tentang Penulis



CHERRY AUGUSTA (26) saat ini sedang menempuh studi HAM dan Demokrasi Strata 2 di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Lelaki kelahiran Matang Suri Kalimantan Barat ini menyelesaikan Strata 1 di Universitas Padjadjaran Bandung, Sekolah Menengah Atas di MA Al-Fatah Lampung Selatan, Sekolah Menengah Pertama di SLTPN 1 Jawai dan SD di Matang Suri. Cherry, begitu ia dipanggil, pernah menjadi Asisten Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Tutor Mata Kuliah Pendidikan Kemasyrakatan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sosiologi UT-UPBJJ Pontianak, Pokjar Sambas dan peneliti PSIK Universitas Paramadina. Dapat dihubungi melalui cherryaugusta@gmail.com



YOGI SETYA PERMANA (24) adalah kandidat peneliti di Pusat Penelitian LIPI. Ia menyelesaikan strata 1 di Universitas Gajah Mada (UGM) Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beberapa tulisannya yang pernah dipublikasikan adalah "Kekuasaan dan Agama" oleh Grafindo Litera Media dan "Gerak Progresif Gerakan Gay Kontemporer di Yogyakarta" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Fisipol UGM dengan judul Volume 12 No. 1 Juli 2008. Dapat dihubungi melalui gejlik_19@yahoo.com



ABU MUFAKHIR (27) adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uniersitas Indonesia Jurusan Komunikasi Massa. Abu pernah aktif di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Bogor, pada 2007-2009. Dapat dihubungi melalui abusurd_13@yahoo.com



LUTHFI ADAM (26) saat ini sedang menyelesaikan Strata 2 di Universitas Gajah Mada dengan studi Kajian Budaya dan Media. Menyelesaikan Strata 1 di Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Luthfi juga adalah dosen magang di Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad. Dapat dihubungi melalui luthfi.adam@gmail.com



YASMINE MELISSA SARI SORAYA (29) belajar Strata 2 di Universitas of Tilburg, Belanda mengenai Hukum Perburuhan Internasional dan Eropa. Perempuan yang menyelesaikan Strata 1 di Universitas Indonesia ini pernah terlibat di Trade Union Right Centre, hingga 2007. Juga akrab dengan dunia penulisan di berbagai jurnal ilmiah. Dapat dihubungi melalui ysoraya@yahoo.com